Petikan Lapangan:

Sebuah Refleksi Perjalanan e-Government di Daerah

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies
UKaid
Sida
USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE
OMIDYAR NETWORK

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Petikan Lapangan:

Sebuah Refleksi Perjalanan e-Government Di Daerah

Maria Lauranti, Eka Afrina, Aria Sakti Handoko, Nike Vonika
dan Samsul Maarif

Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan e-Government di Daerah

ISBN: 978-623-91350-6-5

Cetakan pertama, Agustus 2017

Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Indonesia

Lauranti, Maria., Afrina, Eka., et.al., (2017). Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan E-Government di Daerah

Keywords: *Open Government Partnership,* Pemerintahan Terbuka, *e-Government, e-planning, e-budgeting,* transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi teknologi informasi

Perkumpulan Prakarsa
Jl. Rawa Bambu I Blok A No. 8E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Indonesia
Tel +62-21-7811-798
Fax +62-21-7811-897
Email : perkumpulan@theprakarsa.org

Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Makassar, dan Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari aktivitas "Making All Voices Count", didukung oleh Institute of Development Studies, University of Sussex dan Hivos.

Tim Penulis:

Maria Lauranti, Eka Afrina, Aria Sakti Handoko, Nike Vonika dan Samsul Maarif.

MAKING ALL VOICES COUNT

A GRAND CHALLENGE FOR DEVELOPMENT

About Making All Voices Count

Making All Voices Count is a programme working towards a world in which open, effective and participatory governance is the norm and not the exception. It focuses global attention on creative and cutting-edge solutions to transform the relationship between citizens and their governments. The programme is inspired by and supports the goals of the Open Government Partnership.

Making All Voices Count is supported by the UK Department for International Development (DFID), the US Agency for International Development (USAID), the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) and the Omidyar Network, and is implemented by a consortium consisting of Hivos, IDS and Ushahidi.

Disclaimer: This document has been produced with the financial support of the Omidyar Network, SIDA, UK aid from the UK Government, and USAID. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the official policies of our funders.

Web: www.makingallvoicescount.org

Email: info@makingallvoicescount.org

Twitter: @allvoicescount

UKaid Sida USAID OMIDYAR NETWORK

Daftar Isi

Daftar Isi 5
Daftar Gambar 7
Daftar Tabel 9
Daftar Bagan 10
Daftar Singkatan 11
Prolog 20

BAGIAN PERTAMA PETIKAN DARI DKI JAKARTA 31

Melek Medsos dan Internet: Integritas Pelayan Publik di Era Keterbukaan 32

Para Srikandi di Balaikota: Perempuan Marjinal Di Musrenbang DKI Jakarta 45

Meninggalkan 'Ego-Sektoral': Kolaborasi Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program Kerja di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Melalui Aplikasi KRISNA 61

BAGIAN KEDUA PETIKAN DARI MAKASSAR 71

Peta Relasi dan Wewenang dalam Pelaksanan OGP dan Penerapan E-Government di Kota Makassar 72

Integritas Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif 90

Mengakses Musrenbang : Kisah-kisah Partisipasi Kaum Marjinal dalam Proses Pembangunan di Kota Makassar 108

Dari "War Room" hingga "e-Kemiskinan": Dinamika Perkembangan dan Pemanfaatan Inovasi berbasis TIK di Kota Makassar 127

BAGIAN KETIGA PETIKAN DARI BOJONEGORO 139

Peta Relasi Open Government Desa Penghasil Migas (Campurejo) 140

Dialog Jumat: Ajang Curhat Masyarakat ke Pejabat, ala Bojonegoro 153

Open Government: Sebuah Keniscayaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Masyarakat Bojonegoro 160

Peningkatan Transparansi dalam Proses dan Teknis Kerja di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Melalui Festival OGP 166

Daftar Gambar

Gambar 1 Pak Soleh sedang menunjukkan grup whatsApp "Master of King-Pin" 41

Gambar 2 Bu Masriyah dan Kawan-Kawan dalam Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, April 2017 51

Gambar 3 Pak Hary Sedang Menunjukkan Aplikasi Krisna 62

Gambar 4 Tampilan Depan Aplikasi Krisna 65

Gambar 5 Wawancara dengan Wakil Walikota Makassar Bapak Syamsu Rizal 73

Gambar 6 Wawancara dengan Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar 80

Gambar 7 Suasana Data Center BAPPEDA, Rumah Aplikasi SIPPD 92

Gambar 8 Suasana Kantor Kecamatan dan Kelurahan Panakukkang 95

Gambar 9 Program Pemberdayaan Partisipatif Berbasis "Lorong Warga" (Kiri ke kanan: Lorong Garden (LONGGAR) dan Badan Usaha Lorong (BULO) 97

Gambar 10 Tampilan Website BPKAD dengan Laporan Keuangan dan Aset 100

Gambar 11 Peneliti bersama Ibu Sumarni, Srikandi dari Kelurahan Panakukkang, Kota Makassar 110

Gambar 12 Dominasi Perempuan sebagai Auditor Sosial Kota Makassar 111

Gambar 13 Kegiatan "Tudang Sipulung (Musrenbang) Anak Kota Makassar" 116

Gambar 14 Diskusi bersama Pengurus Forum Anak Makassar 2017 setelah Kegiatan Tudang Sipulung Anak Kota Makassar 118

Gambar 15 Mia, Srikandi Penyandang Disabilitas Kota Makassar 121

Gambar 16 Angkutan Ramah Penyandang Disabilitas "Smart Pete-pete" dan "Invisible Guiding Block" pada Trotoar Merah Marun di Kawasan Pantai Losari 124

Gambar 17 Pusat Komando "War Room" Pemerintah Kota Makassar 128

Gambar 18 Pasukan Jingga Pemkot Makassar dengan Tangkasaki berbasis GPS 129

Gambar 19 Armada Otto Dottoro'ta dan Ambulance Kota Makassar 131

Gambar 20 Rapat Koordinasi TNP2K dan TKPKD terkait Mekanisme Pemutakhiran Data Mandiri dan Sosialisasi Aplikasi E-Kemiskinan 135

Gambar 21 Tampilan Informasi Pendaftar dan Penyebaran Titik Keluarga Miskin dalam Website e-Kemiskinan Kota Makassar 136

Gambar 22 Wawancara dengan Kepala Desa Campurejo 141

Gambar 23 Baliho Program dan Anggaran Desa Campurejo Terpampang di Kantor Desa 142

Gambar 24 Mbah Damin, Wali Amanah Desa Campurejo 146

Gambar 25 Pertemuan Steering Committee OGP di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro 148

Gambar 26 Fasilitas sms center 149

Gambar 27 Penginputan Data Dasa Wisma oleh Kader PKK di Kantor Kepala Desa Campurejo 152

Gambar 28 Suasana Dialog Jumat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro 155

Gambar 29 Seorang nenek tua meminta bantuan modal kepada Kang Yoto, selaku bupati agar ia bisa berdaya secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidupnya 156

Gambar 30 Salah satu warga yang melaporkan mengenai kejelasan sertifikat tanahnya dan langsung direspon oleh SKPD terkait 157

Gambar 31 Produk-produk UKM Sarana Mandiri Sejahtera 162

Gambar 32 Banner UKM Sarana Mandiri Sejahtera 163

Gambar 33 Ibu Sumiatun menjelaskan produk-produk yang dihasilkan UKM Sarana Mandiri Sejahtera 163

Gambar 34 Saluran air yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga 165

Gambar 35 Sumur Bor Desa Campurejo 165

Gambar 36 Baliho Anggaran Dana Desa Pejambon 169

Gambar 37 Poster Anggaran Desa Pejambon (kiri), poster anggaran dipajang di rumah salah satu ketua RT Desa Pejambon (kanan) 171

Daftar Tabel

Tabel 1 Perbedaan Aplikasi KRISNA dengan Aplikasi Renja K/L Sebelumnya 64

Daftar Bagan

Bagan 1 Alur Proses Pengimputan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Sebelum Menggunakan Aplikasi KRISNA 66

Bagan 2 Alur Proses Pengimputan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Menggunakan Aplikasi KRISNA 67

Bagan 3 Peta Relasi Pelaksanaan OGP dan Implementasi E-Government 88

Daftar Singkatan

ABGC	Academician, Business, Government, and Community
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BA	Berita Acara
BAB	Buang Air Besar
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BI	Bank Indonesia
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BKPM	Badan Kerja Samad an Penanaman Modal
BNP2PKB	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Partai Kebangkitan Bangsa
BOPD	Barrels of Oil per Day
BPD	Badan Permusyawaratan esa
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKKD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
BPPKP	Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Badan Pusat Statistik
BULO	Badan usaha Lorong

BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
Carester	Care & Rescue Center
CCTV	Closed Circuit Television
CPI	Corruption Perception Index
CSO	Civil Society Organization
CSR	Corporate Social Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
Daper	Dana Perimbangan
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
Dinas PU	Dinas Pekerja Umum
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
DJPK	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
DPMPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EGDI	E-Government Development Index
e-GovAward	e-government Award
EMCL	ExxonMobil Cepu Limited
ESDM	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
F8K	Format 8 Kolom
FH UI	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
FIK ORNOP	Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah
FM	Modulasi Frekuensi

FOINI	Freedom of Information Network Indonesia
G2B	Government-to-Business
G2C	Government-to-Citizen
G2E	Government-to-Employees
G2G	Government-to-Government
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
Golkar	Golongan Karya
Hanura	Hati Nurani Rakyat
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
HUMANIKA	Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan
HWDI	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
ICEL	Indonesia Center for Environmental Law
ICT	Information and Communication Technology
ICW	Indonesia Corruption Watch
IDFoS	Institute Development of Society
IDS	Institue of Development Studies
IDSA	Indonesia Digital Society Award
INFID	International NGO Forum on Indonesia Development
INFRA	Indonesia For Transparency and Accountability
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPC	Indonesian Parliamentary Center
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ITB	Institut Teknologi Bandung
JAWS	Job Access with Speech
JOB	Joint Operating Body
JSC	Jakarta Smart City
K/L	Kementerian/Lembaga

Kabid	Kepala bidang
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kassubag	Kepala subbagian
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kec.	Kecamatan
Kemen Pan-RB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KIP	Komisi Informasi Pusat
KKN	Kolusi, korupsi, dan nepotisme
KMIP	Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Kominfo	Komunikasi dan Informatika
Kopel	Komite Pemantau Legislatif
KRISNA	Koraborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSP	Kantor Staf Presiden
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KuPAS	Kupas tas berbasis stakeholder
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAPAR	Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Lima2b	Lembaga Informasi dan Komunikasi Masyarakat Banyuurip Bangkit
LISA	Lihat sampah ambil

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	Laporan Keterngan Pertanggungjawaban
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
LPBI	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LPSE	Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MABELLO	Bersolek atau berusaha bersih
MaPPI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
MediaLink	Media Lintas Komunitas
Migas	Minyak dan gas
MoU	Memorandum of Understanding
MTR	Makassar tindak rantasa/tidak jorok
Musrenbang	Musyawarah perencanaan pembangunan
Nasdem	Nasional Demokrat
NGO	Non-Government Organization
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NVDA	Non-visual Desktop Application
OECD	Organization for Economic Cooperation of Development
OG	Open Government
OGI	Open Government Indonesia
OGP	Open Government Partnership
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah atau Organiasi Pemerintah Daerah
OSI	Online Service Index

PAD	Pendapatan asli daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Pattiro	Pusat Telaah dan Informasi Regional
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PeGI	Pemeringkatan e-Government Indonesia
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perbup	Peraturan Bupati
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwalkot	Peraturan Walikota
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKPI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMII	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokkir	Pokok pikiran
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPEJ	Pertamina Petrochina East Java
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PRC	Poverty Resources Center
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pusdakota	Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan
PWYP	Publish What You Pay
Renaksi OGI	Rencana aksi Open Government Indonesia
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RI	Republik Indonesia
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPDesa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDesa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga
RUU	Rancangan Undang-undang
RW	Rukun Warga
SARA	Suku Agama dan Ras
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SEC	Society Education Centre
Seknas FITRA	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Trransparansi Anggaran
Seknas OGI	Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Si-cantik	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik
Sim Monev	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
SIMAKDA	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
SIMBADA	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SIMDA	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMLARAS	Sistem selaras

SIMRAL	Sistem Informasi Perencanaan, Pengangaran, dan Pelaporan
SIMTAPAT	Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat
Si-pegi	Sistem Informasi Kepegawaian
SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPPD	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
Siskeudes	Sistem keuangan desa
Sismon	Sistem monitoring
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejurusan
SMS	Short Message Service
SMU	Sekolah Menengah Umum
SOP	Standard Operation Procedure
Sosbud	Sosial budaya
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP4N	Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional
SPM	Surat Perintah Membayar
SPPN	Sistem perencanaan pembangunan nasional
Subadbeko	Sub Bagian Pebangunan Kota
TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TI	Teknologi Informasi
TII	Telecommunication Infrastructure Index
TII	Transparency International Indonesia

TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKBP3	Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ToT	Training of Trainer
UGM	Universitas Gadjah Mada
UI	Universitas Indonesia
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNDP	United Nations Development Programme
UNPACS	United Nations Political Action Committees
UNPAN	United Nations Public Administration Network
UPS	Uninterruptible Power Supply
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USB	Universal Serial Bus
UU	Undang-undang
WIB	Waktu Indonesia Barat
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YAPPIKA	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan, Masyarakat Indonesia
YASMIB	Yayasan Mitra Bangsa
YKPM	Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat

Prolog

Einstein pernah berujar kegilaan itu artinya melakukan hal sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau diselami, kita bisa menemukan kesederhanaan dalam kejeniusan pemikiran Einstein. Inisiatif pemerintahan terbuka merupakan sesuatu yang mendobrak kebiasaan dan proses bisnis yang ada, menjadi sesuatu yang luar biasa. Pemerintahan terbuka merupakan perwujudan dari penggunaan ruang demokrasi secara utuh oleh semua pemangku kepentingan, baik anggota legislatif, aparatur dan birokrat pemerintah, organisasi masyarakat, swasta dan masyarakat luas.

Indonesia tidak ketinggalan langkah dalam menerapkan pemerintahan terbuka. Sebagai salah satu negara perintis, Indonesia turut mengakui pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Ini terkait kuat dengan fakta bahwa Indonesia perlu lepas

dari cengkraman korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rencana aksi *Open Government* Indonesia mendeskripsikan capaian yang disasar oleh pemerintah. Meskipun terdapat lima kota pengembangan *Open Government Partnership*, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kabupaten Bojonegoro, praktik *open government* juga dikembangkan oleh pemerintah daerah lainnya, seperti Kota Makassar.

Pada kesempatan kali ini, buku ini bertujuan untuk memberikan cerita perjalanan dari daerah-daerah yang telah menyelenggarakan *open government* dan mengembangkan *e-government* dalam upaya reformasi birokrasi di daerahnya. Kisah ini merupakan data kecil yang nilai dan maknanya sangat signifikan untuk bercermin sejauh mana pencapaian, prestasi, jatuh, dan bangun pelaksanaan *open government* dan *e-government*. Cerita-cerita ini ditulis bersama beberapa peneliti dengan pengamatan subjektif dan menggunakan pendekatan refleksi. Penggalian datanya mempertanyakan sejauh mana penyelenggaraan *open government* dan penggunaan *e-government* sungguh-sungguh menyentuh masyarakat, membawa perubahan, dan meningkatkan layanan publik.

Penulisan kisah ini menjadi bagian dari pelaksanaan metode *adaptive learning journey*, sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya menangkap pembelajaran dari praktik kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptasi dan iterasi. Pada sebuah lingkungan yang kompleks antara isu teknis dan unsur politis, tantangan distribusi kekuasaan dan sumberdaya adalah masalah yang konkret. Karakteristik yang dinamis pada persoalan yang hendak dijawab seringkali tidak dapat dijawab dengan sebuah solusi yang didesain pada awal sebuah kebijakan/program. Atas dasar alasan ini, pendekatan yang menekankan relasi, pemahaman mendalam, keberanian eksperimen, dan pemeliharaan mekanisme konsultasi untuk perbaikan aksi dengan basis pembelajaran.

Perjalanan unik dalam pelaksanaan penelitian ini bahkan dijiwai oleh semua tim peneliti yang terlibat. Para peneliti mengakui bahwa baru kali ini mereka diajak dalam sebuah penelitian, di mana sebagai anggota peneliti lapangan, mereka turut berperan untuk penyempurnaan desain penelitian. Ada kegembiraan yang dirasakan saat pendapatnya diapresiasi dan turut membentuk perjalanan refleksi di ketiga wilayah penelitian.

Adalah sebuah tuntutan mutlak untuk beradaptasi dalam proses penelitian ini, menyesuaikan strategi yang diambil dengan kemana temuan lapangan menuntun mereka untuk mempertajam analisis dan mengurai realitas yang ada. Cuplikan teknis ini penting saya bagi dengan pembaca, agar proses adaptasi dengan basis pembelajaran ini diadopsi. Salah satu strategi yang harus digunakan dalam mencapai sasaran *Open Government Partnership* di Indonesia, adalah terus menerus merayakan perubahan dengan mendokumentasikan perjalanan tersebut dan belajar beradaptasi dalam ruang pemerintahan yang dinamis. Kalimat ini berdiri tegak melawan kakunya birokrasi dan proses bisnis pemerintahan yang terkadang menghambat efisiensi dan efektivas.

Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh anggota peneliti, khususnya Eka Afrina, Aria Sakti Handoko, Nike Vonika dan Samsul Maarif yang tekun menelusuri data sepanjang penelitian berlangsung. Semua ini terjadi salah satunya karena besarnya komitmen dari Making All Voices Count (MAVC), khususnya Hivos dan Institute of Development Studies. Kejernihan dalam langkah dan arah pelaksanaan penelitian tidak lepas dari pentingnya diskusi awal di pinggir kolam sebuah hotel tua di Nairobi, Kenya, bersama Ah Maftuchan, Direktur Perkumpulan Prakarsa dan Rosemary Anne McGee, Senior Fellow dari Institute of Development Studies. Diskusi tersebut menjadi tonggak awal ketertarikan Prakarsa atas penerapan *adaptive learning journey.* Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat bermakna, karena lembaga donor dan penerima

dana duduk bersama dan membicarakan proses pembelajaran yang akan dipetik untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Pendampingan Michael Mosses dari Global Integrity dan Sue Soal yang sangat sabar, demokratis, partisipatif, kreatif dan konsisten secara metodologis, telah berhasil melakukan proses pengalihan pengetahuan dan pemberdayaan bagi semua organisasi penerima dana. Dukungan intelektual yang tidak putus sejak *workshop* pertama di Nariobi, Kenya, lalu pada *workshop* kedua di Johannesburg, Afrika Selatan, dan *workshop* ketiga di Manila, Filipina.

Buku ini semoga bermanfaat untuk para pembuat kebijakan, penyusun anggaran, pelaksana program, pendamping masyarakat dan penerima manfaat sehingga pembelajaran dapat diambil dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengakselerasi terjadinya pemerintahan terbuka secara nasional di seluruh provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2018. Inspirasi yang lahir sekiranya dapat memberikan semangat bahwa apa yang dicita-citakan dapat diwujudkan. Sungguh setara dengan kalimat besar, bahwa satu langkah di DKI Jakarta, Makassar, dan Bojonegoro mewakili gerbong lokomotif, yang membawa perubahan bagi semua yang mau ikut lompat ke dalam kereta dengan keyakinan bahwa pemerintahan terbuka itu bukan hanya angan-angan belaka.

Jakarta, Agustus 2017

Maria Lauranti – Principal Researcher

Perjalanan Pembelajaran Adaptif:

Upaya Memotret Pelaksanaan *Open Government* di Indonesia

Dengan dukungan dana dari program *Making All Voices Count* (MAVC), Prakarsa mengelola sebuah proyek penelitian yang dirancang untuk menangkap dinamika, mekanisme, dan gambaran utuh mengenai pelaksanaan *open government* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kami melakukan penelitian dengan cara merunut informasi menggunakan metode *snowball sampling* hingga ke tingkat desa dan menyentuh kelompok marjinal. Dari proses refleksi, asumsi penelitian diperkuat saat mengamati dinamika antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Harapannya, hasil penelitian dapat menghasilkan rekomendasi yang baik dan komprehensif untuk mendorong penerapan *e-government* di seluruh wilayah di Indonesia.

Penentuan lokasi pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan setiap level pemerintah daerah untuk menunjang triangulasi dan saturasi data yang diinginkan. Sepanjang proses pengambilan data dan analisis, peneliti duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk membahas mengenai praktik *e-planning* dan *e-budgeting* di masing-masing wilayah maupun dalam konteks nasional. Lebih jauh, parak aktor kunci bahkan dapat turut berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan terkait penelitian. Penelitian ini juga mengjkaji sejauh mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam ranah pemerintahan terbuka dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan hingga di tingkat desa dalam konteks pemenuhhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah ToC (*Theory of Change*) yang kami kembangkan dalam penelitian mengenai penerapan *Open Government* di Indonesia:

Bagan Theory of Change Penelitian

Sumber: olahan penelitian

Dalam konteks Indonesia, kami memandang bahwa perkembangan dan komitmen pemerintah terhadap implementasi Open Government

berkaitan erat dengan pencapaian tujuan SDGs. Dengan menggunakan terobosan teknologi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan pelayanan publik, maka proses pengumpulan data, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 17 Pilar SDGs juga dapat dilakukan lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dalam dinamikanya, kami menerapkan *Strategy Testing* sebagai landasan penelitian, dimana seluruh tim peneliti memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi strategi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang bagi tim peneliti untuk mengambil keputusan dan segera beradaptasi ketika menemukan hambatan di lapangan. Dengan kata lain, proses penelitian dapat berevolusi sesuai kebutuhan. Melalui penelitian adaptif, pemecahan masalah dapat bersifat lebih humanis karena tergantung pada kemampuan kolektif tim untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Lebih jauh, penelitian ini melihat masyarakat sebagai entitas yang dinamis sehingga diasumsikan bahwa perubahan sulit untuk diprediksi. *Strategy testing* sendiri merupakan sistem pemantauan, yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan program melalui pendekatan adaptif yang berulang. Sepanjang proses penelitian, kami terus menerus menguji dan menyesuaikan asumsi atas pembelajaran dan informasi yang baru diterima.

Data temuan lapangan mengindikasikan ruang partisipasi yang diciptakan oleh pemerintah telah sedemikian berkembang, sementara ruang partisipasi yang berawal dari inisiatif warga belum sebanding perkembangannya. Di berbagai aplikasi *e-government*, partisipasi terjadi dengan dibarengi oleh proses yang transparan dan akuntabel. Misalnya, ketika usulan warga ditolak maka akan ada tampilan yang menjawab alasan usulan tersebut tidak diterima beserta alasan yang jelas. Pemerintah daerah juga berinovasi menggunakan kanal radio dan *youtube* untuk menjangkau warga yang tidak dapat hadir dalam pertemuan secara fisik (*offline*) sehingga bisa tetap terkoneksi dan mendapatkan informasi mengenai perencanaan daerah.

Penelitian ini juga menyoroti krusialnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai pendamping di tingkat pemerintahan daerah untuk mendorong inovasi dan menjembatani masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Refleksi dinamika politik, sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan *e-government*

Sejarah perkembangan OGP di Indonesia memperlihatkan bahwa simetri hubungan antar pihak (pemerintah, representasi politik, dan organisasi masyarakat sipil) turut tumbuh seiring kematangan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip OGP sesuai ketentuan yang ditetapkan bersama dalam OGP Platform. Meskipun belum mengakomodasi *pre-requirements* yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*) secara optimal, namun Pemerintah telah memasukkan unsur KSP (Kantor Staf Presiden) ke dalam Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia. Peran masing-masing K/L juga telah ditetapkan dalam dokumen Renaksi setiap tahunnya. Sementara itu, peran organisasi masyarakat sipil saat ini sudah setara dengan pemerintah untuk terlibat secara aktif dan konsultatif dalam Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia.

Beragam terobosan juga muncul di masing-masing K/L dan/atau instansi pemerintah daerah (mulai dari level Provinsi hingga ke level Kabupaten/Kota dan Desa) untuk menangani permasalahan masing-masing. Berbagai inovasi tersebut muncul dengan berbagai dukungan, baik dari OGP Indonesia, maupun pendampingan organisasi masyarakat sipil. Dalam proses adaptif terhadap perubahan, beberapa tantangan yang hadir misalnya perlunya penguatan infrastruktur dan fasilitas, perubahan kultur terhadap budaya *e-invited spaces*, dan peningkatan kompetensi dari pengguna aplikasi berbasis TI agar tidak hanya menambahkan beban pekerjaan TI kepada staf tertentu saja.

Interaksi yang ada tentu saja bersifat baru, dimana kohesi masyarakat dipengaruhi dalam model komunikasi dan kerja yang baru, khususnya setelah aplikasi berbasis TI digunakan oleh pemerintah. Yang perlu digarisbawahi, meskipun terobosan tersebut bermanfaat dan terbukti efektif meningkatkan efisiensi dalaam banyak aspek, esensi utama dalam pertemuan tatap muka (*offline*) tetap tidak dapat tergantikan. Hal-hal yang mendukung pelaksanaan *e-government* sendiri antara lain adalah kebijakan dan peraturan, infrastruktur (ICT) dan kepemimpinan. Bahkan, faktor kepemimpinan (*political will)* justru menjadi kunci penting dalam pelaksanaan *e-government*.

Berdasarkan *milestone e-government* tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, tahapan perkembangan *e-government* sendiri terbagi dalam 3 tahapan. Pertama, *development era* sampai tahun 2014. Kedua, *integration era* pada tahun 2015 – 2018. Ketiga, *optimization era* pada tahun 2019.

Kami melihat kesuksesan penerapan *e-government* merupakan upaya multi-lapis dan multi-aktor dalam berbagai jenjang pemerintahan misalnua di tingkat nasional (Presiden-Kantor Staf Presiden, Kementerian/Lembaga), Provinsi, Kabupaten/Kota dan bahkan sampai desa. Hakekatnya jelas: OGP bertujuan untuk melihat keterbukaan sebagai dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.

Refleksi kami memandang cuplikan dari kisah sukses perihal penggunaan TI dalam praktik OGP menunjukkan bahwa aplikasi berbasis TI dapat digunakan secara efektif, meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu, biaya dan tenaga kerja. Selain itu, akurasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan dengan lebih tepat dan cepat. Hal ini secara ringkas dapat memangkas proses birokrasi yang ada dari proses bisnis dalam pemerintahan Indonesia.

Pada model yang diterapkan di Kabupaten Bojonegoro yang berupaya untuk menunjukkan transparansi dalam satu siklus perencanaan, anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan program, dapat diamati bahwa gagasan dan praktek yang dimiliki sangat maju dibandingkan dengan model *e-government* yang lainnya (tercermin dalam *open data contract*). Dalam berbagai bentuk berbeda, masing-masing pemerintah daerah mengembangkan ragam inovasi yang mereka perlukan. Saat ini, inisiatifnya dapat ditemukan pada jenjang K/L, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Efektivitas penggunaan ICT dalam mendorong interaksi warga negara dengan pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan terkait peningkatan kualitas dan akses terhadap penyediaan layanan publik sudah dapat terlihat dari partisipasi masyarakat dalam memberikan usulannya melalui aplikasi. Komparasi antara penerapan aplikasi berbasis TI dengan model tradisional menunjukkan bahwa keduanya penting untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diwakilkan secara transparan dan akuntabel. Ruang untuk mempertarungkan kepentingan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan prioritas program tetap lebih baik difasilitasi dalam ruang tradisional. *Invited* dan *e-invited spaces* bersifat saling melengkapi tapi tidak mengurangi makna atau fungsi dari satu dengan yang lainnya. Interaksi berbasis ICT dengan interaksi *non-technology* yang lebih tradisional ternyata juga menjadi beban tersendiri terhadap pekerjaan di beberapa wilayah, seperti menimbulkan beban tambahan pada beberapa orang yang menguasai ICT karena belum seluruh SDM yang ada di pemerintahan sudah menguasai ICT dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kegiatan pendampingan dan penerapan nilai atau budaya yang lebih transparan dan inovatif.

Bagian Pertama

PETIKAN DARI DKI JAKARTA

Melek Medsos dan Internet: Integritas Pelayan Publik di Era Keterbukaan

Abstrak

Keberhasilan upaya keterbukaan pemerintah di berbagai tingkatan baik di pusat maupun di daerah salah satunya perlu didukung oleh integritas pelayan publik. Para pelayan publik harus mampu menjalankan fungsinya menyediakan layanan bagi masyarakat secara transparan, akuntabel, dan dengan pendekatan partisipatif. Secanggih apapun sistem yang telah dibangun, tanpa adanya 'man power' yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi maka sistem tersebut tidak akan berjalan baik. Pemahaman seperti ini menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya transparansi di lingkungan dinas di DKI Jakarta, termasuk salah satunya Dinas Binamarga yang mengurusi persoalan infrastruktur di kota Jakarta khususnya jalan raya. Upaya transparansi kinerja dinas dilakukan antara lain dengan penerapan perencanaan berbasis internet (e-planning) dan penganggaran berbasis internet (e-budgeting). Selain itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peroses-proses pembangunan serta meningkatkan transparansi proses implementasi program di lapangan, Dinas Binamarga DKI Jakarta juga membuka saluran-saluran interaksi melalui media sosial seperti facebook dan twitter. Penerapan teknologi informasi berbasis internet dalam proses pelayanan publik membawa implikasi tersendiri serta menuntut adanya daya dukung tenaga manusia atau SDM yang mampu diandalkan untuk pengoperasiannya. Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran penggunaan internet dalam mendukung kerja operasional di Dinas Binamarga DKI Jakarta.

Prolog

Namanya Pak Soleh. Penampilannya sangat sederhana. Sekilas mungkin kita tidak menduga Pak Soleh memegang peranan penting di Dinas Binamarga DKI Jakarta sebagai Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Perencanaan. Beliau menyambut ramah sewaktu ditemui di kantornya di bilangan Tanah Abang. Ruangan kerja Pak Soleh berada di lantai sepuluh, berada satu lantai dengan ruang kerja kepala dinas. *"Kalau bertemu kepala dinas agak susah, Mas. Sekarang beliau sedang tidak ada di tempat,"* begitu penjelasan Pak Soleh. Sedianya tim peneliti memang ingin bertemu langsung dengan Kepala Dinas Binamarga DKI Jakarta. Tetapi nampaknya kepala dinas sudah mendisposisikan surat permohonan wawancara yang dikirimkan oleh Prakarsa. *"Beliau sudah disposisi ke saya,"* tegas Pak Soleh. Dari obrolan pembukaan tersebut ditambah perkenalan singkat, perbincangan kemudian berlangsung panjang lebar seputar permasalahan *e-government* di Dinas Binamarga dan pengalaman Pak Soleh sebagai Kepala Sub Bagian yang mengurusi *e-planning* dan *e-budgeting*.

Sebagai sebuah dinas yang berhubungan dengan urusan perawatan dan pemeliharaan jalan di ibukota, sangat menarik untuk mengetahui langkah dan prosedur teknis yang ditetapkan oleh Dinas Binamarga ketika ingin memperbaiki sebuah ruas jalan di Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana proses perencanaan pekerjaan dilakukan, apakah pekerjaan tersebut memang sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran dinas melalui mekanisme *e-planning* dan *e-budgeting*, lalu bagaimana menentukan besaran anggaran sangat menarik untuk diketahui jawabannya. Pertanyaan

selanjutnya yang juga penting adalah bagaimana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh Dinas Binamarga.

Menghadapi pertanyaan tersebut, Pak Soleh memberikan senyum ramah sembari mulai memberikan jawaban dengan runut. Pertama, Pak Soleh meminta kami untuk mengetahui dan membedakan antara 'Jalan Arteri' dan 'Jalan Lokal'. Menurut Pak Soleh, tugas dan kewenangan Binamarga sebagai sebuah dinas di tingkat provinsi terbatas hanya mengerjakan perbaikan dan perawatan jalan-jalan yang masuk dalam kategori 'Jalan Arteri'. Sedangkan untuk pengerjaan 'Jalan Lokal', kewenangannya berada di bawah Suku Dinas Binamarga yang berkedudukan di tingkat kotamadya. Selain kedua jenis jalan tadi, Pak Soleh menyebutkan lagi ada yang dinamakan dengan 'Jalan Lokal' dan 'Jalan Lingkungan' yang pengerjaannya berada di bawah kewenangan Satuan Pelaksana (Satpel) di tingkat kecamatan. Jalan lokal dan jalan lingkungan adalah jalanan yang berada dekat dengan permukiman masyarakat.

Mengenai keterlibatan warga dalam program kerja di Dinas Binamarga, menurut Pak Soleh, jalurnya bisa ditempuh melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi ataupun kota, dan tingkatan yang paling bawah ada kegiatan yang disebut dengan 'Rembug RW'. Dalam kegiatan Rembug RW yang dilakukan sebanyak satu kali dalam setiap tahun, seluruh aspirasi masyarakt ditampung untuk diteruskan ke seluruh dinas yang terkait. Namun demikian, menurut Pak Soleh, selama ini usulan yang masuk melalui Rembug RW, dalam hal ini yang terkait dengan tugas Binamarga, selalu merupakan usulan yang sifatnya sangat lokal. Contohnya, masyarakat sering kali mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dan jalan lokal, padahal kewenangan pengerjaannya ada pada Suku Dinas dan Satuan Pelaksana di tingkat kecamatan. Implikasi dari hal ini adalah usulan-usulan tersebut jarang yang diteruskan sampai ke tingkat dinas. Itulah mengapa pekerjaan di dinas sendiri selain

mengandalkan forum-forum partisipatif yang melibatkan warga, juga banyak mengandalkan pemantauan langsung di lapangan.

Di era internet seperti sekarang ini, sambung Pak Soleh, Dinas Binamarga DKI Jakarta juga sudah mulai memanfaatkan berbagai media berbasis internet untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Media yang digunakan adalah antara lain adalah media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Kedua media ini 'diasuh' oleh satu bidang kerja yang disebut 'Comment Center' dengan jumlah personil kurang lebih sebanyak tujuh orang. Tugas masing-masing personil yang rata-rata merupakan anak-anak muda ini bervariasi, di antaranya ada yang bertugas memantau informasi dan pengaduan, memberi respon, serta memantau perkembangan respon pengerjaan di lapangan. Selain media yang sudah disebutkan tadi, masih ada media lain yang digunakan untuk mempermudah koordinasi dan partisipasi masyarakat seperti WhatsApp, SMS Gubernur, E-Kin, yang penggunaannya lebih bersifat internal dinas, serta ada juga aplikasi Qlue yang berkoordinasi dengan Jakarta Smart City (JSC).

Keberadaan media dan kanal partisipasi masyarakat yang sudah disebutkan di atas menurut Pak Soleh sudah cukup menjamin partisipasi dan keterbukaan di Dinas Binamarga. Pemerintah telah menyediakan saluran partisipasi baik secara *offline* melalui Rembug Warga dan Musrenbang, maupun secara *online* melalui media sosial. Saluran partisipasi semacam ini sudah selayaknya dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk wilayah perkotaan seperti Jakarta, kendala seperti ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi untuk mengakses relatif kecil. Hal ini karena sekarang penggunaan *smartphone* atau telepon genggam pintar yang mampu menjalankan aplikasi seperti media sosial maupun untuk *browsing* sudah merata di hampir semua kelompok masyarakat di Jakarta.

Amanat yang Dipikul di Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Tugas Pak Soleh sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran merupakan tugas yang tergolong 'berat'. Artinya, tanggung jawab yang dipikul oleh Pak Soleh berkaitan langsung dengan keberlanjutan kerja-kerja dinas di lapangan. Tanggungjawab orang dengan posisi seperti Pak Soleh antara lain membuat perencanaan mengenai keperluan apa yang dibutuhkan untuk implementasi program selama setahun, menetapkan besaran anggaran yang diajukan, serta membuat evaluasi kinerja secara cermat. Pak Soleh mengaku terbantu dengan adanya sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang saat ini diterapkan di seluruh dinas di DKI Jakarta. Dengan adanya sisetem tesebut, kegiatan perencanaan menjadi lebih mudah dan lebih sederhana karena jajarannya hanya tinggal mengisi *template* yang sudah disediakan. Di sisi lain, kritik Pak Soleh terhadap penggunaan sistem ini adalah penggunaan *template* menjadikan *item-item* belanja yang di-*input* menjadi sangat detail sehingga menjadi kurang fleksibel terhadap perubahan.

Mengenai penganggaran, Pak Soleh menceritakan bahwa saat ini Dinas Binamarga DKI Jakarta menerapkan sebuah pola penganggaran yang disebut 'Penganggaran Teritorial'. Dengan pola penganggaran ini, pengalokasian dana untuk keperluan pemeliharaan maupun perbaikan jalan menjadi lebih fleksibel. Maksudnya begini, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Binamarga berkaitan dengan soal jalan raya, mau tidak mau juga berhubungan dengan nama jalan dan lokasi jalan tersebut. Nah, pola penganggaran lama yang diterpkan adalah mencantumkan nama jalan yang spesifik dalam program kerja yang akan dilaksanakan. Padahal, pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan memiliki unsur tentatif yaitu sulit diperkirakan jalan mana yang secara spesifik membutuhkan perawatan atau perbaikan dalam tahun anggaran tertentu. Dengan pola lama tesebut, kemungkinan dana menjadi *idle* sangat besar sehingga memperbesar

resiko penyerapan kecil. Untuk menghindari kejadian seperti itu, Dinas Binamarga menerapkan pola penganggaran teritorial yang lebih terbuka.

Lebih lengkap mengenai "Penganggaran Teritorial" yang diterapkan di Dinas Binamarga DKI Jakarta bisa disimak dalam kutipan keterangan Pak Soleh sebagai berikut:

> *"Kita menerapkan pola penganggaran yang tidak terkunci oleh lokasi, dalam arti lokasi secara sempit ya, misal jalan A jalan B, kita dalam anggaran nggak membunyikan itu. Karena kalau itu sudah bunyi dan tiba-tiba lokasi itu sudah ada pihak lain atau pihak tertentu yang sudah melakukan (perbaikan), misalnya kecamatan harus merespon dan ternyata itu diperbaiki dengan sumber daya yang mereka punya, uang ini kita nggak mungkin berani pakai untuk kegiatan lain karena sudah tertulis untuk perbaikan jalan di lokasi A, B, C. Nah kita menerapkan namanya penganggaran secara teritorial, tidak lagi memperbaiki jalan di lokasi tertentu, tetapi secara teritorial. Jadi program kita sudah kita bentuk, misalnya perbaikan jalan di Kecamatan A. Artinya semua jalan di kecamatan itu bisa kita cover. Begitu ada usulan masyarakat, pengaduan masyarakat di tengah tahun, di akhir tahun, selama uangnya masih ada itu kita bisa laksanakan. Itu yang masyarakat mau, gitu." (Pak Soleh)*

Sistem *Procurement* yang Transparan

Tantangan berikutnya adalah soal teknis pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, Pak Soleh mengaku bahwa saat ini sudah dilaksanakan dengan baik dan transparan. Saat ini ada dua pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Binamarga yaitu yang pertama menggunakan sistem lelang yang konvensional. Artinya, dinas membuka kesempatan bagi siapapun penyedia barang dan jasa untuk bersaing memasukkan penawaran. Cara ini masih sering dipakai khususnya

untuk pekerjaan yang dianggap lebih kompleks seperti pengejaan konstruksi jembatan. Cara yang kedua adalah melalui e-katalog yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Barang-barang yang diperlukan tinggal dipesan melalui katalog yang sudah menyediakan jenis-jenis barang yang dibutuhkan lengkap dengan daftar harga. Jadi proses belanjanya mirip dengan belanja *online*. Pihak penyedia barang tersebut juga sudah melalui proses seleksi di LKPP. Setelah mereka lolos seleksi, baru kemudian *website* mereka tayang di e-katalog milik LKPP. Menurut Pak Soleh, saat ini prosesnya agak berbeda yakni untuk bisa masuk di e-katalog, penyedia layanan harus mendapat rekomendasi dari *user* atau dinas yang membutuhkan.

Tantangan Keterbukaan: Kekhawatiran di Awal

Saluran transparansi dan partisipasi masyarakat yang saat ini mulai terbuka lebar juga membawa kekhawatiran tersendiri. Kekhawatiran ini muncul terutama sekali di fase-fase awal ketika seluruh *channel* keterbukaan dan partisipasi tersebut mulai dibuka atau diterapkan. Sebagai contoh, sewaktu laman facebook dan twitter dibuka di sekitar tahun 2013-an, sempat muncul kekhawatiran jumlah laporan dan pengaduan termasuk keluhan dari masyarakt akan membludak. Waktu itu memang alasan dibukanya saluran melalui media sosial adalah untuk memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan Dinas Binamarga karena jumlah pengguna media sosial di Jakarta tergolong besar. Namun demikian, jumlah pengaduan yang membludak dikhawatirkan akan sulit direspon dan pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi dinas. Kekhawatiran ini dapat dilihat dari petikan pernyataan Pak Soleh sebagai berikut:

> *"Sebenarnya pada waktu itu juga ada ketakutan, dalam arti, kalau kita nggak sanggup menyelesaikan gimana nih, tapi setelah berjalan makin lama makin baik, bukan berarti kita bisa menyelesaikan semua*

tapi rasanya sih cukup banyak yang bisa kita selesaikan di antara laporan itu sekarang". (Pak Soleh)

Seiring berjalannya waktu, Pak Soleh mengatakan bahwa keterbukaan melalui media sosial justru menjadi wadah yang membangun bagi kedua pihak, yakni masarakat dan Dinas Binamarga sendiri. Perlahan-lahan, banyak keluhan dan laporan yang datang dari masyarakat dapat direspon dengan baik dan justru menjadikan masukan yang berharga bagi dinas. Saat ini media sosial bahkan menjadi semacam wadah pertanggungjwaban dinas kepada publik dengan cara meng-*update* kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Binamarga di lapangan.

"Melek Medsos"

Implikasi lain dari pemakaian media sosial dalam pekerjaannya menurut Pak Soleh adalah dirinya secara tidak langsung diharuskan untuk terbiasa dan mahir menggunakan media sosial atau dengan istilah lain "Melek Medsos". Kegiatan koordinasi di media sosial menuntut keaktifan dari pengguna medsos itu sendiri untuk berinterkasi dan memberikan respon serta memberikan kontribusi berupa *update-update* kegiatan yang sudah dilakukan. Pak Soleh memberi contoh, di internal bagian pemeliharaan di Binamarga terdapat sebuah grup WhatsApp yang diberi nama "Master of King-Pin". Grup yang memanfaatkan aplikasi media sosial WhatsApp ini merupakan wadah koordinasi internal untuk membicarakan permasalahan terkait dengan pengaduan masyarakat. Setelah dibahas, kemudian akan ditentukan siapa yang akan menangani apa dan dalam jangka waktu berapa lama. Setelah itu, proses pengerjaan perbaikan jalan juga dilaporkan melalui grup ini lengkap disertai foto-foto kegiatan dan hasil pekerjaan. Mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam Grup WhatsApp tersebut bisa disimak dalam petikan pernyataan Pak Soleh sebagai berikut:

"Semua, di antaranya ya Satpel, pada Kepala Seksi Pemeliharaan di Sudin, itu semua masuk dalam grup itu. Nah laporan-laporan pengaduan masyarakat baik dari qlue, facebook, twitter, itu kita snapshot, masukin gambarnya, masukin ke grup itu nanti mereka yang, oh ini wilayah saya, saya harus kerjakan, mereka yang turun. Dan setelah turun, setelah mereka kerjakan, mereka laporkan yang sudah dikerjakan. Nah ini ada contohnya, ada grupnya, "Master of King-Pin", di sini mereka melaporkan laporan dari masyarakat, ini mereka kerjakan itu. Ini sehari mungkin kita bisa dapat 200 foto se-Jakarta, bisa lebih". (Pak Soleh)

Pak Soleh berpendapat, menjamurnya media sosial dan media-media lain seperti aplikasi qlue yang dimanfaatkan untuk keterbukaan pemerintah dan partisipasi masyarakat saat ini sudah menuntut para pemangku kepentingan untuk mulai membiasakan diri dengan perkembangan tersebut. Pihak penyelenggara pemerintahan maupun warga masyarakat sama-sama berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam proses partisipasi pembangunan termasuk melalui media sosial yang keberadaannya semakin banyak dimanfaatkan untuk menunjang proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pak Soleh sendiri mengaku tidak mengalami kesulitan berdaptasi dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan semakin menjamurnya media sosial dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Hal ini dikarenakan sebelumnya Pak Soleh juga gemar menggunakan media sosial. Meski demikian, media sosial yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan tentu berbeda karena mengandung unsur tanggung jawab yang lebih besar.

Gambar 1 Pak Soleh sedang menunjukkan grup whatsApp "Master of King-Pin"

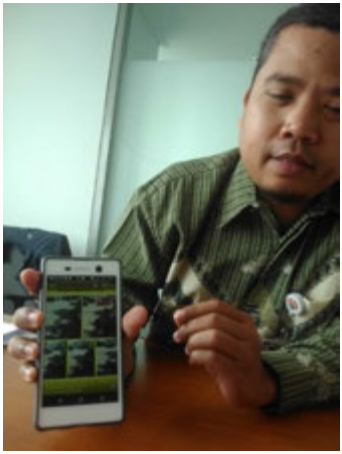

Sumber: dokumentasi peneliti

Terakhir Pak Soleh mengatakan bahwa penggunaan internet dan berbagai media sosial merupakan konsekuensi dari kemajuan jaman sebagai sesuatu yang tidak dapat diabaikan jika ingin meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Diakui olehnya, saat ini dirinya semakin menjadi 'melek medsos' atau melek dunia *online* karena biasanya hanyak menggunakan media tersebut untuk keperluan pribadi tetapi sekarang pekerjaan sudah menuntutnya untuk terus terkoneksi dengan media sosial. Tak jarang telepon genggamnya kehabisan baterai karena harus terus *online*. Seperti penuturan Pak Soleh, jenis pesan yang masuk ke grup Whatsapp bukan hanya dalam bentuk teks, tetapi juga seringkali dalam bentuk gambar sehingga memenuhi memori telepon genggamnya. Menurut pengakuannnya, jika sedang ramai, dalam satu hari dia bisa menerima duaratus pesan dalam bentuk gambar. Bisa dibayangkan bagai mana sibuknya Pak Soleh yang saat ini memang betul-betul sudah 'melek medsos'.

Suka-Duka Pak Soleh Sebagai Pelayan Publik di Era Keterbukaan

Secara teknis diakui oleh Pak Soleh tidak ada kesulitan yang muncul dengan digunakannya sistem *e-planning* dan *e-budgeting* serta dibukanya berbagai saluran partisipasi warga melalui media internet. Malahan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana canggih tersebut banyak pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan baik dan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal. Meski demikian bukan berarti bahwa pelaksanaan *e-government* di lingkungan Dinas Binamarga DKI Jakarta tidak mengalami hambatan sama sekali. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh Pak Soleh terkait dengan penggunaan sistem *e-budgeting* melalui aplikasi APBD Elektronik di laman apbd.jakarta.go.id adalah keharusan menginput *item-item* belanja kebutuhan ke dalam *template* yang telah disediakan, sehingga setelah isian tersebut disetujui oleh Bappeda tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan revisi. Di sinilah letak kendalanya. Dinas Binamarga merupakan dinas yang dinamis dan membutuhkan gerak cepat ketika melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dengan kenyataan bahwa *item-item* produk yang sudah diisikan pada sistem *e-budgeting* tidak dapat diubah, hal ini akan sangat merepotkan pekerjaan di lapangan. Masalahnya, ketika *item* yang dimaksud tidak ditemukan di pasaran, padahal ada *item* pengganti yang juga dapat dipakai, subsitusi produk tersebut tidak dapat dilakukan karena khawatir menyalahi aturan. Persoalan ini terungkap dari penjelasan sebagai berikut:

> *"Misalnya kita beli, yang gampang beli ATK mungkin ya, ketika beli ATK itu kan beda-beda nih pulpen, nah sistem itu yang harusnya menyesuaikan, karena yang input juga terlalu, barang-barang yang seharusnya bisa digeneralkan itu dibuat terlalu spesifik, kasarnya kayak begitulah. Barang-barang yang sebenarnya bisa dibuat general, itu di dalam sistem dibuat spesifik akhirnya tercantumnya spesifik jadi*

sulit kita beralih dengan barang sejenis yang sebenarnya punya fungsi yang sama". (Pak Soleh)

Sebagai seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Pak Soleh mengetahui bahwa sampai saat ini sebetulnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan masih relatif kecil. Penyebabnya antara lain karena alasan yang sudah disebutkan di awal tulisan, yakni biasaya usulan-usulan masyarakat yang berhasil ditampung di proses Musrenbang kebanyakan usulan perbaikan jalan lokal yang paling dekat dengan permukiman warga padahal kewenangannya ada di Suku Dinas atau Satuan Pelaksana di tingkat kecamatan. Tim peneliti membuktikan sendiri persoalan ini melalui simulasi yang diberikan ketika tim sedang menggali data di Bappeda DKI. Di situ kami diperlihatkan usulan-usulan warga yang masuk ke Dinas Binamarga melalui Musrenbang. Dalam daftar usulan yang ditujukan kepada Binamarga memang terlihat banyak sekali usulan-usulan yang sifatnya sangat lokal seperti perbaikan gang atau 'jalan kampung', perbaikan selokan, sampai dengan usulan penyediaan tempat sampah. Kebanyakan dari usulan tersebut ditolak.

Selain itu, Pak Soleh berbendapat bahwa masyarakat saat ini masih bersifat pragmatis, dalam artian bahwa mereka tidak mau repot-repot memberikan perhatian kepada proses-proses perencanaan dan penganggaran di dinas yang mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sangat teknis. Menurut Pak Soleh, masyarakat belum peduli memantau mana program yang belum ter-*cover* dan mana anggaran yang belum diserap dan sebagainya. Padahal, telah tersedia kanal partisipasi melalui *website* di mana masyarakat bisa memantau jumlah anggaran dan penyerapan anggaran di lingkungan dinas di DKI Jakarta. Namun, kurangnya sosialisasi membuat akses warga menjadi tidak optimal. Warga hanya menginginkan agar keluhan yang mereka sampaikan segera ditindaklanjuti. Di luar persoalan-

persoalan di atas, Pak Soleh sebagai seorang pelayan publik mengaku turut gembira dengan perkembangan partisipasi masyarakat khususnya di dunia *online* baik melalui facebook, twitter, maupun aplikasi qlue yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini bisa dijadikan modal partisipasi masyarakat dalam pembangunan di masa mendatang.

Para Srikandi di Balaikota: Perempuan Marjinal Di Musrenbang DKI Jakarta

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan proses penyampaian aspirasi tentang kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dalam perencanaan dan penganggaran saat ini kondisinya dapat dikatakan masih belum baik. Padahal pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah saat ini telah mengupayakan berbagai ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi semua kalangan masyarakat tidak terkecuali bagi kelompok-kelompok marjinal termasuk perempuan. Inisiatif pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya dapat terlihat dari berbagai inovasi seperti membuat forum-forum pertemuan warga sebagai sarana penyampaian aspirasi tersebut. Di Jakarta ada 'Rembug RW' yang dirancang sebagai wadah tahunan musyawarah rencana pembangunan di tingkat RW. Di daerah-daerah lainnya seperti di Bojonegoro ada forum yang disebut "Dialog Jumat" untuk menampung aspirasi warga secara langsung. Demikian juga di Makassar, Surabaya, dan daerah-daerah lain di Indonesia mengembangkan inovasi sendiri dengan tujuan membuka partisipasi warga dalam pembangunan baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun melalui internet melalui berbagai aplikasi. Sayangnya, ruang-ruang partisipasi tersebut nampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya oleh kaum perempuan. Seperti terlihat di DKI Jakarta, sebagai mana diakui oleh kelompok perempuan di Kelurahan Rawajati Timur, forum partisipasi semisal Rembug RW sampai saat ini masih didominasi oleh peserta laki-laki dan kepesertaan perempuan masih sangat kecil. Tulisan ini akan menggambarkan pengalaman kelompok perempuan yang diwakili oleh

beberapa ibu-ibu dalam kepesertaannya di forum-forum aspirasi baik di tingkat RW sampai di tingkat provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang, motivasi, serta harapan-harapan ke depan dari kelompok perempuan dalam partisipasinya di proses pembangunan.

Prolog

Kehadiran perwakilan masyarakat sipil dalam Musrenbang DKI Jakarta Bulan April 2017 yang lalu menarik perhatian dan menjadi penting untuk dicermati. Apalagi wakil kelompok masyarakat sipil yang diundang dan hadir dalam acara tersebut berasal dari kalangan perempuan untuk mewakili suara mereka dalam pembangunan yang selama ini sering dianggap masih 'dianaktirikan'. Menurut panitia penyelenggara, dalam beberapa tahun belakangan Pemerintah DKI Jakarta memang selalu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam kegiatan Musrenbang di Balaikota untuk memastikan kepentingan dan aspirasi mereka dapat terwakili. Kesadaran pentingnya pelibatan berbagai kelompok ini termasuk juga pada kesadaran pentingnya melibatkan kaum perempuan. Alasannya adalah, perempuan memiliki kebutuhan yang khas dan semangat yang tidak kalah dengan laki-laki untuk turut berpartisipasi dalam proses perencaan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Bu Masriyah dan tiga orang temannya dalam Musrenbang di Balaikota pada Bulan April 2017. Dalam forum yang penting tersebut, Bu Masriyah dan teman-temannya sangat bersemangat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mereka yang mewakili kepentingan kaum perempuan.

Awal Keterlibatan Bu Masriyah dan Tumbuhnya Motivasi

Konteks Sosial, Ekonomi, dan Politik

Bu Masriyah merupakan tipikal gambaran perempuan di perkotaan yang tinggal di lingkungan serba sederhana. Tempat tinggal Bu Masriyah dan beberapa orang temannya berada di sebuah RT di bilangan Kelurahan Rawajati Timur. Wilayah permukinan tersebut adalah perkampungan padat di tengah kota dengan ciri khas gang-gang sempit yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Mereka adalah warga kelas menengah ke bawah yang sebagian bekerja di sektor nonformal. Bu Masriyah sendiri menempati sebuah rumah sederhana yang merangkap sebagai warung kecil tempat dia dan keluarganya tinggal. Beberapa orang teman Bu Masriyah yang juga terlibat dalam kegiatan di Sekolah Perempuan tinggal berdekatan dengan Bu Masriyah. Ada yang menempati beberapa petak rumah kontrakan yang memang banyak tersedia di situ. Bu Masriyah hanya tamatan SMA sementara rekannya yang lain rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas.

Latar belakang sosial ekonomi dan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh kelompok ibu-ibu seperti yang dihadapi oleh Mu Masriyah dan kawan-kawan biasanya menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi mereka untuk mendapatkan akses pada partisipasi publik yang lebih luas. Penyebab dari hambatan ini beragam, tetapi pada umumnya adalah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi. Kedua hal ini penting karena keterbukaan dan pertisipasi merupakan proses dua arah, yakni di satu sisi adalah perbaikan-perbaikan di level pemerintah, di sisi lain adalah mengedukasi dan memotivasi masyarakat.

Awal Keterlibatan di Musrenbang

Keterlibatan Bu Masriyah dan kawan-kawan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu pembangunan bermula pada sekitar tahun 2003, ketika mereka ikut dalam program pendampingan yang diadakan oleh sebuah CSO perempuan yang bernama "Sekolah Perempuan". Bu Masriyah dan beberapa orang perempuan ketika itu tertarik mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan karena tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pendidikan berupa pengetahuan dan kemampuan yang berguna bagi perempuan. Kegiatan yang ada di dalam Sekolah Perempuan membantu mereka untuk memperoleh berbagai ketermpilan. Bukan itu saja, mereka juga diberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses-proses pembangunan sehingga dapat mewakili aspirasi dan kepentingan perempuan. *"Kegiatannya sudah mulai dari tahun 2003"*, kata Bu Masriyah menyebutkan tahun berdirinya Sekolah Perempuan. Sedangkan kepersertaan di dalam Musrenbang sudah dimulai kira-kira sejak tahun 2009.

Kesadaran tentang perlunya menyuarakan aspirasi perempuan dalam kegiatan pembangunan juga disertai dengan pemahaman tentang pentingnya mengawasi jalannya program-program pembangunan tersebut. Pada tahap permulaan, mereka didorong untuk berani menghadiri dan ikut serta dalam forum-forum pertemuan yang diadakan untuk menjaring aspirasi warga di tingkat paling bawah yakni dalam pertemuan yang disebut "Rembug RW". Rembug RW merupakan acara tahunan yang diselenggarakan pemerintah DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi masyarakat di tingkat bawah dalam pembangunan. Dalam Rembug RW, perwakilan Sekolah Perempuan didorong untuk berani menyuarakan aspirasi mereka. Sejak keterlibatan pertama mereka di tahun 2009, praktis mereka selalu hadir dalam setiap Rembug RW yang diadakan setiap tahun di lingkungan RW tempat mereka tinggal.

Setelah mendapatkan pengalaman dalam kepesertaan di Rembug RW, ibu-ibu Sekolah Perempuan didorong untuk mengikuti forum-forum serupa di tingkat yang lebih tinggi seperti Musrenbang di tingkat kecamatan dan kota. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian muncul kesadaran tentang pentingnya menyarakan aspirasi perempuan dalam setiap proses pembangunan. Mereka dapat menyaksikan proses diskusi dan bagaimana usulan-usulan warga ditampung. Dari situ juga mereka menyadari sebagai perempuan sangat penting untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti itu karena ternyata jumlah peserta perempuan di setiap diskusi sangat sedikit.

Motivasi kuat untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti Rembug RW dan Musrenbang, baik di tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi, muncul karena mereka menyadari pentingnya keterlibatan perempuan. Apalagi ditambah fakta bahwa selama ini forum-forum tersebut masih sangat sedikit diikuti oleh perwakilan perempuan. Dari pengalaman menjadi peserta, ibu-ibu ini mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang diundang dalam forum biasanya para pria yaitu para ketua RT yang jarang sekali hadir beserta istri. Hal ini berakibat pertemuan tersebut aspirasi yang muncul lebih banyak selalu dari kalangan laki-laki seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, perbaikan selokan, penerangan jalan, dan sebagainya. Padahal yang berkepentingan dalam proses pembangunan bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Keterlibatan para srikandi perempuan dalam Musrenbang sedikit banyak menjadi inspirasi bagi kalangan perempuan untuk turut aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait usulan-usulan untuk mendorong pemberdayaan perempuan misalnya dalam kebutuhan akan kursus keterampilan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Dari situlah kemudian kesadaran untuk mengikuti Musrenbang baik di tingkat paling bawah seperti Rembug RW sampai di tingkat provinsi itu muncul serta terus menguat.

Sekilas Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan memiliki andil besar dalam menumbuhkan kesadaran dan motivasi keterlibatan perempuan di Kelurahan Rawajati Timur yang mengikuti kegiatan di Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan digagas oleh sebuah organisasi masyarakat sipil bernama Kapal Perempuan pada sekitar tahun 2003 di Kelurahan Rawajati Timur. Tentang Sekolah Perempuan ini, salah seorang staf Kapal Perempuan yang juga hadir di Musrenbang DKI Jakarta menuturkan, tujuan didirikannya Sekolah Perempuan adalah untuk menyediakan pendidikan luar sekolah bagi kelompok perempuan miskin. Selain ditujukan untuk kelompok perempuan miskin, sekolah perempuan juga ditujukan bagi kelompok-kelompok inklusi yakni antara lain lansia, disabilitas, dan perempuan-perempuan yang kesulitan mendapat akses. Model ini sedang diadvokasi untuk bisa dilaksanakan secara luas di DKI Jakarta sebagai pendidikan kemasyarakatan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), juga sesuai dengan Nawacita yakni pendidikan inklusi dan berkeadilan gender.

Di Kelurahan Rawajati Timur tempat Ibu Masriyah dan kawan-kawan belajar, mereka didorong untuk mengembangkan diri dan belajar setiap minggu dengan cara bertemu dan diskusi, belajar tentang isu-isu sosial dan isu-isu perempuan serta mereka didorong untuk melakukan pemantauan terhadap program-program pembangunan. Pemantauan program-program pembangunan ini salah satunya dilakukan dengan selalu hadir dan memberikan aspirasi mereka dalam Rembug RW di lingkungan masing-masing. Hal lain yang juga penting adalah para ibu-ibu ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah mereka bahkan pernah juga mereka sampai berhasil menurunkan harga Beras Miskin (Raskin) yang pada waktu itu dianggap terlalu mahal dan membebani orang miskin di kelurahannya.

Mereka menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan memiliki resiko karena terkadang harus berhadapan dengan pemerintahan di tingkat bawah seperti Ketua RW dan Lurah. Hal ini dikarenakan sikap mereka yang terkadang dirasa sebagai sebuah sikap yang kritis. Hal ini berdampak antara lain pada minimnya dukungan dari para ketua RW dan Lurah terhadap kegiatan-kegiatan di Sekolah Perempuan. Bu Masriyah bercerita ketika dia mengusulkan bantuan pendanaan untuk Sekolah Perempuan, pihak kelurahan mengaku tidak memiliki alokasi dana untuk itu dan meminta Bu Masriyah untuk berkordinasi dengan PAUD, padahal kegiatannya berbeda.

Usulan-Usulan dalam Musrenbang: Aspirasi Kaum Perempuan

Gambar 2 Bu Masriyah dan Kawan-Kawan dalam Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, April 2017

Usulan-usulan yang disampaikan oleh Ibu Masriyah dan teman-temannya baik dalam forum Rembug RW maupun di Musrenbang biasanya selalu

mewakili aspirasi perempuan dan kelompok masyarakat miskin. Misalnya saja ketika di Balaikota dalam Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta, dalam panel tentang pendidikan, Ibu Masriyah menyinggung persoalan jaminan pendidikan untuk warga miskin melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di forum yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta jajarannya tersebut, Bu Masriyah mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa keluhan masyarakat miskin berkenaan dengan KJP. Pertama, harga yang harus dibayar oleh penerima KJP untuk berbagai jenis barang bisa mencapai dua kali lipat. Bu Masriyah mengusulkan agar besar bantuan KJP bisa ditambah dan selain itu juga dibuatkan pasar khusus atau toko khusus yang diperuntukkan bagi pemegang KJP. Rekan Bu Masriyah yang lainnya menyoroti persoalan banyaknya anak-anak putus sekolah di lingkungannya dan banyak orang dewasa yang dulu putus sekolah ingin melanjutkan pendidikan formal tetapi tidak mengetahui prosedurnya.

Usulan-usulan lainnya yang sering mereka kemukakan dalam forum-forum seperti ini adalah antara lain tentang kebutuhan kaum perempuan terkait dengan kesehatan. Contohnya soal peningkatan fasilitas dan sarana untuk Posyandu dan Posyandu Lansia. Bu Masriyah menuturkan, dalam setiap pertemuan yang memang biasanya didominasi oleh peserta laki-laki, usulan-usulan terkait dengan kebutuhan perempuan jarang sekali muncul. Bu Masriyah mengatakan: *"Kalau di RT RW itu nggak ada usulan yang mengenai kesehatan, anak, perempuan, ibu hamil, rata-rata fisik gitu"*. Tetapi sayangnya, respon yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan aspirasi ini biasanya mengatakan bahwa usulan tersebut sudah ada dalam bentuk program lainnya atau dalam kasus isu kesehatan, usulan itu implementasinya sudah ada di Puskesmas.

Terlepas dari respon yang mereka terima, Bu Masriyah dan kawan-kawan berpendapat bahwa yang terpenting sebetulnya adalah eksistensi mereka dalam pertemuan dan dapat didengarnya aspirasi-aspirasi perempuan yang

selama ini selalu diabaikan. Pasalnya, undangan Rembug RW maupun Musrenbang biasanya mayoritas ditujukan pada laki-laki dan kepesertaan perempuan seolah terlupakan. Seperti dia sebutkan, usulan pembangunan yang biasanya disuarakan oleh kalangan laki-laki biasanya tidak jauh-jauh dari pembangunan dalam bentuk fisik seperti jalan, selokan, tempat sampah, dan lain sebagainya. Padahal menurutnya, pembangunan tidak hanya melulu soal fisik tetapi juga dapat berupa pembangunan manusia seperti dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pelatihan keterampilan.

Bu Masriyah mengakui bahwa sebagain besar usulan-usulan yang mereka sampaikan baik di Rembug RW maupun di Musrenbang ditampung oleh penyelenggara dan dimasukkan dalam usulan RW yang akan diajukan ke tingkat kelurahan. Dia mengaku bahwa setelah usulannya ditampung dalam Rembug RW, tantangan selanjutnya adalah mengawal usulan tersebut bisa sampai di kelurahan dan bagaimana cara agar usulan tersebut bisa masuk sebagai usulan yang diterima di Musrenbang Kelurahan. Di sinilah pentingnya mereka kembali mengikuti kegiatan Musrenbang di Kelurahan, yakni untuk mengawal usulan yang sudah mereka sampaikan dalam Rembug RW. Meskipun tanpa undangan dari panitia pelaksana Musrenbang Kelurahan, mereka tetap hadir untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Persiapan Musrenbang

Rembug RW maupun Musrenbang di tingkat kelurahan adalah acara penting dan oleh karenanya Bu Masriyah dan kawan-kawan merasa perlu untuk mempersiapkan diri untuk mengikutnya sebaik mungkin. Hal ini berkaitan dengan usulan apa saja yang akan mereka sampaikan dalam acara-acara tersebut. Untuk itulah bahwa kepesertaan mereka dalam forum-forum tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan dipersiapkan dengan matang. Sebelumnya mereka sudah mengetahui jadwal kapan

dilaksanakannya Rembug RW ataupun Musrenbang, dengan demikian mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jadwal Rembug RW biasanya lebih mudah untuk diketahui karena dapat ditanyakan langsung ke pengurus RW. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan Musrenbang di tingkat yang lebih tinggi seperti Musrenbang Kota ataupun Provinsi, sampai saat ini mereka masih mengandalkan informasi yang diberikan oleh pendamping dari Kapal Perempuan. Informasi tersebut disampaikan melalui telepon maupun melalui pertemuan langsung dengan pengurus CSO. Kesimpulannya adalah, forum-forum tempat penyampaian aspirasi masyarakat seperti Rembug RW dan Musrenbang merupakan momen yang penting bagi Bu Masriyah dan kawan-kawannya sehingga momen tersebut selalu dinanti dan mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikutinya. Tentang persiapan mengikuti Musrenbang ini, Bu Masriyah mengatakan sebagai berikut:

> *"Kita persiapan dulu, entar di musrenbang mau ini, ...apa sih kebutuhan masyarakat gitu kan, ya kita susun dulu pengurusnya, ini yang mau diajukan ke sana, gitu... nggak tiba-tiba datang ke sana terus kita bicara". (Bu Masriyah)*

Tantangan Partisipasi Perempuan yang Dihadapi

Tantangan yang dihadapi oleh para perempuan dalam usahanya untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan dihadapi pertama karena adanya stigma yang dilekatkan pada mereka bahwa mereka tidak mampu memberikan kontribusi baik berupa tenaga maupun pemikiran atau ide-ide. Padahal stigma seperti ini seringkali salah dan tidak terbukti. Perempuan sebagai subjek penting dalam prembangunan terbukti mampu memberikan kontribusi penting baik dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Selain itu, perempuan sebagai subjek pembangunan memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda

dengan laki-laki sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut harus bisa benar-benar teraspirasikan dalam proses perencanan pembangunan. Faktor lain yang menyebabkan keterlibatan perempuan masih sangat rendah juga karena memang upaya-upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan masih sangat terbatas dan adanya kesan yang timbul sejak dulu bahwa perempuan sudah skeptis dan hanya mengikut saja dengan kehendak laki-laki.

Contoh hambatan lainnya yang menjadi tantangan dalam masyarakat yang masih terlalu mengedepankan budaya patriarki ini misalnya terlihat juga dalam penentuan peserta yang diundang dalam setiap Rembug Warga dan Musrenbang. Menurut Bu Masriyah, sebagai mana juga sudah sering dikemukakan, sebagian besar peserta yang diundang merupakan laki-laki atau 'kaum bapak', hal ini berimplikasi pada aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut dan yang ditampung sebagian besar adalah aspirasi dari laki-laki. Bu Masriyah berpendapat, sebetulnya para ketua RT yang diundang mengikuti Rembug RW dan Musrenbang dapat membawa serta istri mereka masing-masing sehingga forum tersebut dapat menampung aspirasi dan suara perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, sedikit sekali kaum perempuan yang hadir dalam setiap Rembug RW dan Musrenbang.

Di luar dari tantangan yang dihadapi, berbagai respon dari pihak pemerintah terhadap partisipasi dan keaktifan para ibu-ibu muncul baik berupa respon positif maupun respon negatif. Respon positif misalnya dengan memberikan mereka ijin untuk menghadiri Musrenbang tesebut walaupun tanpa undangan. Meskipun tanpa undangan, tetapi karena adanya kesadaran bahwa proses Musrenbang ini sangat penting untuk dihadiri terutama oleh kalangan perempuan, ibu-ibu ini pun hadir tanpa ragu-ragu. Beruntungnya, selama ini mereka belum pernah menghadapi penolakan dari panitia Musrenbang meskipun kehadiran mereka sering tanpa undangan resmi. Pengalaman berbeda dialami rekan mereka di kelurahan lain yang menurut penuturan Bu Masriyah pernah mengalami penolakan dari panitia dan tidak

diperkenankan hadir dalam acara Musrenbang karena tidak mengantongi undangan. Di sisi lain, Pengalaman terlibat aktif dalam menyampaikan aspirasi kaum perempuan dalam pembangunan tidak selamanya merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Seringkali partisipasi mereka justru tidak dianggap penting dan terkadang mereka 'dicuekin'. Kesan 'dicuekin' tersebut misalnya ditunjukkan aparat pemerintah yang acuh-tak acuh ketika mereka sedang berbicara di forum untuk menyampaikan pendapatnya. Tantangan berupa stigma bahwa perempuan tidak mampu dan skeptis tadi mendorong Bu Masriyah dan kawan-kawannya untuk membuktikan bahwa perempuan tidak 'lemah' seperti yang dibayangkan selama ini.

Berjuang Sampai ke Mana?

Perjuangan segelintir srikandi di Rawajati Timur menyuarakan aspirasi mereka dalam forum-forum rembug tentang pembangunan selama ini telah memunculkan harapan tersendiri tentang secercah harapan partisipasi yang lebih besar lagi di kemudian hari dan munculnya program-program yang mewakili semua kepentingan masyarakat termasuk kepentingan perempuan. Tetapi sebelum sampai di situ, pertanyaannya adalah apakah upaya-upaya segelintir srikandi ini sudah membuahkan hasil yang diharapkan? Sampai di manakah perjuangan ini akan terus dilanjutkan dan sampai kapan tujuan serta cita-cita tersebut bisa dirawat?

Belum Ada Satu Usulan pun yang Terwujud

Fakta yang agak mencengangkan sebetulnya kenyataan bahwa dari sekian banyak usulan yang pernah disampaikan oleh Bu Masriyah dan kawan-kawan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, belum ada usulan mereka yang secara meyakinkan diimplementasikan oleh pembuat kebijakan. Pengalaman sejak terlibat sejak dari Rembug RW dan Musrenbang sampai ke tingkat provinsi lebih dari lima tahun belakangan, belum berbuah dalam

bentuk program dari dinas provinsi. Penyebab dari hal ini sebetulnya bisa berupa banyak faktor. Seperti misalnya program-program yang diusulkan dianggap terlalu spesifik misalnya program kesehatan gratis, posyandu lansia, dan lain-lain yang oleh pembuat kebijakan diasumsikan sudah ada di puskesmas dan posyandu. Selain mungkin dianggap terlalu spesifik, usulan mereka yang ditampung baik di tingkat RW maupun di tingkat kelurahan masih harus melewati proses panjang hingga sampai ke dinas yang terkait. Jadi, meskipun usulan-usulan yang mereka sampaikan pada kenyataannya ditampung, tetapi mereka tidak dapat menjamin usulan-usulan tersebut bisa terealisasi karena masih harus melewati berbagai saringan. Seperti dikatakan oleh Bu Masriyah,

> *"Di kelurahan, usulan dari RW itu tetap dimasukkan, gitu, ini dari awal ya dari RW dulu. Nah setelah ke kelurahan, dia sudah mulai tuh udah mulai penolakan pengalihan".*

Partisipasi Secara Online*: "Masih Gaptek"*

Seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini, partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dan sarana partisipasi tersebut dapat berupa forum langsung seperti Rembug RW ataupun Musrebang, tetapi juga bisa dalam bentuk *online* yakni dengan memanfaatkan sarana internet. Partisipasi secara langsung dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh para 'Srikandi' atau kelompok ibu-ibu yang memang memiliki kemauan. Tetapi untuk partisipasi melalui media *online*, ataupun memanfaatkan aplikasi-aplikasi internet, membutuhkan prasyarat tambahan yakni antara lain harus juga 'melek teknologi'. Diakui oleh Bu Masriyah, dia dan kawan-kawannya sampai saat ini belum pernah memanfaatkan media *online* seperti menyampaikan keluhan seperti misalnya melalui aplikasi Qlue. Dia mengakui bahwa untuk itu dia dan kawan-kawan masih harus berlatih.

Bu Masriyah dan kawan-kawannya pernah memperoleh pelatihan internet, tetapi itu terbatas pengenalan dan panduan untuk memasarkan produk melalui internet menggunakan *website* atau *blog*. Menurutnya, pelatihan internet tidak bisa dilakukan secara instan tetapi perlu dilakukan terus-menerus dengan tujuan yang jelas. Lagi pula, setelah pelatihan selesai mereka kembali tidak mendapatkan fasilitas internet maupun komputer sehingga *skill* yang telah diperoleh melalui pelatihan tersebut tidak dapat diasah kembali sehingga lupa dan hilang. Penggunaan internet sebetulnya secara tidak sadar sudah mereka lakukan melalui penggunaan *smartphone* untuk media sosial seperti whatsapp, facebook, dan lain-lain. Tetapi penggunaan internet di *smartphone* ini nampaknya belum maksimal dan belum dijadikan pilihan mereka untuk menyampaikan aspirasi pembangunan misalnya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti Qlue. Bu Masriyah mengku bahwa dia sendiri tidak pernah menggunakan email dan informasi-informasi mengenai jadwal Musrenbang yang seharusnya bisa diakses sendiri saat ini masih harus diberitahu oleh pendamping dari CSO.

Mendobrak Pemerintahan di Tingkat Bawah sebagai Pintu Gerbang Partisipasi

Berikutnya yang juga harus diperhatikan mengenai tantangan partisipasi perempuan dalam program-program pembangunan di Jakarta adalah kendala dan hambatan di tingkat bawah. Artinya, sebagaimana dikatakan oleh Bu Masriyah dan kawan-kawanya, justru kendala yang terberat adalah menghadapi pemerintahan di tingkat bawah seperti RW dan kelurahan. Pengalaman seperti ini dirasakan Bu Masriyah dan kawan-kawan setelah mereka membandingkan penerimaan pihak pemerintah provinsi dengan pemerintahan tingkat kelurahan. Menurut mereka, di tingkat provinsi, yang notabene adalah pemerintahan paling tinggi di

Jakarata, penerimaan justru sangat menyenangkan. Berbeda misalnya dengan salah satu pengalaman mereka ketika menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan, pernah dia mendapatkan respond an sambutan yang kurang baik. Salah satunya ditunjukan dengan respon yang 'acuh tak acuh' ketika di sedang menyampaikan pendapat atau aspirasi mengenai program-program pembangunan untuk perempuan.

Meski menghadapi tantangan besar, Bu Masriyah berpendapat bahwa partisipasi di tingkat pemerintahan paling bawah mulai dari RW dan kelurahan merupakan suatu proses yang paling penting. Menurutnya, dari sinilah semua usulan warga dimulai untuk diproses sampai ke tingkat pemerintahan paling atas. Bu Masriyah mengatakan, *"Ujung tombaknya itu, makanya bilang kan, paling bawahnya ini yang harus kita dobrak"*. Pemerintahan di tingkat paling bawah menurut Bu Masriyah dan kawan-kawan adalah ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kenyataan seperti ini bisa dipahami mengingat proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam program-program pembangunan di Kota Jakarta memang berawal dari tingkat paling bawah, yaitu RT.

Dari pengalaman selama ini, Bu Masriyah mengaku justru penerimaan pejabat pemerintah di tingkat provinsi terasa lebih baik dan professional. Mungkin ini dikarenakan mereka memang mewakili pihak warga masyarakat yang dalam hal ini berasal dari Kapal Perempuan. Jadi kehadiran mereka di Balaikota atas dasar adanya undangan resmi dari panitia musrenbang. Berbeda dengan penerimaan dan respon panitia Musrenbang Provinsi di Balaikota, Bu Masriyah mengaku bahwa penerimaan panitia dan pemerintahan di tingkat kelurahan sering kali 'tidak ramah'. Hal ini mungkin karena biasanya kepesertaan mereka di acara Musrenbang tingkat kelurahan tidak disertai dengan surat undangan.

Dampak Positif Keterbukaan dan Pelibatan Perempuan

Angin segar proses keterbukaan yang sudah mulai bergulir sampai hari ini menunjukkan adanya dampak positif terutama untuk meningkatkan motivasi dan keberanian kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan kota. Meski demikian, seperti yang sudah disebutkan di awal, kelompok ibu-ibu dan perempuan marginal seperti kelompok Bu Masriyah dan kawan-kawan masih sering menghadapi keterbatasan akses partisipasi dalam proses kebijakan. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada kelompok perempuan, diharapkan ke depannya berbagai stigma yang dilekatkan kepada perempuan seperti mereka 'lemah' dan tidak memiliki ide-ide dalam proses pembangunan secara perlahan akan terkikis. Selain itu kebutuhan kelompok perempuan juga sering kali hanya dapat dirasakan dan diidentifikasi oleh kelompok perempuan itu sendiri sehingga dalam proses perencanaan pembangunan yang menyasar kelompok perempuan, suara mereka akan lebih efektif dan kredibel untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.

Meninggalkan 'Ego-Sektoral': Kolaborasi Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program Kerja di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Melalui Aplikasi KRISNA

Abstrak

Peran pemerintah pusat dalam menjamin efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan kementerian dan lembaga antara lain dilakukan dengan membangun sistem dan aplikasi berbasis internet. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mulai menginisiasi aplikasi-aplikasi berbasis internet terutama untuk menunjang pekerjaan internal mereka. Kondisi ini memunculkan peluang yang lebih besar lagi untuk mengintegrasikan data-data dan sistem yang sudah ada tersebut sehingga memiliki dampak yang lebih baik dari segi efisiensi dan keterbukaan. Menyadari peluang tersebut, baru-baru ini Bappenas bersama dua kementerian lain yaitu Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB menggagas sebuah sistem aplikasi yang dapat dipakai secara bersama untuk sebuah kerja yang bersifat kolaboratif. Ide dan kerja sama tersebut menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang dinamakan "KRISNA" yang merupakan akronim dari "Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran". Melalui aplikasi ini, ketiga kementerian tersebut mampu melaksanakan proses-proses perencanaan, penganggaran, serta monitoring terhadap seluruh kementerian dan lembaga secara terpadu, cepat, dan lebih efisien. Melalui KRISNA, Bappenas bisa melakukan proses perencanaan, kementerian keuangan melakukan proses penganggaran, dan Kemenpan-RB dapat melakukan penilaian kinerja masing-masing kementerian dan lembaga secara lebih cepat dan efisien karena koordinasi yang diperlukan dapat dilakukan melalui internet tanpa perlu menghabiskan banyak waktu untuk tatap muka.

Prolog

Di lantai dua gedung Bappenas, tepatnya di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pak Hary Dwi Kurnianto, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola TI di Bappenas menjelaskan panjang lebar mengenai sistem aplikasi paling anyar yang dipakai oleh Bappenas saat ini. Aplikasi tesebut bernama KRISNA. Menurut Pak Hary, KRISNA adalah sebuah sistem aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja kementerian dan lembaga (K/L). KRISNA sendiri merupakan akronim atau kependekan dari "Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran". Aplikasi KRISNA ini akan dipakai dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L mulai tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L.

Gambar 3 Pak Hary Sedang Menunjukkan Aplikasi Krisna

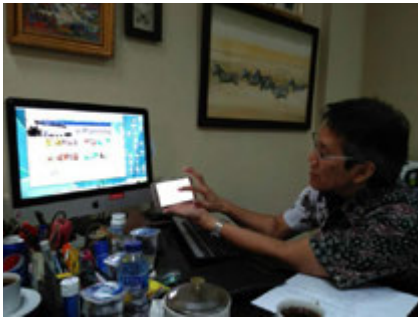

Di ruang kerjanya yang sangat sederhana, sambil menunjukkan tampilan aplikasi KRISNA dan memberikan simulasi penggunaannya, Pak Hary menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi serta latar belakang dibuatnya aplikasi ini. Menurut Pak Hary, aplikasi KRISNA lahir atas kerja sama dari tiga kementerian yang masing-

masing memiliki core business di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Ketiga kementerian yang dimaksud adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kelahiran sistem aplikasi ini merupakan wujud dari kolaborasi dan kerja sama antar institusi di pemerintahan guna menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja dan meningkatkan transparansi, selain juga memudahkan teknis kerja mereka sehingga mengurangi resiko kesalahan karena sudah ditunjang oleh sistem yang modern. Selain itu juga dapat dikatakan, inisiatif ini menghilangkan 'ego-sektoral' karena meskipun masing-masing kementerian mampu membuat aplikasi sendiri-sendiri, namun ketiganya memilih berkolaborasi dan meninggalkan ego sektoral mereka masing-masing untuk tujuan yang lebih besar.

Kolaborasi Untuk Koordinasi yang Lebih Baik

Seperti sudah disinggung di bagian awal tulisan, KRISNA merupakan sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan atas kerja sama tiga kementerian yaitu Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB. Sebelum kelahiran KRISNA, masing-masing pihak ini sebetulnya sudah mempunya aplikasi dan sistemnya sendiri-sendiri. Misalnya Bappenas sudah memiliki Sistem Renja K/L, Kemenkeu sudah memiliki aplikasi arsitektur dan informasi kinerja yang dinamakan aplikasi 'ADIK', sedangkan Kemenpan-RB juga sudah punya aplikasi penilaian kinerja kementerian dan lembaga dan sedianya juga akan terus mengembangkan aplikasi itu sendirian. Adanya gagasan menyatukan atau membuat integrasi tiga pekerjaan ini ke dalam satu sistem *online* tidak terlepas dari kewenangan tiga kementerian ini yang dapat dikatakan 'mengurusi' kementerian lainnya dalam soal-soal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Bappenas mempunyai kewenangan meng-*approve* usulan program-program di kementerian,

Kemenkeu memiliki kewenangan dari segi anggaran, dan Kemenpan-RB memiliki kewenangan memberikan penilaian kinerja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya tiga kewenangan tersebut dapat dijalankan berbasiskan satu sistem yang terintegrasi.

Menurut keterangan Pak Hary, bagi Bappenas KRISNA sebetulnya adalah pengembangan lebih lanjut dari aplikasi Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga (Renja K/L) yang sudah ada sebelumnya. Perbedaannya adalah aplikasi KRISNA sudah terhubung dengan dua kementerian lainnya yakni Kemenkeu dan Kemenpan-RB sehingga masing-masing kementerian tersebut tidak perlu melakukan koordinasi secara manual dan terpisah. Selain itu setiap kementerian atau lembaga secara otomatis juga sudah langsung terhubung dengan tiga kementerian ini ketika akan membuat perencanaan dan prioritas program kerja, mengajukan anggaran, dan evaluasi kinerja oleh Kemenpan-RB. Di luar perbedaan yang sudah disebutkan di atas, perbedaan antara KRISNA dengan aplikasi Renja K/L sebelumnya dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbedaan Aplikasi KRISNA dengan Aplikasi Renja K/L Sebelumnya

No	Renja K/L Tahun Sebelumnya	KRISNA
1.	Stand alone	Real time, berbasis web dan online
2.	Belum terdapat *tagging* Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, Janji Presiden, Kerangka Regulasi, serta Indikasi Pengadaan Barang dan Jasa ketika menginput kegiatan/ program	Terdapat *tagging* Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, Janji Presiden, Kerangka Regulasi, serta Indikasi Pengadaan Barang dan Jasa ketika menginput kegiatan/ program
3.	Belum terdapat informasi lokasi	Terdapat informasi lokasi

4.	Belum terdapat proses otorisasi, verifikasi, dan validasi secara bertingkat.	Terdapat proses otorisasi, verifikasi, dan validasi secara bertingkat.
5.	Belum menyediakan layanan berbagi-pakai data (*data sharing*) antar sistem yang ada	Menyediakan layanan berbagi-pakai data (*data sharing*) antar sistem yang ada

Sumber: https://kemendagri.kl.e-planning.bappenas.go.id/faq.php

Gambar 4 Tampilan Depan Aplikasi Krisna.

Sumber: https://krisna.bappenas.go.id/

Sinkronisasi dengan Program Kerja Presiden

Salah satu keunggulan yang juga dianggap signifikan dari aplikasi KRISNA yakni program-program kerja yang diinput oleh setiap kementerian dan lembaga harus bisa menunjukkan bahwa program tersebut sesuai dengan program kerja serta visi dan misi presiden. Oleh karena itu dalam aplikasi ini, *form* atau isian tentang program kerja tersebut dilengkapi dengan *tagging* program kerja serta visi misi presiden. Setiap program kerja kementerian atau lembaga yang diisikan harus dapat menunjukkan kesesuaian dengan program kerja dan visi-misi presiisen tersebut. Tujuan dari hal ini adalah agar terjadi kesesuaian antara program-program kerja seluruh kementerian dan lembaga dengan visi misi dan program kerja presiden sehingga menghindari ketidaksinkronan.

Kesesuaian program kerja kementerian dan lembaga dengan program kerja serta visi misi presiden menjadi salah satu indikator penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, selain capaian serta tingkat keberhasilan masing-masing program kerja yang sudah direncanakan. Kesesuaian ini dimaksudkan juga sebagai alat kontrol keberhasilan visi misi dan program kerja presiden.

Efisiensi dan Keakuratan

Sebelum adanya aplikasi KRISNA, setiap Kementerian atau Lembaga (K/L) memiliki *user name* di dua aplikasi yang berbeda masing-masing milik Bappenas dan Kementerian Keuangan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Bappenas ketika itu memiliki aplikasi sendiri bernama Renja KL tempat semua Kementerian dan Lembaga menginput rencana kerja mereka. Selain harus menginput rencana kerja mereka di Renja KL milik Bappenas, K/L harus juga melakukan input data di aplikasi atau sistem milik Kementerian Keuangan yang bernama ADIK. Jadi, usulan maupun persetujuan program kerja dan keuangan dilakukan di dalam dua sistem dan aplikasi yang berbeda sehingga menjadi tidak efisien baik secara waktu dan tenaga, terlebih jika ada kesalahan penginputan dari sistem yang satu ke sistem lainnya sehingga harus dilakukan penginputan ulang.

Bagan 1 Alur Proses Pengimputan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Sebelum Menggunakan Aplikasi KRISNA

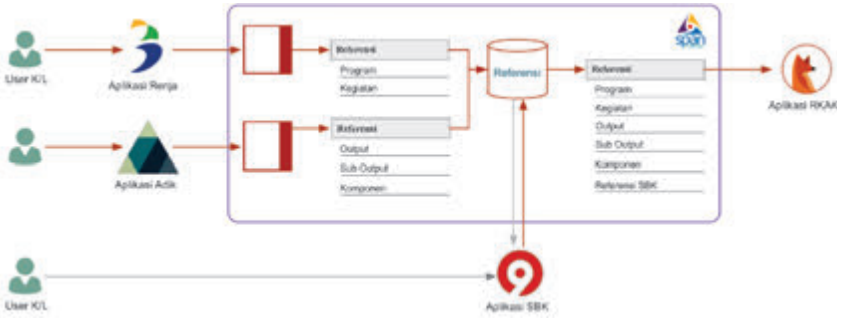

Sumber: Pusdatin Bappenas, 2017

Seperti terlihat dalam skema di atas, para *user* yakni dalam hal ini adalah dari semua K/L harus melakukan input pada dua aplikasi atau sistem yang berbeda. Pertama mereka harus menginput ke dalam aplikasi Renja milik Bappenas berupa program dan kegiatan yang diusulkan. Kedua, mereka harus mengisi aplikasi ADIK milik Kementerian Keuangan untuk menuliskan komponen output, sub output, dan komponen. Selanjutnya *user* Kementerian atau Lembaga juga harus mengisi Satuan Biaya Khusus (SBK) yang terdapat dalam aplikasi lain. Kedua jenis proses input dan verifikasi tersebut dilakukan pada aplikasi yang berbeda.

Bagan 2 Alur Proses Pengimputan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Menggunakan Aplikasi KRISNA

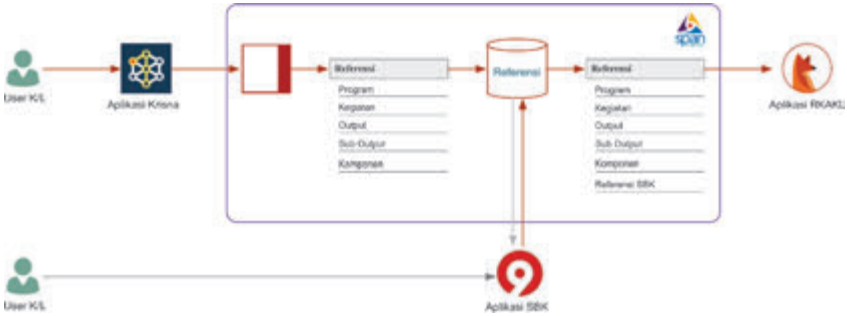

Sumber: Pusdatin Bappenas, 2017

Sementara itu dengan menggunakan aplikasi KRISNA, masing-masing kementerian dan lembaga hanya memerlukan satu akun yaitu akun aplikasi KRISNA. Dengan satu akun di aplikasi KRISNA setiap kementerian dan lembaga dapat sekaligus memasukkan program, kegiatan, sampai dengan komponen kegiatan. Komponen kegiatan ini yang sebelumnya merupakan input yang harus dimasukkan lewat aplikasi ADIK milik Kementerian Keuangan. Dengan terintegrasinya dua aplikasi, user K/L tidak perlu lagi melakukan proses transfer data dari aplikasi Kinerja milik Bappenas ke aplikasi ADIK milik Kementerian Keuangan.

Langkah Awal Mengembangkan E-Government di Daerah?

Aplikasi KRISNA yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan dua kementerian lainnya adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mulai mengembangkan sistem yang mendukung kerja *e-government*. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah disadari memainkan peran strategis untuk membantu jalannya pemerintahan secara lebih efisien dan transparan. Hanya saja kondisi serta tingkat pelaksanaan *e-government* tersebut masih cukup bervariasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk di level daerah sendiri, saat ini kondisi penerapan *e-government* dalam mendukung partisipasi dan transparansi pemerintahan masih sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah tersebut. Biasanya pemerintah daerah yang sudah memiliki *political will* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi akan mendorong inovasi menuju penerapan *e-government* di daerahnya. Seperti dapat kita jumpai di beberapa kabupaten maupun kota seperti Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kota Makasar, dan Kota Surabaya.

Bappenas sendiri, menurut keterangan Pak Hary, memiliki komitmen untuk mendorong penggunaan TI sebagai sarana transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu juga karena penggunaan TI sangat mendukung roda pemerintahan di daerah serta bisa dipakai untuk mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah secara lebih efisien. Semangat dan keberhasilan yang ditunjukkan oleh aplikasi KRISNA nantinya akan ditularkan ke daerah-daerah. Berikut petikan pernyataan Pak Hary:

> *"Kita akan terjun ke daerah nanti bersama-sama dengan MenPAN. MenPAN kan punya mapping- nya daerah mana saja. Jadi kemarin disebutkan Bojonegoro, Banyuwangi. Terus kenapa yang tidak berhasil tidak diundang saja? Karena kan kita tidak jalan hanya sama yang*

berhasil, tapi sama yang tidak berhasil harus kita ajak juga. Kalau Saya melihatnya dari kuadran satu sampai empat kalau kita tarik garis, berapa yah, kekuatan kuadran satu". (Pak Hary)

Mengenai perkembangan penerapan *Open Government* di daerah, Pak Hary berpendapat bahwa untuk saat ini kita harus realistis. Saat ini kita belum bisa menuntut seluruh daerah untuk melaksanakan *Open Government* terutama dalam konteks penerapan *e-government* karena kesiapan daerah tidak sama. Berikut petikan pernyataan Pak Hary:

"Gini yah, kadang-kadang kita tuh pengennya open-open, tapi kita suka menutup mata sudah sejauh mana daerahnya. Jadi jangan sampai ada daerah yang dibilang tidak mau open, karena mungkin saja dia belum mampu untuk menghadirkan dirinya sendiri harusnya sudah sampai di sana. Jadi harusnya sudah sampai mengajak semua untuk naik dulu baru bisa open". (Pak Hary)

KRISNA dan Agenda Reformasi Birokrasi di Kementerian

Hadirnya aplikasi KRISNA yang bertujuan sebagai sarana kolaborasi antar kementerian juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam reformasi birokrasi. Agenda reformasi birokrasi yang salah satunya adalah perbaikan dalam akuntabilitas kinerja terlihat dari adanya data-data yang sudah mulai terintegrasi baik internal maupun antar lembaga. Melalui aplikasi KRISNA ini, masing-masing kementerian dan lembaga nantinya dapat mengakses informasi dan perkembangan kinerja kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu juga nantinya sebagian dari data-data ini dapat diakses oleh publik. Reformasi birokrasi merupakan sebuah gerakan yang kompleks dan terdiri dari berbagai aspek mulai dari organisasinya, tatakelola, SDM dan aparaturnya, dan lain sebagainya. Pak Hary mengatakan, beberapa

tahun belakangan ini sudah ada peningkatan keterbukaan atau transparansi pemerintah dari adanya perbaikan sistem dan data yang dapat diakses baik oleh internal maupun eksternal lembaga. Seperti dikatakan oleh Pak Hary sebagai berikut:

> *"Jadi saya lihat beberapa tahun ini sudah ada peningkatan ya, terlihat dari adanya data-data dan sistem yang sudah mulai terintegrasi, hal-hal yang sama sudah mulai terintegrasi baik di internal institusi maupun antar institusi". (Pak Hary)*

Diharapkan pula dengan adanya inisiatif keterbukaan dan kolaborasi instansi di pusat yang dalam konteks aplikasi KRISNA yang dimotori oleh Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan RB, muncul inisiatif serupa di daerah dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan terjalin juga kolaborasi aktor-aktor di daerah. Ini sejalan juga dengan target Bappenas dan aktor-aktor lainnya di pusat yang akan mempromosikan lebih jauh lagi praktik *e-government* di tingkat daerah.

Meski demikian, efektivitas penggunaan aplikasi ini masih belum dapat diidentifikasi lantaran meski sudah diluncurkan pada medio 2017, aplikasi ini baru akan digunakan dalam perencanaan program dan anggaran tahun 2018. Selain itu, persoalan kesiapan sumber daya manusia, serta hambatan dan kesulitan teknis penggunaan aplikasi ini juga perlu dilihat lebih lanjut.

Bagian Kedua

PETIKAN DARI MAKASSAR

Peta Relasi dan Wewenang dalam Pelaksanan OGP dan Penerapan *E-Government* di Kota Makassar

Abstrak

Relasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan CSO sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat menjadi titik awal proses pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kota Makassar. Kedua terobosan yakni Audit sosial dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dinilai mendukung penciptaan pemerintahan terbuka. Auditor sosial membantu pemerintah melakukan kontrol terhadap programnya melalui partisipasi pengawas berbasis masyarakat dan merupakan interaksi offline, sedangkan SIPPD merupakan aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi secara online.

Prolog

Ruangan di lantai 10 Gedung Kantor Walikota Makassar saat itu masih ramai oleh pejabat pemerintah dari pusat (Nasional), Kota (SKPD), hingga Kecamatan, perwakilan CSO, dan juga wartawan. Mereka baru saja selesai mengikuti acara sosialisasi tentang mekanisme pemutakhiran mandiri data kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Walikota Makassar, Bapak Syamsu Rizal. Saat ditemui di ruangannya, politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa pemantik pelaksanaan *open government* dalam

Pemkot Makassar dimulai dari program kerjasama YKPM (Yayasan Koalisi Pemberdaya Masyarakat) yang didukung oleh Tifa Foundation pada tahun 2012—2013 tentang "Auditor Sosial" sebagai *"program pelibatan masyarakat yang paling fenomenal di Kota Makassar."*

Gambar 5 Wawancara dengan Wakil Walikota Makassar Bapak Syamsu Rizal

Sumber: dokumentasi peneliti

Berbeda dengan pendapat Syamsu Rizal, Ketua YKPM, Mulyadi mengatakan bahwa sebelum program auditor sosial dimulai, rekan-rekan yang tergabung dalam KOPEL (Komisi Pengawal Legislatif) yang bergerak di bidang pengaduan publik telah terlebih dahulu berhasil menginisiasi berdirinya Ombudsman pada tahun 2009, bahkan sebelum Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berdiri. Berdirinya Ombudsman itu menurut Mulyadi merupakan langkah awal yang memancing terbentuknya pemerintahan yang terbuka. Kedua program tersebut membuka pandangan Pemerintah Kota Makassar tentang pentingnya pelibatan warga dalam perencanaan dan pembangunan yang tepat sasaran di wilayahnya serta menjadi persemaian bagi benih-benih pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kota Makassar. Benih-benih OGP

dari program tersebut kemudian berkembang dari tahun ke tahun dengan diterapkannya konsep pembangunan yang terbuka, penerapan sistem pengawasan pembangunan yang partisipatif, dan pengembangan aplikasi *e-government*. Dinamika politik berlanjut dan mengantarkan Syamsu Rizal yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Fraksi Demokrat menjadi Wakil Walikota periode 2014—2019 bersama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Walikota baru.

> *"...kemudian juga bikin Ombudsmen daerah, bikin perangkat-perangkat organisasi yang intinya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada komponen masyarakat itu untuk berpartisipasi sesuai dengan porsinya. Yang kedua itu membiasakan Aparatur Sipil Negara atau pemerintah di awal kami ini untuk mulai menyerap stimulan, masukan, input dari lembaga non-government dan juga dari kelompok-kelompok lainnya." (Syamsu Rizal, Wakil Walikota Makassar, 3 April 2017)*

Syamsu Rizal adalah sosok pemimpin daerah yang terbuka, penuh semangat namun santai, dan menginginkan kinerja yang efektif, tepat sasaran, dan tidak ego-sektoral dari seluruh SKPD. Bersama dengan Ramdhan Pomanto, ia menjadi ko-pilot yang menyusun kebijakan pembangunan seperti Visi, Misi, RPJMD, RENJA, RENSTRA, hingga yang berbentuk peraturan daaerah. Setidaknya kerangka pikir dan tujuan pempimpin Pemkot Makassar dalam menjalankan roda pemerintahan tersurat dalam ungkapan berikut:

> *"Smart dan Sombere' City itu bagian dari keinginan kita, Tagline kita untuk mengeksplorasi potensi yang ada di kita untuk kesejahteraan masyarakat. Smart City itu adalah term yang berbasis IT untuk memberikan percepatan, membuat shortcut, membuat sistem yang menungkinkan semua kegiatan itu terlaksana dengan efisien dan efektif. Sombere' sendiri itu menyangkut touching heart-nya, sentuhan*

hatinya. Sombere' itu adalah konsep budaya lokal yang diinternalisasi oleh semua orang di Makassar ini, sehingga Sombere' dan Smart city itu mewakili keinginan kita semuanya. Kalau Smart City itu adalah software, Sombere itu kira2 HeartWare ... Misinya kita itu ada 3 Rekonstruksi nasib rakyat, Reformasi birkorasi, dan Restorasi tata ruang dan lingkungan. Kita sadar betul bahwa ini tiga tantangan paling besar, rakyat tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri atau disesuaikan dengan standar umum harus ada spesial treatment harus ada affirmative action..." (Syamsu Rizal, April 2017)

Selain itu, ia juga berusaha agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengwasan pembangunan di wilayahnya. Melalui hal itu, ia berharap agar para pejabat di bawahnya juga terbuka terhadap masukan yang datang baik langsung dari masyarakat maupun dari CSO.

Usaha untuk menerapkan pemerintahan yang terbuka itu juga memerlukan peran besar dari kelompok masyarakat sebagai pengawal program pemerintah. Dalam hal ini, Ketua Forum Informasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIKORNOP) Kota Makassar, Asram Jaya mengatakan bahwa telah terjadi perubahan strategis dari beberapa CSO dari yang "berhadapan langsung" menjadi "mitra strategis" pemerintah pasca reformasi bergulir. Pendekatan CSO seperti YKPM dan KuPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil) yang tidak menjadikan pemerintah semata sebagai "objek kritik" tetapi juga menawarkan terobosan yang positif dan jitu untuk membuat fungsi dan tujuan CSO sebagai pengawal program pemerintah berjalan lebih efektif. Melalui pendekatan persuasif dengan tetap menjaga hubungan yang profesional, CSO itu dapat membuka peluang untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan yang terbuka.

Beberapa terobosan yang dihasilkan dari kolaborasi antara Pemkot Makassar dan CSO dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang

terbuka antara lain komunitas Auditor Sosial bersama YKPM dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) bersama KuPAS. Kedua terobosan itu mendukung penciptaan pemerintahan yang terbuka dengan manfaat yang berbeda. Jika auditor sosial membantu pemerintah melakukan kontrol terhadap programnya melalui partisipasi pengawas berbasis masyarakat, SIPPD menjadi sistem elektronik yang menjadikan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih ringkas dan mudah diakses oleh masyarakat. Di dalam sistem elektronik yang purwarupanya diambil dari sistem serupa milik Pemkot Surabaya dan dikembangkan kembali oleh Pak Putu dari KuPAS ini, masyarakat juga dapat memberikan dan mengawal usulannya hingga memberikan laporan terkait program yang sedang berjalan. Selain itu, banyak pula CSO yang melakukan usaha advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kaum marjinal untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penyiapan kapasitas masyarakat oleh CSO dan pembukaan akses partisipasi oleh pemerintah merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam OGP yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana yang dikatakan Syamsu Rizal:

> *"Intinya adalah memberikan pemahaman kepada kami bahwa kita tidak bekerja sendiri, banyak yang memonitor, banyak yang melihat, banyak yang evaluasi, ..." (Syamsu Rizal, Wakil Walikota Makassar, 3 April 2017)*

Melalui Auditor Sosial dan SIPPD, tergambar relasi profesional yang terbentuk antara pemerintah baik pemimpin maupun di tingkat SKPD-SKPD, CSO, dan masyarakat. Mereka saling bersinergi dan berbagi peran dalam proses pembangunan berdasarkan porsinya antara lain:

1. Pemimpin Pemkot memiliki kepentingan untuk memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Jajaran SKPD membutuhkan masukan dan pengawalan program dari unsur masyarakat
3. CSO membantu menyediakan sistem dan menyiapkan kapasitas masyarakat dalam mengawal pembangunan,
4. Masyarakat dan juga kaum marjinal (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dll) terpenuhi haknya untuk didengar dan turut melaksanakan kewajiban untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan.

Sinergi yang dibangun itu tidak hanya berada dalam dunia nyata tetapi juga dalam dunia maya melalui sistem elektronik yang partisipatif.

Lebih jauh, Syamsu Rizal menceritakan pengalamannya saat awal mula mengeksekusi pelaksanaan OGP dan *e-Government* di mana terjadi 'gesekan' antara pemerintah eksekutif dan legislatif. Dengan masuknya proses pembangunan ke dalam sebuah sistem elektronik maka semua pemangku kepentingan harus masuk dan mengikuti aturan main di dalamnya, tak terkecuali DPR. Pada awal implementasi SIPPD, hubungan antara Pemkot Makassar dan DPRD Kota Makassar tidak berjalan harmonis karena para anggota DPRD tidak dapat memasukkan hasil reses mereka ke dalam sistem yang sudah *online*. Akhirnya, Pimpinan Pemkot Makassar mengeluarkan solusi sebagaimana ujaran Syamsu Rizal yaitu:

> *"Jadi waktu tahun pertama, tahun 2015 itu banyak terjadi gesekan (dengan DPR). Tahun 2016 itu sudah relatif tidak ada karena kita sampaikan hasil reses itu langsung masukkan ke perencanaan SKPD-nya. Panggil kepala SKPDnya, kepala seksi, kepala bidangnya dipanggil, koordinasikan, dan mengendorse program reses mereka. Jadi setelah itu sudah mulai 50% sudah terakomodir di situ. Jadi kita tidak bicara di ujung tetapi bicara di proses perencanaan itu." (Syamsu Rizal, Wakil Walikota Makassar, 3 April 2017)*

Gesekan antara eksekutif dan legislatif Kota Makassar menunjukkan bahwa pembangunan suatu sistem baru dalam lingkup pemerintah memerlukan banyak perhatian dan adaptasi baik dari kalangan internal maupun eksternal. Melalui pemaparan di atas terlihat peta relasi yang kuat antara pimpinan Pemkot Makassar yang sudah memiliki sudut pandang OGP dengan CSO yang menyediakan terobosan dan inovasi jitu untuk merealisasikannya. Bagaimana peta relasi yang terbentuk dalam konteks pembangunan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaannya? Hal itu akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Dari Musrenbang hingga Pelaporan: Peta Relasi dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kota Makassar

Salah satu unsur penting dari terciptanya OGP adalah BAPPEDA karena memegang peran fungsi perencanaan yang merupakan pintu gerbang dari proses pembangunan daerah. Sejak tahun 2000, BAPPEDA secara organisasi juga telah membuka diri dengan program-program yang dikerjakan oleh CSO seperti YKPM sehingga memperoleh banyak masukan terkait bagaimana mengelola kegiatan perencanaan yang partisipatif dan efektif. Melalui pengalaman-pengalaman itu, terbentuklah relasi antara BAPPEDA dan CSO terkait yang saling membutuhkan. Salah satu tantangan yang ingin dijawab dari relasi itu adalah bagaimana mempertemukan kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam sebuah arena bernama Musrenbang.

Seorang warga bernama Partono membagikan pengetahuan dan pengalamannya selama mengikuti proses Musrenbang di Kota Makassar. Partono adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Di sela-sela kesibukannya, pria paruh baya itu juga aktif menjabat sebagai Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat

Kota Makassar. LPM adalah sebuah badan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Warga kelurahan Mamajang itu menceritakan proses berlangsungnya Musrenbang dari tingkat kelurahan hinga kota dengan tiap-tiap unsur masyarakat ataupun pemerintah yang berperan di dalamnya.

> *"Musrenbang itu diawali dari para warga yang ada di RT/RW di wilayahnya namanya Pra Musrenbang di bulan Desember, sifatnya non-formal, biasanya diikuti warga saja. Setelah itu diikuti di tingkat formalnya itu nanti pertengahan bulan satu dan jadwal sudah turun dengan catatan seperti ini (menunjukkan buku) seperti di sini ya contoh 19 januari bahkan ini sudah formal ini jadi Pak Camat sudah keluarkan jadwal diselesaikan di kelurahan itu. Jadi (Ketua) RT/RW tadi itu yang pra sudah membuat dengan LPMnya di tingkat kelurahan, dia turun di bawah dampingi LPM di tingkat pemerintahan. Ada beberapa RT/RW yang masuk pengurusan LPM." (Partono, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, Maret 2017)*

Ujaran di atas menunjukkan proses musrenbang di tingkat paling terkecil yaitu RT/RW melalui Pra-Musrenbang hingga masuk ke Musrenbang tingkat Kelurahan. Partono kemudian mengatakan bahwa hasil dari Pra-Musrenbang kemudian dibahas kembali bersama LPM untuk menentukan skala prioritas dari sekian banyak usulan yang berangkat dari RT/RW yang berbeda-beda. Pengurus LPM yang terdiri dari unsur masyarakat termasuk beberapa ketua RT/RW bertugas sebagai fasilitator dalam menyaring usulan untuk menentukan skala prioritas dan mengawal usulan warga tersebut ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Terlihat pula hubungan horizontal antara pejabat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan anggota LPM dari unsur masyarakat dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan LPM

sebagai "intermediaris" sangat penting dan memiliki landasan regulasi kuat yaitu Kepres No.49 tahun 2000 dan Perda No.41 tahun 2001 Kota Makassar yang menjelaskan tingkatan LPM: i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan, ii. Forum Komunikasi LPM (FKLPM) di tingkat Kecamatan, dan iii. Asosiasi LPM untuk tingkat Kota Makassar.

Gambar 6 Wawancara dengan Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar

Sumber : dokumentasi peneliti

"Kita saring mana yang jadi prioritas misal saya dan mas ini berdampingan wilayah yang kebetulan drainase sama, ya sudah kita ajukan sama2 itu prioritas supaya tidak tumpang tindih, kok di wilayah itu bagus di sini tidak, itulah yang dibicarakan, mana yang diutamakan." (Partono, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, Maret 2017)

Partono kemudian mengatakan bahwa salah satu komponen yang harus hadir di dalam setiap pelaksanaan Musrenbang adalah pendamping atau narasumber. Penunjukan narasumber itu ditentukan oleh LPM dan juga telah ada mekanisme penugasan dari SKPD terkait. Beberapa narasumber yang seringkali diundang dan hadir adalah DPRD (sesuai dapil) dan perwakilan dan SKPD (PU, Dinsos, BAPPEDA, dll). Jika DPRD lebih

berperan utuk mengetahui usulan warga agar dapat ia kawal, perwakilan SKPD memiliki peran sentral untuk melakukan penyuluhan terkait program yang menjadi renja atau renstranya. Penyuluhan program oleh perwakilan SKPD terutama PU (Pekerja Umum) sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui apakah aspirasinya sudah menjadi program SKPD terkait atau belum. Sayangnya, menurut Partono, banyak perwakilan SKPD tidak membawa bahan di Musrenbang Kelurahan yang diikutinya sehingga tidak terjadi dialog program. Banyak dari program-program SKPD itu baru dibahas pada Musrenbang Kecamatan atau Musrenbang Kota sehingga hasil Musrenbang di bawahnya yang merupakan aspirasi warga menjadi tumpang tindih dan tidak lagi masuk sebagai skala prioritas. Jika masih ada usulan warga yang belum terakomodir dalam sistem Musrenbang, LPM dan/atau masyarakat masih dapat mengusahakannya melalui mekanisme reses oleh anggota DPR yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

Selain LPM, pemerintah kelurahan dan kecamatan berperan dalam pengesahan hasil musrenbang. Merekalah yang menandatangani hasil musrebang dan kemudian melakukan input hasil musrenbang ke dalam sistem online SIPPD. Keberadaan operator di kantor kelurahan dan kecamatan menjadi penting guna kelancaran input data hasil musrenbang secara langsung dan segera. Keterlambatan operator dalam memasukkan data ke dalam sistem SIPPD oleh sebab yang bersangkutan sakit maupun proses finalisasi hasil Musrenbang yang terlambat oleh tim perumus seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat selanjutnya. Lebih dari itu, pemerintah di tingkat kecamatan juga memiliki peran lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan karena sejak diubahnya tingkat kecamatan menjadi SKPD. Hal itu membuat pemerintah kecamatan memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan dana atau anggaran sebesar satu sampai dua milyar per-tahun untuk setiap kelurahan. Jika telah

sampai pada Musrenbang Kecamatan, hasilnya akan dibahas dalam Musrenbang Kota. Musrenbang Kota berisikan beberapa panel diskusi seperti infrastruktur, kesejahteraan, sosial, dan lain-lain. Tiap SKPD yang berkaitan, perwakilan dari LPM, dan masyarakat akan bergabung di tiap-tiap panel untuk bersama membahas usulan di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, Partono beserta rekan-rekannya sesama anggota LPM memiliki kewajiban untuk mengawal usulan warganya. Ia juga memiliki tanggungjawab sebagai narahubung untuk memberikan informasi terkait usulan mana yang terakomodir kepada masyarakat.

Untuk proses selanjutnya, hasil dari Musrenbang Kota yang diunggah dalam SIPPD itu kemudian dirapatkan secara *offline* dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil dari RKPD kemudian masuk dalam bahasan anggaran bersama Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) yang menghasilkan rencana keuangan dan anggaran. Pada tahapan ini, peran BAPPEDA diteruskan ke BPKAD yang melakukan fungsi *budgeting* melalui SIMAKDA atau Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Daerah. Melalui SIMAKDA, tiap-tiap SKPD dapat memproses anggaran dan keuangan hingga ke tahap pelaporan yang berbasis sistem akrual di mana memungkinkan SKPD untuk melaporkan sirkulasi keuangan secara berkala dan termutakhirkan. Sama halnya dengan SIPPD yang menitikberatkan peran operator dalam hal penginputan data, SIMAKDA juga bergantung pada kualitas tiap-tiap pejabat keuangan untuk segera melakukan pemutakhiran data keuangan di tiap-tiap SKPD. Peran dari BAPPEDA dan BPKAD dalam OGP sangatlah kruisal mengingat keduanya memegang peranan penting dalam proses pembangunan yaitu perencanaan dan penganggaran. Sayangnya kedua SKPD ini belum dapat mengintegrasikan sistem elektroniknya untuk mewujudkan konsep "One Data Center" dari Walikota Makassar. Perbedaan regulasi dan kewenangan (SOP) di tingkat pusat hingga ego-sektoral masih menjadi hambatan utama

dari terciptanya kolaborasi kedua SKPD ini. Dalam satu kesempatan, Erwin Syafrudin Haija, Ketua BPKAD, menjelaskan relasi antara SKPDnya dengan BAPPEDA dalam ujarannya: *"Kalau dalam (siklus) lingkaran, BAPPEDA berada di Musrenbang sampai ke SKPD, (kemudian) masuk dia ke RKA sampai ke SIMAKDA."* Erwin juga mengatakan bahwa secara *online*, sistem informasi keuangan dan anggaran dalam SIMAKDA memiliki posisi yang strategis untuk menjadi pusat dari suatu proses pembangunan yang meliputi perencanaan online, penganggaran online, pengadaan online hingga pelaporan online. Hal itu dikarenakan, prinsip akuntabilitas suatu proses pembangunan dapat diperoleh dari urusan keuangan dan anggaran.

Pasca keluar regulasi tentang penganggaran dan pelaksanaan program, tiap-tiap SKPD mengerjakan program sesuai dengan perencanaan. Adapun untuk pengadaan barang maupun proyek fisik, Pemkot Makassar memanfaatkan sistem lelang LPSE untuk proyek di atas 300 juta. Di sisi lain, menurut Syamsu Rizal, untuk proyek yang berada di bawah itu maka digunakan sistem penunjukan langsung berbasis *Smart PL* (Smart Penunjukan Langsung). Kedua proses *E-Procurement* itu kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan proyek yang diawasi oleh Tim Penerima dan Penilaian Pekerjaan Daerah (TP3D). Pada tahapan ini tergambar peta relasi antara SKPD-SKPD, pelaksana lelang elektronik, dan juga para pengusaha di bidang terkait. Keseluruhan proses pembangunan itu kemudian berakhir pada proses pelaporan yang secara transparan dapat diakses pada beberapa website maupun aplikasi yang disediakan pemerintah seperti SIPPD, laman BPKAD dalam website Pemkot Makassar, hingga LPSE.

Pengawasan Partisipatif secara *Online* dan *Offline* melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Pergerakan Organisasi Kemasyarakatan

Proses pengawasan pembangunan di Kota Makassar dilakukan oleh banyak pihak baik melalui sistem online maupun offline. Auditor sosial memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan dan pelaporan secara offline dan berkala. Hasil dari diskusi publik antara audit sosial dan pemerintah kemudian diteruskan kepada SKPD-SKPD terkait agar ada perbaikan maupun peningkatan. Keberlanjutan program audit sosial juga tidak terlepas dari peran sentral CSO, tokoh masyarakat, dan dukungan pemerintah sehingga kelompok ini dapat terlembagakan. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah Diskusi Publik Audit Sosial yang setiap tahun diadakan. Masyarakat yang terlatih sebagai auditor sosial di tiap-tiap kecamatan akan memaparkan temuannya secara langsung kepada pemerintah. Para perwakilan SKPD yang terkait kemudian memberikan jawaban dan penjelasan sebagai bentuk akuntabilitas mereka kepada konstituennya. Program Auditor Sosial itu menjadi kunci dari pelaksanaan OGP karena menuntut prinsip keterbukaan dan bentuk akuntabilitas pemerintah melalui partisipasi aktif dari warga, sebagaimana dikatakan oleh Wakil Walikota Makassar:

> *"Audit Sosial itu paling terasa, karena dari situ muncul auditor-auditor sosial yang ribuan, yang menjadi kader-kader mendinamisasi pelaksanaan pemerintahan itu sampai tingkat paling bawah. Mereka berinteraksi dengan TKPKD dan BPKADnya kita, dengan RT/RW, dengan LPM, yang secara langsung membuat informasi publik menjadi lebih terbuka." (Syamsu Rizal, April 2017)*

Selain melalui Auditor Sosial, masyarakat umum juga dapat melakukan pengawasan proyek fisik secara mandiri melalui papan informasi di setiap lokasi

proyek. Hal itu dilakukan oleh Pak Arsyam, Ketua RT.2/RW.9, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate yang ikut mengawal proyek infrastruktur di lingkungannya seperti perbaikan jalan dan pemasangan got. Selain itu, beberapa perubahan signifikan juga terjadi di kalangan pebisnis di sektor infratruktur. Mereka dituntut untuk lebih membuka akses informasi tentang proyeknya kepada masyarakat umum melalui papan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan lokal setempat secara berkala. Arsyam mengatakan bahwa para penggarap proyek infrastruktur tidak lagi bisa bermain-main dengan proyeknya karena ada keterbukaan informasi dan pelaporan yang berkala itu. Hal itu terlihat dari ujaran Arsyam sebagai berikut:

> *"Sekarang kita bisa melihat papan informasi proyek itu kalau mau mengawasi, dulu gak selalu ada ya. Di situ bisa lihat nilai proyeknya berapa, berapa luas atau panjang jalan yang dikerjakan, dan oleh kontraktor mana. Sekarang nih misal proyeknya nilainya 20 juta untuk pengaspalan jalan sepanjang 50 meter. Pengaspalannya sudah selesai tapi masih ada uang sisa 3 juta ternyata, ya dia bilang ke kita ini masih ada sisa segini, ya sudah tambahkan saja sekian meter aspalnya sampai sesuai nilai kontrak. Mereka sudah tidak berani macam-macam, karena kalau nggak, ya nggak dipakai lagi sama pemerintah." (Arsyam, April 2017)*

Ujaran di atas menunjukkan bahwa adanya sistem pengawasan pembangunan yang mendorong banyak pihak untuk berlaku transparan, akuntabel, dan partisipatif. Para pebisnis membuka informasi kepada publik dan membuat laporan berkala ke pemerintah lokal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, masyarakat dapat secara langsung dan mudah mengawasi proses pengerjaan proyek pembangunan di lingkungannya.

Secara *online*, masyarakat dapat mengawal pembanguan melalui beberapa cara seperti mengunjungi website-website SKPD yang memuat

secara berkala pelaporan terkait program yang dikerjakannya. Adapula aplikasi *SIM-MONEV* untuk melaporkan hasil pengawasan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Masukan dan laporan yang dikirm warga ke kedua aplikasi tersebut kemudian akan dijawab oleh SKPD yang terkait. Warga juga dapat memperoleh penjelasan tentang program yang masih berjalan maupun sudah selesai melalui *Executive Summary* dalam SIPPD. Untuk laporan yang berkaitan tentang keuangan dan aset masyarakat dapat mengaksesnya dalam website BPKAD.

Selain itu ada juga peran aktif CSO dalam mengawal program pemerintah. Untuk bidang keuangan dan penganggaran, terdapat Yayasan Mitra Bangsa (YASMIB) yang mengambil peran pengawasan. CSO yang berdiri sejak tahun 1999 ini memiliki peran dan fungsi yang mirip dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan bahkan menjadi rekanan. Pak Aziz, Ketua YASMIB menerangkan beberapa hal yang dilakukan oleh lembaganya dalam rangka pengawasan pemerintah antara lain adalah mengadvokasi kebijakan publik di tingkat DPR dan pemerintah daerah, menganalisis perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pengawasan program fisik dan studi penganggaran, dan mencegah serta menginvestigasi penyalahgunaan pengelolaan program dan keuangan daerah. Lembaga yang beranggotakan sepuluh orang ini juga mengalami dinamika hubungan dengan pemerintah dari yang *"langsung blow up ke media"* menjadi *"kawan dengan batasan yang jelas"*. Menurut salah satu anggota YASMIB yang bernama Affan, keterbukaan pemerintah masih bergantung pada figur pemegang kepemimpinan yang seringkali mengalami perubahan akibat mutasi, promosi, dan lain-lain. Salah satu hal yang disorot oleh lembaga ini adalah mencegah dan menanggulangi kemungkinan 'kongkalikong' dalam proses pembangunan berbasis sistem elektronik (LPSE, SIPPD, dll). Menurut Affan, kemungkinan penyelewengan (proyek fisik, akomodasi aspirasi

warga, dll) tetaplah ada meskipun sudah dibangun sistem elektronik. Hal itu dikarenakan sistem elektronik yang dibangun belum sepenuhnya transparan sehingga dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Salah satu usaha yang sedang dicanangkan untuk menanggulangi hal itu adalah memperbanyak pengawas dan pengamat proyek dan anggaran dari masyarakat. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, YASMIB sedang merancang pelatihan terkait pengawasan proyek dan keuangan pemerintah berbasis mahasiswa.

Selain YASMIB adapula beberapa lembaga yang berperan dalam pengawasan kinerja pemerintah seperti LAPAR (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat) yang berfokus pada advokasi dan penguatan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, budaya serta KOPEL (Komisi Pengawas Legislatif) yang berfokus pada pengawasan kinerja pemerintahan eksekutif serta legislatif. Menurut Mul, Ketua YKPM, usaha untuk merintis pemerintahan yang terbuka diawali oleh rekan-rekan dari KOPEL yang memang berfokus pada pengaduan layanan publik. Hasil dari usaha itu adalah didirikannya Ombudsman pada tahun 2009 bahkan sebelum Ombudsman Republik Indonesia berdiri. Sebagaimana yang dikatakan Mul sebagai berikut:

> *"Adanya Ombudsman itu muncul karena didorong oleh CSO yaitu didorong oleh kawan KOPEL. Dia menerima pengaduan layanan publik. Tiga lembaga ini berhasil melembagakan program: LPI oleh PI, audit sosial oleh YKPM, Ombdusman oleh Kopel. Peran kita yang kawal audit sosial, kita terlibat aktif yang mewakili masyarakat." (Mul, Ketua YKPM, April 2017)*

Masyarakat dapat pula melaporkan tindak penyelewengan di dalam tubuh pemerintah kepada Ombudsman Daerah. Bagi para CSO maupun unsur masyarakat yang ingin memperoleh dokumen tertentu dari

pemerintah juga sudah dilindungi haknya oleh Komisi Informasi Publik (KIP). KIP memiliki peran untuk membantu masyarakat yang sedang bersengketa terkait permintaan dokumen dari pemerintah.

Bagan 3 Peta Relasi Pelaksanaan OGP dan Implementasi E-Government

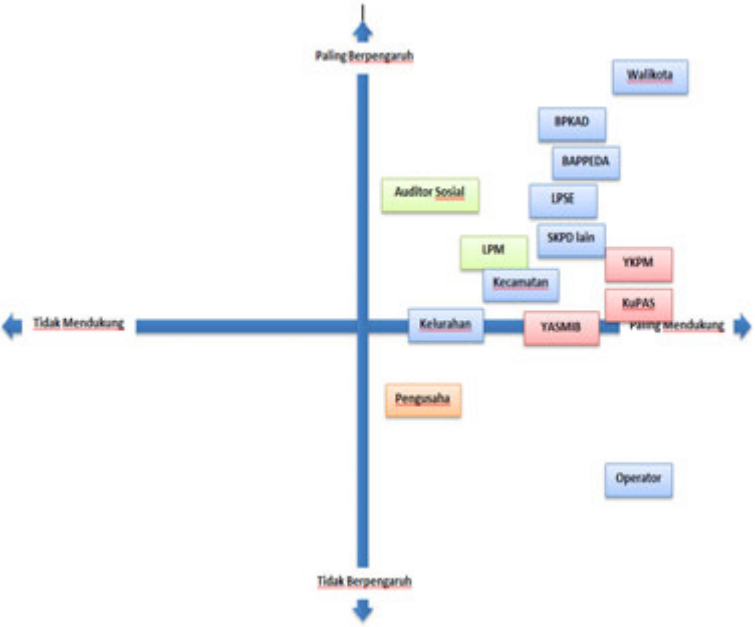

Sumber: olahan peneliti

Melalui pemaparan di atas, tergambar peta relasi baik dalam konteks pelaksanaan OGP maupun implementasi *E-Government* di Kota Makassar. Pada konteks inisiasi OGP, relasi antara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan CSO sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat menjadi titik awal pembentukan proses pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Relasi kemudian meluas ke SKPD-SKPD di jajaran pemerintah, CSO dengan beragam fokus kajian, dan juga bagian masyarakat yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Relasi itu sedikit demi sedikit membuka sumbatan-sumbatan terkait akomodasi dan sinkronisasi

usulan warga dalam program pemerintah, pengawalan dan pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan, hingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan pemerintah seperti BULO (Badan Usaha Lorong). Dalam konteks implemetasi OGP, relasi yang terjadi tidak hanya lintas-institusi tetapi juga lintas-wilayah yang mana purwarupa SIPPD diambil dari sistem elektronik serupa milik Pemkot Surabaya dan sistem SIMAKDA yang dimiliki BPKAD diolah dan dikelola oleh PT. Murfa Surya Mahardika yang berdomisili di Jakarta. Namun, perlunya penguatan relasi antara SKPD pemegang peranan dalam proses pembangunan untuk dapat mengintegrasikan sistem-sistem elektronik yang memuat tahapan-tahapan dari proses pembangunan sehingga membentuk suatu siklus dalam satu *platform* yang padu.

Integritas Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Abstrak

Pelaksanaan e-government perlu melewati beberapa tahapan perkembangan, pelaksanaan yang baik perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur, sarana, dan SDM yang mampu mengelola dengan baik. Selain sejumlah tahapan yang telah dilalui di Kota Makassar saat ini telah dikembangkan berbagai aplikasi yang sudah bisa terintegrasi, salah satunya yakni e-kemiskinan yang dapat menjadi sumber informasi terpadu mengenai keluarga miskin. Data yang dihasilkan terklasifikasi dan temutakhirkan secara berkala. Aplikasi ini dikembankan oleh beberapa instansi untuk mendukung keakurasian data sehingga program-program pemerintah ke depannya menjadi tepat sasaran.

Prolog

"Bukan mudah membuat e-government, memang tidak mudah untuk langsung sampai saat ini. Ada beberapa tahapan yang telah kami lewati, yaitu pertama kita harus siapkan sekian banyak perangkat. Kelurahan kita harus siapkan komputernya, memberi pelatihan, siapkan operator. Untuk itu, setiap tahun kita alokasikan anggaran untuk bangun sistem, bukan hanya sistem elektronik, tetapi juga sistem secara keseluruhan seperti sumber daya, sarana, maupun media yang

harus kita lakukan. Mulai dari keluarahan ini, kita latih dan bangun di 142 kelurahan. Operatornya bukan hanya satu, ada beberapa yang harus kita latih karena kalau bermasalah dengan satu operator, maka harus ada operator lain sebagai second hand." (Amri, Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintah Umum, BAPPEDA Kota Makassar, Maret 2017)

Salah satu usaha pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan pelayanan yang transparan adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pemerintah Daerah. Sistem yang berada di bawah BAPPEDA dan dikembangkan oleh KuPAS ini terdiri dari beberapa aplikasi yang salah satunya adalah e-Musrenbang. Melalui e-Musrenbang, warga dapat memantau usulannya terakomodasi atau tidak di tingkat Musrenbang selanjutnya hingga yang final menjadi program. Di dalam sistem SIPPD warga juga dapat melihat informasi yang berisikan data tentang mengapa usulan-usulan itu diterima misalnya seperti letak/alamat, foto kondisi, volume/satuan, dan lain-lain. Pak Amri, salah satu Kabid di BAPPEDA Kota Makassar menyatakan bahwa tidak mudah menerapkan sistem e-Government di dalam institusinya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya kesalahan pemasukan data yang dilakukan oleh operator di masing-masing keuarahan ataupun kecamatan. BAPPEDA kemudian memutuskan untuk merekrut lebih dari satu orang operator dan memberikan mereka pelatihan secara intensif terkait SIPPD sebagai platform e-Government. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi keterlambatan pemasukan hasil musrenbang ke dalam sistem e-Musrenbang yang kemudian menjadi bahan untuk proses perencanaan tingkat selanjutnya.

Gambar 7 Suasana Data Center BAPPEDA, Rumah Aplikasi SIPPD

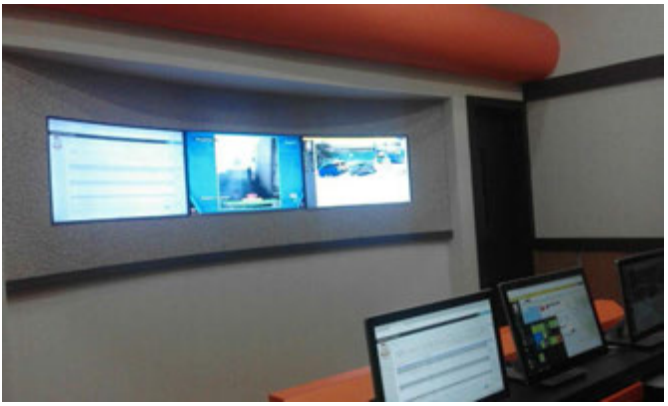

Sumber: dokumentasi peneliti

Di sisi lain, peran operator yang bertugas mengunggah hasil musrenbang ke dalam sistem elektronik SIPPD tidak dapat dianggap remeh. Mereka yang bertanggungjawab mengunggah hasil dari proses Musrenbang satu ke dalam sistem daring dan kemudian dibahas kembali dalam Musrenbang di tingkat berikutnya secara *offline*. Beberapa dari para operator itu menjabat sebagai petugas yang mengetik hasil musrenbang dalam aplikasi *Microsoft Excell* dan kemudian melaporkannya ke dinas di atasnya secara manual. Mereka merasakan perubahan pemasukan data hasil musrenbang dari

yang manual/offline ke digital/online. Berikut pendapat dari dua operator kelurahan dan kecamatan yang berhasil dihimpun:

> *"... enak sih sekarang setelah hasil Musren ditandatangan kita tinggal ketik saja di komputer, setelah diinput keluarnya bentuk PDF. Kalau dulu pas tahun 2015 jadinya (output) masih excel jadi gak bisa direvisi. Kalau sekarang kalau ada salah kalimat gitu kalau udah kesave ya nggak bisa diubah, jadi malu sama teman-teman, hehehe. Ya memudahkan juga..." (Syamsul, Operator Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, April 2017)*

> *"Saya kalau mencentang usulan (hasil musren kelurahan) sama ketua forum LPM dan lain-lain yang masuk ke dalam tim perumus di tingkat kecamatan itu. Lebih mudah sih inputnya karena kita tinggal ikuti saja harus isi apa di mana." (Urwah, Operator Kecamatan Panakukkang, April 2017)*

Kedua ujaran itu menggambarkan sistem antar-muka pengguna dalam SIPPD yang mudah diakses untuk memasukkan dan memperbaharui data. Proses "mencentang" usulan yang menjadi prioritas di tiap-tiap kelurahan dilakukan oleh operator dan didampingi oleh Tim Perumus Musrenbang Kecamatan. Operator juga telah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengoperasionalkan aplikasi SIPPD. Hal itu juga diamini oleh Putu, desainer program SIPPD yang telah melakukan kajian sebelum mengembangkan SIPPD dan memberikan pelatihan intensif kepada operator-operator. Meskipun demikian, Ibu Asma dari Kecamatan Panakukkang mengaku bahwa kinerja operator kelurahan tidak semuanya baik dan tepat waktu dalam melakukan pemasukan hasil musrenbang sehingga memengaruhi kesiapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang membutuhkan kompilasi data dari hasil musrenbang di beberapa kelurahan.

Selain SIPPD adapula pengembangan sistem pemutakhiran data kemiskinan secara mandiri melalui e-Kemiskinan yang merupakan program kolaborasi antara beberapa SKPD yang tergabung dalam TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) seperti Dinas Sosial dan BAPPEDA beserta KuPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil) sebagai pengembang. Pak Amri menyebutkan inovasi pendataan warga miskin secara mandiri untuk memperoleh berbagai layanan dan bantuan sosial. Layanan e-Kemiskinan itu memungkinkan warga secara mandiri mendaftarkan diri sebagai keluarga miskin tanpa harus melalui RT/RW sehingga meminimalisasi subjektivitas Ketua RT/RW. Aplikasi e-Kemiskinan ini akan menjadi sumber informasi terpadu mengenai keluarga miskin yang terklasifikasi dan temutakhirkan secara berkala setiap enam bulan. Pak Amri berpendapat *"Karena Makassar sangat dinamis perkembangan warganya, mungkin karena ada yang sudah meninggal, ada yang pindah, ada yang tidak perlu dibantu."* Hal itu menjadi alasan pentingnya memutakhirkan data keluarga miskin secara berkala sehingga program bantuan dapat tepat sasaran. Selain e-Kemiskinan.

Ada beberapa inovasi pelayanan publik lain yang memudahkan warga untuk mengaksesnya antara lain penerapan "Call Center 112" sebagai pusat komunikasi pelayanan secara umum baik pengaduan hingga permintaan pelayanan lain seperti kesehatan. Adapula program "Otto Dottoro'ta" (Mobil Dokter) sebagai bentuk layanan *Home Care* dengan menyediakan dokter pribadi yang menjemput pasien secara langsung. Ada pula program "Shelter Warga" merupakan hasil kerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), dan beberapa CSO. Posisi Shelter Warga yang memanfaatkan rumah tinggal warga menjadikan program ini begitu terbuka dan menjadikan warga sebagai agen pertama yang berpartisipasi langsung dalam program pengamanan dan konsultasi tersebut. Keberhasilan lain yang dicapai oleh

Dinas PPPA yang bekerjasama dengan beberapa CSO terkait antara lain terkait OGP menginisiasi Musrenbang Tematik Anak "Tudang Sipulung" se-Kota Makassar sejak 2016. Inisiasi itu dlakukan dengan melibatkan anak-anak usia di bawah 18 tahun untuk menjadi panitia pelaksana hingga fasilitator. Melalui Musrenbang Anak, pemerintah diminta untuk terbuka pada masukan-masukan yang datang dari anak-anak Kota Makassar.

Melalui pengamatan langsung di lapangan, tergambar adanya suatu standar pelayanan publik dalam kantor kelurahan maupun kecamatan di Kota Makassar (lihat Gambar 2). Selain itu, salah satu perubahan yang dilakukan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto adalah menurunkan SKPD satu tingkat yaitu di tingkat Kecamatan guna memperingkas alur birokrasi dan membagi operasionalisasi program agar lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, juga banyak program yang dibebankan untuk dikerjakan oleh pemerintah di tingkat Kelurahan dengan batas anggaran mencapai 1—2 Miliar rupiah per tahun. Beberapa program yang dibebankan untuk dikelola oleh kelurahan antara lain penyuluhan terkait sanitasi dan Badan Usaha Lorong (BULO) dengan Pemerintah Kecamatan sebagai pengawasnya.

Gambar 8 Suasana Kantor Kecamatan dan Kelurahan Panakukkang

Sumber: dokumentasi peneliti

Di sisi lain, pengubahan Kecamatan sebagai SKPD juga bertujuan agar program dapat dilaksanakan lebih cepat dan defektif menyentuh satuan terkecil dari lingkungan masyarakat yaitu "lorong". Pembangunan dengan pendekatan "lorong" memang menjadi ciri khas dari walikota terpilih yang juga merupakan "Anak Lorong" sehingga banyak program yang berbasis lorong seperti BULO, LONGGAR (*Lorong Garden*), Lorong KB, dan lain-lain. Namun, tidak semua program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan. Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, Partono memberikan contoh program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam ujarannya sebagai berikut:

> *"... Kemarin saja Pak Camat diturunkan program ke dia tidak mampu untuk tangani, contoh tiap lorong ada lampu singara, lampu kuning, itu program di kecamatan, pak camat menyerah tidak berani, kenapa? Deadline waktu dan tidak punya tim teknis untuk kerja soal itu (selain PU) padahal ini untuk masyarakat nantinya, masyarakat yang kerjakan, ketiga dia takut dengan KPK, dsb takut bertanggungjawab. Oleh karena itu tidak jalan program lampu singara itu. Itukan maksudnya pak wali agar masyarakat yang mengerjakan lewat kecamatan, nah kecamatan*

lebih tau ini ada tukang ada pemikir supaya pemberdayaanlah, supaya tepat guna dll...” (Partono, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, 1 April 2017)

Kisah di atas menggambarkan adanya perbedaan persepsi antara Walikota dan pemerintah di tingkat Kecamatan. Selain itu, perubahan nomenklatur Pemerintah Kecamatan menjadi SKPD juga memerlukan waktu untuk beradaptasi terkait cara dan budaya kerja SKPD sehingga siap menjalankan program yang diberikan oleh Pimpinan Pemkot Makassar.

Gambar 9 Program Pemberdayaan Partisipatif Berbasis “Lorong Warga” (Kiri ke kanan: Lorong Garden (LONGGAR) dan Badan Usaha Lorong (BULO)

Sumber : dokumentasi peneliti

Merintis Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kota Makassar yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Salah satu bukti dari implementasi *Open Governement* adalah penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Makassar sejak tahun 2016 sudah mengelola akuntansi keuangan secara *online* yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA). Setidaknya ada tiga fungsi dari SIMAKDA yaitu perencanaan, pentausahaan, dan pelaporan yang meliputi seluruh SKPD di Pemkot Makassar. Sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Murfa Surya Mahardika (Jakarta) itu memungkinkan tiap-tiap SKPD untuk melakukan pemutakhiran laporan keuangan yang berbasis akrual . Setiap tanggal 10 bulan baru, setiap bendahara SKPD wajib mengirimkan progres akuntansi keuangan bulan sebelumnya secara *online* baik laporan pendapatan bagi dinas yang memiliki pemasukan maupun laporan pertanggungjawaban belanja. Setelah mengunggah laporan bulanan, bendahara menyerahkan salinan laporan yang telah ditandatangani oleh pimpinan SKPD ke BPKAD. Proses merintis sistem informasi *online* ini tidak mudah dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD sebagai berikut:

> *"Kami memulai online tidak gampang, namanya peralihan belum tentu mulus. Banyak tantangan, ini rupanya belum pas nih, itu butuh proses. Kalau namanya sistem, kalau memang kita belum gunakan kelemahannya di mana. tapi saya tidak dari bahasa pemrogramanannya. Sebenarnya kita mulai online dari 2015, tetapi full online dari 2016. tahun 2015, kita menggunakan online dan offline. Ketika sudah anggap tangguh sistemnya, kita gunakan full online." (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, April 2017)*

Melakukan *trial and error* untuk menemukan sebuah sistem informasi keuangan yang baik dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu yang tidak satu tahun. Pada periode itu, BPKAD dan seluruh bendahara SKPD bekerja lebih berat karena menggunakan dua sistem yaitu sistem berbasis akrual sebagai ujicoba *online* dan sistem akuntansi keuangan biasa yang *offline* sebagai sistem informasi keuagan lama yang tetap digunakan selama periode pemantapan SIMAKDA. Pada saat SIMAKDA telah siap dan mulai digunakan, tidak sedikit bendahara SKPD maupun staf BPKAD yang mengalami *application shock* karena sangat berbeda dengan sistem informasi keuangan sebelumnya.

Beberapa manfaat yang dihasilkan dari penggunaan SIMAKDA yaitu mencegah risiko kehilangan data keuangan dalam sistem penyimpanan data *offline* berbasis computer. Selain itu proses mengirim pelaporan progress akuntansi keuangan yang langsung dan termutakhirkan dari hari ke hari menjadi lebih efektif dan aman. Saat masih *offline*, data yang tersimpan di *flashdisk* menjadi data keuangan cadangan yang harus dilampirkan saat menyerahkan laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD terkait. "*Dulu sistemnya export import, manual bangetlah, tidak efektif…"* begitulah ungkapan Kabid Penatausahaan Akuntansi menggambarkan kondisi pengumpulan data cadangan keuangan sebelum mengunakan SIMAKDA. Pejabat BPKAD maupun bendahara SKPD-SKPD juga dapat dengan mudah mengakses SIMAKDA untuk memantau dan mengubah laporan keuangan di mana saja melalui sambungan internet.

"Jadi, sistem ini pun sudah punya SOP backup data. Backup data itu penting. Atau misalnya in case ada masalah atau gangguan pada server. Semua orang aksesnya lempar ke server. itu di ruangan Hak Helmi, bagian anggaran. Pergerakan data yang diinput terekam dengan baik. kelihatan pemasukan dan pengeluaran per-hari. Tetapi untuk pelaporan sekali sebulan, yaitu setiap tanggl 10 bulan berikutnya dilaporkan. Pengeluaran hari ini

harus diinput juga hari ini, aturannya seperti itu." (Kabid Penatausahaan Akuntansi, BPKAD, Kota Makassar, 4 April 2017)

Ujaran di atas menunjukkan mekanisme penatausahaan keuangan dari hari ke hari antara BPKAD dan SKPD-SKPD. Keberadaan teknologi informasi memudahkan SKPD untuk memutakhirkan progress keuangan mereka secara langsung di hari itu melalui sistem akrual. Kepala Bagian Pelaporan BPKAD yang sebelumnya menduduki Kepala Bidang Penatausahaan mengatakan bahwa pada tahap awal pergantian antara pelaporan berbasis *offline* menuju ke *online* dan akrual tidak begitu saja mendapat respon yang baik dari bendahara-bendahara SKPD. Mengubah kebiasaan ke pemutakhiran progress keuangan harus dilaksanakan di hari yang sama saat transaksi keuangan terjadi dan tidak dapat ditunda merupakan hal yang tidak mudah. Dari waktu ke waktu akhirnya masing-masing bendahara terbiasa melakukan itu dan merasakan manfaat dari kemudahan akses dalam SIMAKDA.

Gambar 10 Tampilan Website BPKAD dengan Laporan Keuangan dan Aset

Sumber: http://makassarkota.go.id/58-badan-badan-pengelola-keuangan-dan-aset.html

Dari segi transparansi, BPKAD mengunggah ringkasan Laporan Perencanaan Anggaran hingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah teraudit dan dapat diunduh dalam website pemerintah Kota

Makassar (lihat gambar 4). BPKAD memiliki peran sentral dalam proses pembangunan di Pemkot Makassar, Erwin, Kepala BPKAD mengatakan bahwa akuntabilitas dari kinerja Pemkot Makassar berada di dalam SKPD yang dipimpinnya itu. Ia mengatakan kerjasama dan keterhubungan data antara BPKAD dan SKPD-SKPD lain terutama BAPPEDA sangatlah penting. Meskipun demikian, keterhubungan data itu masih berjalan secara *offline* karena adanya perbedaan sistem elektronik dan batasan wewenang serta regulasi. Menurut Erwin, kondisi ideal dari integrasi data seharusnya menjadikan SIMAKDA dan BPKAD sebagai sentralnya karena semua proses pembangunan akan kembali pada penganggaran baik di tahap perencanaan, pengadaan jasa maupun barang, pengawasan, dan pelaporan. Diperlukan upaya dan waktu untuk melakukan integrasi antara sistem-sistem elektronik yang telah dibangun antara SKPD-SKPD yang bertanggungjawab dalam siklus proses pembangunan.

Pengawasan Kualitas Kinerja SKPD Berbasis Swafoto melalui Pemanfaatan Media Sosial

Dinamika pelaksanaan OGP berjalan seiring dengan implementasi pegawai pemerintah berbasis ASN atau Aparatur Sipil Negara terutama di bidang pengawasan kinerja berbasis bukti. Selama proses pengambilan data di lapangan, banyak dari pejabat yang mengungkapkan bahwa mereka memiliki kebiasaan baru yaitu melakukan foto maupun swafoto saat berkegiatan sebagai bukti dari aktivitas mereka sehari-hari. Hasil foto itu kemudian diunggah ke dalam grup Whatsapp yang beranggotakan rekan-rekan seprofesi dan juga atasan tempat mereka bernaung. Bahkan dalam satu aplikasi itu, satu pejabat dapat memiliki lebih dari tiga grup untuk menjalin komunikasi dengan banyak jejaring baik vertikal maupun horizontal. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Panakukkang, Ibu Asma Hamra mengatakan bahwa sejak dua

tahun terakhir (2016—2017) pelayanan publik harus punya laporan digital melalui beberapa media seperti *Whatsapp*, *Line*, maupun *Facebook*. Ia juga berujar *"… Melaporkan hasil kerja ke atasan itu wajib, harus publikasi ke atasan apalagi untuk kegiatan yang tidak di kantor."* Selain memberikan laporan kerja, Asma juga memiliki kewajiban untuk mengontrol satuan kerja di bawahnya untuk mengetahui hasil kerja mereka.

Melalui media seperti *Whatsapp* dan *Line*, pengawasan kerja pejabat pemerintah dapt berjalan secara sistematis dan termutakhirkan dari waktu ke waktu. Budaya melapor secara langsung melalui media itu memang menjadi inovasi dari pimpinan Pemkot Makassar untuk mengontrol kinerja pegawainya. Meskipun demikian, banyak juga yang menggunakan media-media grup itu untuk menyebarkan konten-konten yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti konten yang berhubungan dengan isu politik tertentu. Untuk mencegah hal itu, beberapa grup *Whatsapp* maupun *Line* memilih untuk membentuk suatu "kode etik" agar anggota tidak membagikan konten yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Selain pengawasan berbasis pemutakhiran laporan melalui media daring, adapula mekanisme pengawasan melalui kelompok masyarakat yang tergabung dalam auditor sosial. Keberlanjutan dari program auditor sosial yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan YKPM ini memungkinkan bagi masyarakat untuk memberikan laporan dan keluhan terkait program yang sedang maupun yang sudah berjalan dalam arena dialog publik bersama pemerintah. Arena dialog publik yang bertajuk FGD Program Auditor Sosial dilaksanakan selama beebrapa hari dan dihadiri oleh auditor sosial dan beberapa SKPD pemerintah. Diskusi yang berjalan juga sangat dinamis dengan beberapa kali terjadi perdebatan hangat antara unsur masyarakat dan unsur pemerintah yang hadir. Pada kesempatan menghadiri FGD Auditor Sosial pada akhir Maret 2017 terdapat dua narasumber yang memberikan penyuluhan atau sosialisasi yaitu BPJS dan

Komisi Informasi Publik (KIP). Banyak keluhan yang keluar dari unsur masyarakat terutama terkait ketersediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit bagi pengguna kartu BPJS. Selain keluhan ke narasumber, banyak pula keluhan yang ditujukan untuk SKPD lain seperti Dinas Pendidikan terkait pungutan liar di sekolah hingga Dinas Sosial terkait bantuan untuk keluarga miskin.

Selain itu adapula mekanisme pengawasan yang telah dibangun oleh SKPD terkait seperti yang dilakukan oleh SKPD PU. Menurut beberapa narasumber yang ditemui, banyak mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap proyek fisik seperti petugas pengawas PU yang hadir ke tiap-tiap kelurahan menanyakan kemajuan proyek fisik di wilayahnya dan melalui keberadaan papan informasi proyek fisik yang memaparkan keterangan logistik dan jadwal proyek yang sedang berjalan sehingga dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat umum.

> *"Iya ini sudah bagus, kalau dulu 2000—2010 kita gak ketahui mana yang dikerjakan, kalau sekarang ketahuan mana yang dikerjakan, bahkan orang PU datang ke sini melapor sebelum kerja, dulu tidak, orang (PU) masuk aja langsung kerja. Kontraktor juga kerja tidak macam-macam, kalau macem-macem ya tidak dipakai lagi, banyak pengembang yang kemarin kena penalti karena itu."(Muklis, Operator Kelurahan Mangasa, April 2017)*

Ujaran di atas menggambarkan hasil dari pengawasan yang secara partisipatif. Lebih dari itu, jika terdapat sisa nilai kontrak (biaya) setelah target proyek fisik tertentu selesai dikerjakan, maka proyek akan dilanjutkan hingga sesuai nilai kontrak yang dibayarkan oleh pemerintah. Adanya mekanisme hukuman berupa penalti bagi para pengembang yang tidak mengerjakan proyek sesuai dengan nilai kontrak dan pengawasan yang melibatkan warga melalui pemasangan papan informasi menjadi cara jitu dari Dinas PU untuk menertibkan tatausaha proyek infrastruktur.

Mengawal Usulan Warga hingga Balaikota: Perjalanan Aktor-aktor di Balik Pelaksanaan Musrenbang.

> *...misal kemarin kita programkan di tahun 2015 kemudian harus dilaksanakan di 2016, tetapi tidak dilaksanakan, kita bawa lagi di tahun 2017. Ketika kita bawa 2017 ternyata dianulir 'eh gak boleh kamu ambil ini jadi usulan karena ini akan dikerjakan tahun ini' karena udah jadi program dinas terkait."*

Ada banyak kejadian seperti di atas dalam perjalanan karir Partono sebagai pejabat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga yang menjadi sebuah badan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Ia dan rekan-rekannya sesama LPM yang berada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, bertugas mengumpulkan, menyaring, merumuskan dan mengawal usulan masyarakat dalam proses musrenbang. Menurut Partono, tidak mudah menjadi wakil masyarakat yang mengawal usulan dan ikut bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada warga terkait usulan baik yang terakomodasi maupun tidak. Beberapa usulan prioritas warga yang tidak diakomodir kembali dengan alasan telah menjadi program SKPD terkait. Kurangnya sosialisasi terkait program pemerintah oleh perwakilan SKPD terkait yang tidak membawa bahan sosialisasi dalam Musrenbang menjadi alasan terjadinya tumpang tindih antara usulan dan program. Hal itu merugikan warga karena seharusnya slot untuk usulan yang sudah terlanjur masuk program dapat dialihkan ke usulan lain.

> *"... harusnya di tingkat musrenbang ada yang jadi narasumber atau pendamping biasanya dari PU, BAPPEDA, Dinsos, dinas terkaitlah yang biasa datang. Ketika mereka turun harus bawa bahan, ini yang*

akan kita programkan tahun ini, itu yang mereka (sering) tidak bawa, harusnya dengan DPR juga untuk mengawal. Nah biasanya baru ditingkat kecamatan itu (baru) aktif dalam program prioritas. Mereka nggak bawa bahan, ada juga yang bawa dan (ada usulan) sama dengan program (SKPD) yang kita usulkan terpaksa kita coret artinya nggak jadi prioritas lagi, ya repotnya kayak tadi gak bawa bahan program tahun ini... artinya betul dilaksanakan tapi hilang prioritas kita untuk tahun depan, momentum kita hilang (slot prioritas tahun depan sudah dikerjakan tahun ini dan hangus). Ya coba cari deh 5 prioritas untuk tahun depan kalau sudah kita siapkan 5 mereka tidak bawa bahan padahal ada prioritas yang masuk maka hilang satu momentum usulan prioritas yang seharusnya bisa dipakai untuk usulan yang lain." (Partono, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, 30 Maret 2017)

Ujaran di atas menunjukkan belum baiknya komunikasi program dari tingkat atas yaitu pemerintah yang diwakili oleh tiap-tiap SKPDnya ke masyarakat kepada masyarakat di tingkat bawah. Tumpang tindihnya progam SKPD dan usulan warga itu merugikan masyarakat karena pada dasarnya masih banyak usulan lain yang dapat masuk ke rencana kerja pemerintah tahun berikutnya. Di sisi lain, proses mengumpulkan dan merumuskan usulan menurut skala prioritas berlangsung sangat panjang dan tidak mudah dilakukan dalam beberapa tingkatan Musrenbang.

Mengumpulkan dan memverifikasi usulan-usulan warga sejak dalam "Rembug Warga" atau "Pra-Musrenbang" lalu mengawalnya hingga Musrenbang tingkat Kota itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pada tahapan Pra-Musrenbang, penggurus LPM beserta ketua RT/RW harus mencocokkan usulan-usulan warga yang masuk dengan pagu anggaran Untuk menyaring usulan yang kebanyakan berupa fisik/infrastruktur dan tumpang tindih atau sama haruslah dipilih usulan yang lebih prioritas. Arsyam, ketua RT02/RW09 Kelurahan Temalate mengatakan bahwa ia harus melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk membandingkan

keadaan dan kebutuhan masing-masing wilayah RT/RW terkait fisik misal drainase, jalan, dan lorong. Hasil peninjauan itu lalu dibahas bersama pengurus LPM, ketua RT/RW, dan perwakilan warga dari RT/RW yang terkait untuk menentukan wilayah RT/RW mana yang usulan fisiknya dimasukkan sebagai usulan yang mewakili RT/RW di wilayah itu untuk maju ke Musrenbang Kelurahan. Proses 'memanen' usulan warga yang tidak singkat itu juga terjadi di dalam proses Musrenbang berikutnya sehingga dapat dibayangkan betapa berharganya usulan warga yang benar-benar telah dirumuskan sebagai prioritas, dan betapa sayangnysa saat "slot" untuk usulan prioritas itu kemudian 'menguap' karena telah menjadi program SKPD terkait.

Selain itu, beberapa pejabat publik di tingkat kelurahan maupun kecamatan mengatakan bahwa usulan warga tetap memerlukan pengawalan dari anggota dewan agar dapat terakomodir. Seperti misalnya Ibu Amri Hamzah, pejabat di Kecamatan Panakukkang yang menyatakan ada 73 dari 100 usulan yang diterima sebagai program tahun 2018. Namun ia kemudian berujar *"Itu juga kalau tidak dikawal dewan bisa melenceng…"* yang menunjukkan ketidakpastian realisasi program dari usulan yang terakomodir di kemudian hari. Begitu pula dengan Pak Syamsu dari Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, yang berujar *"… ada sekitar 40% sampai 50% dari semua usulan yang masuk jadi program, itupun anggota dewan yang bantu…"* Ujaran tersebut menggambarkan kepercayaan pemerintah lokal terhadap kinerja anggota dewan untuk memastikan dan mengawal usulan yang berangkat dari masyarakat di lingkup kelurahan agar terealisasi menjadi program. Hal yang sama juga dikatakan oleh Partono terkait peran DPR dalam mengawal usulan warga melalui mekanisme reses.

> *"Listrik ini (di lorong) misalnya sudah diusulkan 2 sampai 3 tahun lalu tapi masih gelap-gelap saja nih, yang begini biasanya jadi bahan resesnya temen-temen DPR nih, ini jadi pola pendampingan untuk*

proker, tetapi juga ada reses tiap 3 bulan kalau nggak salah, itulah cara lain untuk mengawal." (Partono, Maret 2017)

Mengimplementasikan perencanaan program yang benar-benar berangkat dari usulan warga di Kota Makassar tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk dapat mengakses kebijakan pemerintah untuk menampung usulan warga dan merealisasikannya menjadi program. Adapun Pemkot Makassar juga memiliki kerangka kebijakan pembangunan sendiri yang telah tersusun secara sistematis sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara mereka dan masyarakat agar program dapat menyentuh akar rumput dan tepat sasaran.

Mengakses Musrenbang : Kisah-kisah Partisipasi Kaum Marjinal dalam Proses Pembangunan di Kota Makassar.

Abstrak

Kolaborasi CSO dengan pemerintah daerah Kota Makassar terlihat dari berbagai kerjasama positif antara lain dalam bentuk advokasi, inisiasi program, diskusi pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan di Kota Makassar, pengarusutamaan isu gender, anak dan disabilitas juga menjadi hal yang menjadi perhatian. Hal ini ditandai dengan dilibatkannya perempuan,anak dan disabilitas dalam musrenbang, pembentukkan berbagai forum dan memasukkan usulan dalam kerangka kebijakan. Namun pelibatan penyandang disabilitas dirasa masih belum maksimal, penyandang disabilitas masih sebatas sebagai objek bukan subjek pembangunan. Pembangunan inklusif berperspektif penyandang disabilitas dapat tercipta dan tepat sasaran jika mereka dilibatkan secara aktif.

Prolog

"Di sini saya lihat memang sangat kurang orang-orang yang peduli dengan masalah-masalah seperti KDRT, perdagangan anak, dan hamil di luar nikah, mereka memilih berdiam diri dan membiarkan itu terjadi di sana-sini. Tetapi bagi saya dengan bertempat tinggal di tempat ini tentu saya berpikir jika membiarkan hal itu terjadi, anak-anak saya

tidak aman. Itu menjadi alasan terbesar saya untuk mulai bergerak mengubah lingkungan." (Sumarni, Maret 2017)

Itulah potret beberapa persoalan sosial di Kota Makassar yang menjadi alasan bagi perempuan seperti Sumarni untuk mulai bergerak melakukan perubahan. Baginya, beragam persoalan sosial seperti perdagangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kenakalan pemuda muncul oleh sebab kondisi kemiskinan, taraf pendidikan yang rendah, serta kekurangpedulian antar-sesama yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Dirinya juga prihatin melihat persoalan ekonomi yang dihadapi oleh tetangganya yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh dan tukang cuci. Tidak sedikit pula dari mereka yang merupakan janda-janda tua yang sudah tidak dapat lagi bekerja, yang bahkan kesulitan untuk sekedar membeli beras bersubsidi/raskin. Tidak tahan untuk melihat berbagai persoalan itu berlarut, Sumarni mulai membuka diri untuk memberikan pertolongan baik berupa materi maupun moril semampunya. Beberapa tetangga yang datang meminta pinjaman untuk sekedar membeli raskin hingga untuk membayar SPP, ibu RT di Kelurahan Tamamung itu dengan ringan tangan ikut membantu. Dari waktu ke waktu, Sumarni semakin dikenal sebagai tokoh perempuan dan diajak untuk ikut aktif di beberapa CSO seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP), dan lain-lain. Keaktifannya di CSO itu juga membuka kesempatan baginya untuk memperkaya diri dengan melalui pelatihan-pelathan terkait berbagai pengetahuan terutama tentang pembangunan dan keterampilan seperti berbicara di publik, menelaah dokumen, dan melakukan audit lapangan.

Gambar 11 Peneliti bersama Ibu Sumarni, Srikandi dari Kelurahan Panakukkang, Kota Makassar

Sumber: dokumentasi peneliti

Melalui pelatihan-pelatihan itu, Sumarni dan banyak perempuan lain yang telah diperkaya ini kemudian aktif sebagai Auditor Sosial. Program yang dirintis oleh YKPM (Yayasan Koalisi Pemberdayaan Masyarakat) sejak tahun 2011 itu membuka kesempatan bagi banyak perempuan seperti Sumarni untuk ikut berperan dalam pengawasan pembangunan dan program pemerintah terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka beserta keluarganya seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, dan lain-lain. Kerentanan dalam memperoleh rasa aman serta peran penting sebagai pengelola aspek kehidupan keluarga menjadi alasan utama mereka muncul sebagai agen yang harus berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perempuan juga yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah dan lebih menyoal hal yang mendasar dari berbagai dampak itu. Berikut salah satu contoh kisah hasil audit yang dikerjakan oleh Sumarni dan rekan-rekan sesama Auditor Sosial antara lain evaluasi program pemberdayaan melalui pelatihan kursus pejahit di tahun 2012 yang tidak tepat sasaran:

"Ketidakpuasan itu juga saya rasakan pas saya menjadi Auditor Sosial kan kami lihat bahwa dari data yang kami dapatkan dari SKPD bahwa yang ikut dalam kegiatan kursus menjahit tersebut bukan orang-orang yang berhak dapat layanan ini karena indikatornya hanya SKTM saja syaratnya. Dari pihak kelurahan memberikan SKTM tidak melihat verifikasi data apakah ini memang layak saya berikan, karena sudah ada hubungan emosional dengan tim posyandu jadi enggak segan-segan ngasih SKTM itu. Itu yang terjadi sehingga program tidak tepat sasaran. Yang kedua kami melihat di pelatihan itu ada mesin jahit bagi peserta pelatihan, setelah kita audit dengan penerima bantuan, mereka tidak terima ..." (Sumarni, Maret 2017)

Gambar 12 Dominasi Perempuan sebagai Auditor Sosial Kota Makassar

Sumber: dokumentasi peneliti

Sumarni bersama rekan-rekannya kemudian menemukan bahwa mesin jahit yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan/peserta kursus malah diletakkan di Kantor Kecamatan sehingga tidak dapat dipakai dengan bebas. Sumarni melaporkan itu kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai pengelola program dan ditindaklanjuti dengan dikirimnya mesin jahit ke tiap-tiap penerima bantuan. Setelah ada

perubahan dari BPM untuk membuat program pemberdayaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan, Auditor Sosial memfokuskan perhatian mereka ke dalam isu pendidikan dan kesehatan seperti masalah pungutan liar di sekolah, keterbatasan akses warga pemegang kartu BPJS untuk memperoleh layanan rawat inap, dan lain-lain

Secara institusional, beberapa CSO berbasis perempuan di Makassar sudah secara terpadu maupun individu bergerak untuk menjawab tantangan perempuan terutama dalam penyediaan akses pengamanan untuk perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kriminal. Gerakan melalui CSO itu juga sering bersentuhan dengan beberapa dinas di Pemkot Makassar sehingga melahirkan kolaborasi positif dalam bentuk advokasi, inisiasi program, diskusi masalah, dan lain-lain. Hal itu kemudian secara perlahan menyumbang kepada pengarusutamaan isu gender dalam skema berpikir birokrasi. Selain itu banyak tokoh perempuan yang menduduki jabatan penting di lingkup Pemkot Makassar dan menunjukkan kinerja yang baik menjadi faktor pendukung proses internalisasi pemerintahan yang berperspektif gender.

Salah satu keluaran penting dalam pelibatan perempuan dan kaum marginal lain dalam perencanaan pembangunan adalah diberinya porsi bagi perempuan, lansia, dan pemuda dalam komposisi partisipan musrenbang. *"Misal dari Musrenbang Kelurahan, perempuan sudah hadir 12 dari 30 orang yang hadir di sana,"* adalah ungkapan Sumarni yang menggambarkan besarnya kuantitas kehadiran perempuan dalam forum musrenbang. Namun, tidak semua perempuan yang hadir dalam musrenbang berani untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang diungkap Sumiarni *"… misalnya yang hadir 30, tapi yang bersuara hanya satu orang, dua orang…"* yang menunjukkan keaktifan dari peserta perempuan tersebut. Perasaan "sungkan" dan malu karena merasa tidak memiliki kapasitas dan pengalaman untuk berbicara di depan publik masih menjadi hambatan

budaya untuk memaksimalkan suara perempuan di forum Musrenbang. Selain itu, Sumarni juga melihat masih adanya keraguan dari pejabat pemerintah yang didominasi oleh laki-laki terhadap pengetahuan perempuan terkait pembangunan saat berada di forum tersebut juga membatasi kesempatan perempuan untuk bersuara. Hal itu sebagaimana ungkapan Sumarni sebagai berikut:

Kalau untuk penghambatnya ya pengetahuan terus yang kedua mungkin tidak diberi ruang, padahal sudah ada. Istilahnya dia acungkan jempol tapi tidak diberi kesempatan. Sekarang ini gini yang lalu-lalu itu mereka mau ngomong tapi pengetahuannya itu membuat dia nggak berani angkat tangan. Nah kalau sekarang perempuan dibatasi untuk ngomong, boleh sih ngomong tapi ya misal 5 orang laki-laki boleh ngomong perempuan cuma 2 orang dengan alasan waktulah. Padahal di lingkungan saya ini kalau ada persoalan-persoalan itu pasti datangnya ke saya dulu. (Sumarni, Maret 2017)

Fenomena diskriminasi gender itu juga diamini oleh Bu Tenri, Kepala Dinas PPPA yang membangun karir melalui keaktifannya di berbagai CSO perempuan. Ia juga menyatakan bahwa proses pengarusutamaan gender di lingkungan Pemkot Makassar masih panjang sehingga memengaruhi kesiapan para pejabat untuk dapat menerima pendapat dari kalangan perempuan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan untuk dapat memahami pelaksanaan pembangunan sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam diskusi-diskusi publik.

Keaktifan para perempuan melalui organisasi kemasyarakatan maupun komunitas auditor sosial memberikan banyak manfaat dengan diperolehnya akses untuk memperoleh keamanan bagi perempuan dan anak melalui Rumah Para-legal yang diinisiasi LBH APIK. Sumarni dan rekan-rekannya kemudian membawa kebutuhan akan dana dan fasilitas

“tempat yang aman” bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan ke dalam diskusi publik auditor sosial. Gayung pun bersambut dengan dibentuknya Shelter Warga yang merupakan program kolaborasi antara warga dan beberapa SKPD seperti Dinas PPPA dan Dinas Sosial. Kedua program tersebut memanfaatkan rumah warga sebagai tempat bernaung yang menyediakan fasilitas keamanan, konsultasi, dan pendukung lain untuk menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Tokoh seperti Sumarni itulah yang juga menjadi aktor pertama yang menanggulangi kasus-kasus yang ditemuinya sehari-hari sebelum ada petugas lain yang akan datang jika dibutuhan.

Lebih dari itu, keberadaan perempuan sebagai auditor sosial dapat menjadi agen lapangan yang mengawasi berjalannya program dan peran pemerintah di berbagai sisi kehidupan guna mewujudkan pemeritahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Secara berkala, para perempuan itu mengaudit kasus-kasus penyelewengan seperti pungli dan pengaduan program yang kurang tepat sasaran. Dengan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pegawasan pembangunan, pemerintah membuka mata mereka untuk lebih memahami prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pembelajaran demokrasi yang kemudian membentuk kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam sesuai perannya.

> *“Iya, mereka yang selama ini jenuh usulan tidak terealisasi jadi mengerti kita ada skala prioritas, pasti yang lebih parah yang didahulukan, jadi mereka butuh dibuka pikirannya inilah yang menjadi kendala kenapa usulan-usulan itu tidak serta-merta menjadi program terealisasi, ada proses. Ketidaktahuan itulah yang bikin mereka apatis, saat sudah tau disampaikan barulah mereka sadar, ohh ternyata begini.” (Sumarni, Maret 2017)*

Berdiskusi Bersama dalam *"Tudang Sipulung"*: Arena Belajar Berdemokrasi dan Merencanakan Pembangunan bagi Anak-anak Kota Makassar

Usaha untuk melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar mengalami perkembangan signifikan sejak tahun 2016 dengan dilaksanakannya kegiatan "*Tudang Sipulung* Anak Kota Makassar" (TSAKM) atau dengan kata lain adalah "Duduk Bersama Anak Kota Makassar" yang dapat juga dikatakan sebagai Musrenbang Anak Kota Makassar untuk pertama kalinya. Kegiatan itu merupakan inisiatif dari Dinas PPPA Kota Makassar yang didukung penuh oleh Walikota Makassar dan diinisiasi oleh Forum Anak Makassar. Forum Anak Makassar (FAM) sendiri merupakan wadah bagi anak-anak (usia 0—18 tahun) di Kota Makassar untuk berekspresi dan berkegiatan secara positif yang terbentuk sejak tahun 2013. FAM sendiri merupakan transformasi dari Dewan Anak Makassar yang berisikan anak-anak dari berbagai kalangan yang memiliki struktur dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Kegiatan TSAKM yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 April 2017, di Hotel Quality, Makassar itu dimulai dengan pengarahan dari Kepala Dinas PPPA Pemkot Makassar lalu dilanjutkan dengan diskusi di dalam grup kecamatan. Mereka saling bertukar pikiran dan pengalaman membahas solusi dan permasalahan seputar dunia anak seperti *bullying*, zona aman sekolah, anak gelandangan, dan lain-lain. Setelah menuliskan masalah dan juga solusi, anak-anak mendokumentasikannya dalam bentuk gambar "kondisi saat ini" dan "kondisi ideal" di tiap-tiap kecamatan dengan kreasinya masing-masing. Kegiatan siang itu berlanjut dengan saling mempresentasikan hasil gambar kepada grup kecamatan lain secara bergantian dan dipilihlah empat grup terbaik yang akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada pejabat. Setelah makan siang, satu per satu perwakilan dari grup terpilih mempresentasikan hasil diskusinya ke pejabat pemerintah yang mewakili

Walikota Makassar dan dilanjutkan pemberian tanggapan. Acara kemudian ditutup dengan pelantikan pengurus FAM tingkat kecamatan.

Salah satu presentator, seroang anak perempuan yang berasal dari Kecamatan Tallo mengeluhkan zona aman yang belum maksimal di lingkungan sekolahnya. Masih banyak kendaraan yang tidak memerdulikan keberadaan zona aman tersebut sehingga kerap membahayakan anak-anak yang ingin menyebrang jalan. Hal itu kemudian direspon secara normative oleh pejabat yang hadir dengan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dibicarakan antara orang tua murid dan kepala sekolah. Dalam menanggapi para presentatorpun, pejabat menggunakan pendekatan birokratis ketimbang menggunakan pendekatan persuasive mengingat subjek dari presentasi itu adalah anak-anak. Padahal tujuan dari kegiatan TSAKM itu sendiri menurut Ketua FAM 2017 adalah untuk menangkap aspirasi dari sudut padang anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah.

> *"... ada 31 hak anak berdasarkan undang-undang agar terpenuhi, tapi akan berbeda kalau orang tua yang menuhi hak anak menurut pengertian mereka dengan jika anak-anak yang mengutarakan hak-hak tersebut. Nah makanya dalam forum anak ini mau diberitahu yang seperti ini lho yang dibutuhkan anak, yang seperti ini lho aspirasi anak, dan ini yang harus dipenuhi pemerintah." (Ketua Forum Anak Makassar [17 th], April 2017)*

Gambar 13 Kegiatan "Tudang Sipulung (Musrenbang) Anak Kota Makassar"

Sumber: dokumentasi peneliti

Melalui kegiatan TSAKM, anak-anak tidak hanya dapat saling mengenal dan berkumpul tetapi juga berlatih mendiskusikan permasalahan serta solusi, mengungkapkan melalui presentasi ke sesamanya dan juga pemerintah, dan berpikir kritis terhadap lingkungan di sekitar dan hak-haknya. Adapun beberapa aspirasi dari anak-anak pada TSAKM 2016 yang teralisasi sebagai program seperti *pedestrian* dengan hiasan bertema anak di sepanjang jalan pantai Losari dan taman tematik sebagai wadah bermain di 8—9 titik di Kota Makassar. Selain itu, pemerintah juga sudah menjadikan anak sebagai "subjek" dari program-program yang menyangkut anak seperti "Puskesmas Ramah Anak" dan "Pelatihan Metode Pembelajaran Usia Anak untuk Kalangan Guru." Beragam program itu merupakan hasil dari pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan yang direspon secara langsung oleh pejabat pemerintah Kota Makassar sehingga tepat sasaran. Namun, untuk hasil dari TSAKM 2017 tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya karena Musrenbang tingkat Kota Makassar telah selesai dilaksanakan.

Menurut salah satu pengurus FAM, pelaksanaan TSAKM sangat berkaitan dengan peran anak yang dijadikan sebagai "pelapor" dan "pelopor" terhadap tindakan kekerasan dan kenakalan anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermain yaitu lorong. Untuk

menjalankan fungsi sebagai pelopor itu, anak harus juga ikut berperan aktif untuk membuat perubahan baik melalui kegiatan langsung maupun dalam diskusi perencanaan pembangunan. Hal itu juga selaras dengan perwujudan Kota Layak Anak yang menjadi program Pemkot Makassar. Adanya perhatian walikota dan pemerintah sebagai aspek pendukung juga disertai dengan tantangan yang dihadapi para anak-anak itu untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam sistem Musrenbang yang berjenjang antara lain: i. Kesiapan dan kapasitas anak untuk menjadi partisipan dalam Musrenbang di tiap tingkatan, ii. Kesiapan peserta forum lain yang lebih tua dan berpengalaman dalam menerima suara anak, iii. Tidak semua usia anak mampu berperan aktif dalam forum diskusi orang-orang usia dewasa, serta iv. Pelaksanaan TSAKM yang belum terintegrasi dalam sistem Musrenbang sehingga tidak memiliki jadwal dan kekuatan yang tetap. Oleh karena itu, Ketua FAM beranggapan perlunya penyiapan anak-anak usia 17—18 tahun dan sudah memiliki KTP melalui pelatihan-pelatihan untuk menjadi perwakilan golongan anak untuk berpartisipasi dan membawa aspirasi anak di sistem musrenbang berjenjang.

Gambar 14 Diskusi bersama Pengurus Forum Anak Makassar 2017 setelah Kegiatan Tudang Sipulung Anak Kota Makassar

Sumber: dokumentasi peneliti

"...kalau menurut saya masih buruk (peran pemerintah), karena menurut undang-undang, fakir miskin dan anak2 terlantar dipelihara oleh Negara tapi ternyata realitanya masih banyak anak2 yang di bawah jembatan, pelelangan ikan, tempat sampah, lampu merah yang tidak dirawat oleh pemerintah. Banyak teman-teman saya di sana." (Rian [15 th], April 2017)

Ujaran di atas menunjukkan kesadaran sosial seorang pengurus FAM bernama Rian (15 tahun) yang terbangun saat aktif dalam Forum Anak Makassar. Ia merasa dengan keikutsertaannya dalam FAM membentuk sisi kritis dan peduli dalam dirinya terkait kondisi sesamanya di lingkungan sekitar. Ia juga memperoleh banyak keterampilan seperti bagaimana mengemukakan pendapat dengan baik ke publik, menyaring informasi, memfasilitasi diskusi, hingga melaksanakan kegiatan. Hal itu juga diamini oleh salah satu alumni yang hadir dan mengawal pelaksanaan TSAKM saat itu bernama Debi. Ia merupakan mantan pengurus FAM 2013 sekaligus mahasiswi di salah satu PTN di Kota Makassar. Gadis 22 tahun itu mengemukakan bahwa keberadaan FAM sangatlah penting dan berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. Pengalaman di FAM membantu ia membentuk kepribadian yang berperspektif pada kaum marginal serta memahami demokrasi.

Menuju Musrenbang Tematik Penyandang Disabiltas: Jalan Panjang Menginklusi Skema Berpikir Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas

Bagi para penyandang disabilitas (PD), keterlibatan aktif mereka dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar masih jauh panggang dari api. Seorang aktivis dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Sulawesi Selatan bernama Mia—yang juga seorang penyandang disabilitas—mengungkapkan selama hidupnya di Kota Makassar pelibatan PD dalam perencanaan pembangunan hanya ia rasakan dalam dua periode kegiatan Musrenbang yaitu: i. Pelibatan sebagai pengamat pada Musrenang tingkat Kota Makassar tahun 2015 dan ii. Pelibatan sebagai peserta Musrenbang Kelurahan Karuwisi hingga Musrenbang Kecamatan Panakukang tahun 2016. Keterlibatan PD dalam dua Musrenbang itupun adalah hasil dari advokasi dari lembaga YKPM (2015) dan HWDI (2016) sehingga bukan merupakan inisiatif dari Pemkot Makassar. Mia mengatakan bahwa dirinya hingga saat penelitian ini dilakukan belum pernah memperoleh undangan resmi dari pemerintah untuk menghadiri Musrenbang di tingkat manapun.

> *"...untuk Kota Makassar saya berani mengklaim bahwa penyandang disabilitas belum pernah dilibatkan secara aktif dalam perencanaan mulai dari level Kelurahan, Kecamatan, masuk ke forum SKPD, dan masuk ke Musrenbang Kota, sama sekali kami tidak dilibatkan. Itu saya mengklaim dan bisa mempertanggungjawabkan itu. (Mia, aktivis penyandang disabilitas, Maret 2017)*

Pada dua kesempatan terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa PD yang ikut telah berani mengutarakan aspirasinya di dalam forum. Namun, kapasitas mereka untuk mengawal usulannya agar terakomodir

masih perlu untuk ditingkatkan. Salah satu hal yang sangat disayangkan dalam dua kegiatan tersebut adalah masih tertutupnya pemerintah lokal untuk menerima usulan peserta dari kalangan PD. Bahkan, masih kurangnya sensitivitas terkait PD dalam forum itu yang dibuktikan dengan adanya bentuk-bentuk diskriminasi selama forum berlangsung. Oleh karena itu, peran untuk membawa dan mempromosikan kebutuhan PD dalam proses perencanaan dan pembangunan masih dipegang oleh organisasi-organisasi seperti HWDI melalui advokasi aktif dalam ruang-ruang diskusi interaktif dengan jajaran pemerintah.

Gambar 15 Mia, Srikandi Penyandang Disabilitas Kota Makassar

Sumber: dokumentasi peneliti

"Kenapa kami selalu menuntut untuk dilibatkan, kelihatannya kami egois tapi memang seperti itu bahwa pengalaman hidup kami menjadikan diri kami paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, harusnya seperti apa, dan pemerintah itu tidak memberikan akses (untuk terlibat dalam proses perencanaan) itu kepada kami sehingga program kegiatan yang diberikan itu hanya sebatas berdasarkan pemahaman pemerintah saja bahwa penyandang disabilitas membutuhkan ini penyandang disabilitas membutuhkan ini dan tidak ada solusi untuk kami..." (Mia,aktivis penyandang disabilitas, Maret 2017)

Ujaran di atas menggambarkan bagaimana dinamika PD dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh akses ke perencanaan pembangunan pemerintah dan signifikansi praktis dari keterlibatan mereka dalam proses tersebut. Hambatan utama PD dalam memperoleh akses itu adalah belum terbentuknya pemahaman pemerintah terkait pembangunan yang menginklusi penyandang disabilitas sebagai salah satu perspektifnya. Masih menurut Mia, pembentukan pemahaman semua pemangku kepentingan tentang keterlibatan aktif dari PD sangatlah mendesak mengingat hal itu telah memiliki kebijakan yang jelas dan kuat yaitu: i. Undang-undang No.19 tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi mengenai PD yang mana salah satunya berisi ayat yang menerangkan bahwa Negara wajib meakukan konsultasi dengan PD baik secara individu maupun organisasi terkait program PD, ii. PERDA Sulawesi Selatan, No. 6, tahun 2013 tentang PD, dan iii. PERWALI Kota Makassar, No. 6, tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No.6 2013.

Mia kemudian memaparkan beberapa hambatan lain yang masih memengganjal PD untuk memperoleh akses kepada perencanaan pembangunan seperti belum adanya data yang akurat dan terklasifikasi dari jumlah penyandang disabilitas yang beragam. Hal itulah yang membuat Mia menjadi pesimis sebagaimana yang diujarkannya *"Bagaimana mau*

mengakomodir suara penyandang disabilitas jika pemerintah belum punya data yang baik..." Selain itu, Mia juga menyadari bahwa penting bagi PD untuk ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang terkait dengan musrenbang. Menurutnya hal itu harus juga disertai dengan membuka kesempatan serta akses bagi PD untuk dapat terlibat dalam Musrenbang secara terus-menerus. Hal itu sangat memengaruhi pembentukan kepercayadirian PD untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan. Namun, masih banyak oknum pejabat yang belum siap menerima partispasi PD dalam musrenbang. Menurut Mia hal itu disebabkan oleh belum terbentuknya skema berpikir pejabat pemerintah yang sensitif terhadap PD. Mereka masih "mengeksklusifkan" pembangungan bagi kelompok PD yang diterjemahkan ke dalam program-program yang bersifat *charity* dengan tanpa mencoba untuk menginklusikan aktor-aktor PD ke dalam sebuah sistem pembangunan yang multisektoral dan terintegrasi.

> *"Saya usul 2 kuota anggaran APBN untuk PD dan yang paling getol adalah musren khusus penyandang disabilitas. Kalau kita ingin bicara pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan karena tidak semua penyelenggara, misal di kelurahan tidak mudah menerima justru lebih hebat diskriminasinya. Jadi kami harus selalu meminta, sampai kapan kami diposisikan untuk selalu meminta padahal semua itu adalah hak warga Negara. Sebenarnya kami tanpa harus diminta pun harus dibiarkan untuk ikut. Tetapi memang kita dihadapkan dengan sistem yang resisten umtuk memberikan akses kepada PD, misal jujur kami itu tidak mudah untuk bertemu dengan para pejabat, karena memang mereka cara pikirnya dalam konsep lama 'ah kalau ngomong soal penyandang disabilitas itu cukup dikasih segini' masih sangat charity, padahal kita sudah bicara hak dan jumlah. Satu orang penyandang disabilitas harus dipenuhi haknya, ini bukan pekerjaan yang mudah..." (Mia, Maret 2017)*

Gambar 16 Angkutan Ramah Penyandang Disabilitas "Smart Pete-pete" dan "Invisible Guiding Block" pada Trotoar Merah Marun di Kawasan Pantai Losari

Sumber: dokumentasi peneliti & www.roda2makassar.com

Sementara perjuangan untuk memperoleh akses ke perencanaan pembangunan secara sistematis masih bergulir secara dinamis, beberapa program terkait PD telah berhasil masuk ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis beberapa SKPD yaitu Badan PPPA dan Dinas Sosial Pemprov Sulawesi Selaatan. Beberapa program tersebut antara lain 1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan *life skill* para PD, ii. Sosialisasi

kebijakan terkait PD, dan iii. Program pelibatan PD untuk memberikan motivasi kepada sesamanya. Program-program tersebut telah masuk pada anggaran SKPD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, beberapa penyandang disabilitas juga sudah diberikan porsi sebagai Aparatur Sipil Negara baik di tingkat Pemprov Sulsel maupun Pemkot Makassar sendiri. Adapun beberapa program yang digulirkan oleh Pemkot Makassar terkait PD antara lain: i. Pemberian penghargaan bagi atlit PD yang berprestasi setara dengan atlit non-PD, ii. Pelayanan kesehatan *Home Care* dan Mobil *Dottoro'ta* yang mudah diakses dan berperan aktif menjemput pasien PD, dan iii. Pengembangan moda transportasi "*Smart Pete-pete*" yang ramah PD, dan lain-lain.Adapun contoh hasil advokasi dari warga yang berhasil menjadi program ramah penyandang disabilitas adalah dibuatnya *pedestrian* yang menutup selokan-selokan sehingga mencegah PD terjatuh ke dalamnya.

Meskipun demikian, program ramah PD yang disusun tanpa pelibatan aktif PD sebagai subjek program belum tentu mencapai tujuannya dengan tepat sasaran. Beberapa contoh program ramah PD yang perlu perbaikan dan peningkatan agar lebih tepat sasaran adalah *guiding block* yang terdapat pada trotoar. *Guiding block* yang seharusnya berwarna kuning gading dan bertujuan agar dapat terlihat bagi beberapa tuna netra yang masih bisa sedikit melihat menjadi hilang fungsinya. Mia mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengubah warna *guiding block* menjadi merah marun karena cocok dan indah dengan keramik sekitarnya. Di sisi lain, Mia berharap agar ada peningkatan dalam layanan *home care* (*Dottoro'ta*) yaitu dengan menyediakan pekerja yang dapat berkomunikasi dengan PD tertentu seperti tuna wicara dan tuna rungu sehingga penanganan kesehatan bisa lebih efektif.

Sayangnya, pembangunan pedestrian itu akhirnya kami anggap masih kurang karena itu tidak sesuai dengan prinsip penyandang disabilitas,

warnanya. Saya memberikan informasi kepada Pak Walikota dan SKPD lainnya saat di sebuah forum perempuan disabilitas, 'pak warna di guiding block pedestrian itu bukan sembarang kasih warna, ketika diberikan warna kuning ada tujuannya, kuningnya bukan pucat tapi cerah itu kenapa? Itu untuk mempermudah teman2 tuna netra yang masih bisa melihat sedikit untuk mereka tau ini arahnya' ketika itu diganti warnanya agar matching dengan keramik yang lain jadi merah marun 'kami sangat apresiasi pak tapi tolong diubah warna kuning' kan hal kecil begitu tapi kami harus mengingatkan… (Mia, Maret 2017)

Akses untuk dapat memperoleh peran sebagai subjek dalam proses perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas merupakan hal utama yang harus segera tercapai agar pelaksanaan pembangunan inklusif berperspektif PD dapat tercipta dan tepat sasaran. Penyandang disabilitas merupakan komunitas rentan yang dengan pengalaman hidup mereka menjadi masyarakat yang paling mengetahui kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan yang ramah PD akan kehilangan makna saat PD tidak dilibatkan sebagai subjek dari program yang sebagaimana diungkapkan oleh Mia yaitu *"nothing us, without us!"* Untuk menjawab kebutuhan itu, salah satu solusi yang ditawarkan Mia adalah pembentukan kegiatan "Musrenbang Tematik Penyandang Disabilitas" sebagai wadah PD untuk menggalang aspirasi mereka dan tempat pemerintah untuk hadir guna mendengar langsung suara mereka. Untuk keterlibatan PD dalam sistem *e-government* terdapat peluang karena banyak dari penyandang disabilitas yang 'melek' teknologi seperti internet dan komputer. Namun, sistem dalam *e-government* harus dilengkapi dengan fitur ramah PD seperti JAWS (*Job Access with Speech*) dan/atau NVDA (*Non-Visual Desktop Application*).

Dari *"War Room"* hingga *"e-Kemiskinan"*: Dinamika Perkembangan dan Pemanfaatan Inovasi berbasis TIK di Kota Makassar

Abstrak

Inovasi penggunaan teknologi diharapkan mampu mendekatkan masyarakat dengan pemerintahnya untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat. Di bidang kesehatan pemerintah Kota Makassar menginisiasi program yang diberi nama 'Otto Dottoro'ta' (mobil dokter anda) untuk mendukung pelayanan kesehatan dari sisi transportasi. Selain itu terdapat inovasi di bidang kebersihan yang disebut dengan "Tangkasaki" yang merupakan kepanjangan dari "Truk Angkutan Sampah Kita" yang pengelolaannya berbasis pada GPS (Global Positioning System). Untuk memonitoring seluruh kegiatan kota melalui pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kota Makassar memiliki "war room" yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan pusat data pemerintah kota.

Prolog

Pemerintah Kota Makassar memiliki visi menjadi "Kota Dunia" yang nyaman untuk semua masyarakat. Sejak dipimpin oleh Walikota Danny Pomanto, muncul banyak inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu inovasi yang dianggap fenomenal adalah pembangunan "War Room" yang berada di lantai 10 Kantor Walikota Makassar. Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan bahwa "War Room" adalah sebuah

ruangan yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan pusat data di Pemkot Makassar. Di dalamnya terdapat layar monitor yang terhubung dengan 300an kamera cctv yang tersebar di ruang-ruang publik maupun ruang perkantoran di seantero Makassar. Maksud dan tujuan dari pembangunan "War Room" memang untuk menjadi pusat komando dari layanan publik yang berbasis TIK sehingga mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan. Pusat komando tersebut juga sudah memiliki jejaring ke SKPD-SKPD dan lembaga lain yang berkepentingan seperti Kepolisian, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Layanan Sosial, hingga TNI. Pembangunan sistem pengawasan berbasis kamera cctv sendiri bertujuan untuk memantau tindak kejahatan, mobilitas masyarakat, hingga titik-titik rawan kebencanaan. Selain itu, salah satu upaya yang masih berlanjut hingga penelitian ini dilakukan adalah membangun suatu konsep "*One City, One Data Center*" di mana "War Room" menjadi 'rumah' bagi sistem-sistem elektronik yang dikembangkan oleh SKPD-SKPD seperti BAPPEDA dan BPKAD agar terintegrasi. Adapun beragam inovasi yang telah disebutkan akan dijelaskan satu per satu berikutnya.

Gambar 17 Pusat Komando "War Room" Pemerintah Kota Makassar

Sumber: makassar.merdeka.com

Satu inovasi di bidang kebersihan Kota Makassar adalah Tangkasaki yang merupakan kepanjangan dari "Truk Angkutan Sampah Kita" yang pengelolaannya berbasis pada GPS (*Global Positioning System*). Melalui Tangkasaki yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Makassar, pimpinan Pemkot Makassar ingin mereplikasi pelayanan kebersihan yang terintegrasi di negara-negara maju. Melalui pengamatan di sekitar Kantor Dinas Kebersihan, terdapat beberapa jenis kendaraan yang dijadikan Tangkasaki seperti truk, *pick up*, hingga motor angkut beroda tiga. Kendaraan-kendaraan itu difungsikan untuk mengangkut sampah masyarakat ibu kota provinsi Sulawesi Selatan hingga di satuan pemukiman terkecil yaitu lorong-lorong. Pada dasarnya, Tangasaki merupakan bagian dari pelayanan kebersihan terintegrasi di wilayah Kota Makassar yang berfokus pada lorong-lorong.

Gambar 18 Pasukan Jingga Pemkot Makassar dengan Tangkasaki berbasis GPS

Sumber: dokumentasi peneliti

Menurut Partono, salah satu warga di Kelurahan Mamajang mengatakan bahwa tidak ada lagi TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di lingkungan pemukiman termasuk di depan rumah-rumah warga. Masyarakat diminta untuk membuang sampah di dalam kresek yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan membuangnya ke motor angkut sesuai dengan jadwal dan rute yang sudah disusun. Pada tahapan ini, tampak upaya Pemkot Makassar dalam mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah yaitu tidak dibiarkan menumpuk di sekitar pemukiman sehingga mengganggu aktivitas luar ruangan masyarakat itu sendiri. Namun, pengubahan perilaku masyarakat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Partono yang juga Ketua LPM Kota Makassar kembali menerangkan melalui ujarannya sebagai berikut:

> *"...TPS tidak ada lagi yang ada itu Fukuda menjemput, jadi pagi itu datang sampai jam 10 di jalan, tapi ada perubahan lagi menjadi malam. Kalau pagi menganggu pengguna jalan kalau malam sedikit yang dijalan, mungkin maksudnya baik ya. Nah, sekarang ini kan kebiasaan ibu rumah tangga kalau pagi itu beli apa ya ikan, yang basah-basahlah ya, kalau malam pasti sudah bau, isi perutnyakan bau. Dibuanglah di Gendang 2 itu ada dua tempat satu buat plastik satu non plastik, sudah dipilah dari awal. Gendang 2 itu Pemda disiapkan untuk mas-mas dari jkt mau buang gula-gula (di tempat publik). Tapi apa ada perilaku yang berubah dari masyarkat? ibu-ibu yang tidak nemu tempat sampah dekat rumah, ada Gendang 2 nih tempat sampah bawa ke situ sambil jalan pagi-pagi buang ke situ seonggok sampah itu, nah bebannya itu nggak sesuai dengan beban Gendang 2 yang hanya pakai kresek besar, kerangkanya aja yang besi tapi tempat buangnya kan dari plastik paling ya 2-3 kilo beratnya lebih dari itu ya jebol. Tapi ya daripada rumah bau ya mending ke situ," (Partono, warga Kelurahan Mamajang, April 2017)*

Kisah di atas adalah gambaran dari realita adaptasi masyarakat yang merespon perubahan pola pelayanan pengangkutan sampah di

lingkungannya. Diperlukan lebih banyak penyuluhan dan promosi untuk mengajak masyarakat membentuk kebiasaan membuang sampah yang baru. Mekanisme pengangkutan juga perlu disesuaikan agar lebih mengadaptasi kebiasaan masyarakat terkait waktu pembuangan sampah.

Tidak jauh berbeda dengan Tangkasaki, inovasi di bidang pelayanan kesehatan juga memanfaatkan TIK yaitu layanan *Home Care* 'Otto Dottoro'ta' atau dalam bahasa Indonesia berarti "Mobil Dokter Anda" yang berbasis Call Center 112. Melalui layanan Otto Dottoro'ta, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berupa 'dokter pribadi' yang menghampiri atau menjemput ke rumah warga. Layanan yang memperoleh "Top 10 Inovasi Indonesia pada tahun 2015" itu berusaha menjawab masalah keterbatasan akses transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan cepat maupun darurat. Mia, seorang penyandang disabilitas juga mengapresiasi inovasi layanan 'dokter pribadi' itu karena sangat membantu bagi beberapa penyandang disabilitas yang tidak mudah dimobilisasi. Meskipun demikian, Mia berharap agar layanan itu dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang mengerti cara berkomunikasi dengan beberapa penyandang disabilitas agar pelayanan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Gambar 19 Armada Otto Dottoro'ta dan Ambulance Kota Makassar

Sumber: dokumentasi peneliti

Inovasi selanjutnya adalah Call Center 112 yang merupakan nomer kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan, pelaporan, maupun permintaan bantuan secara langsung. La Heru, salah satu pejabat di lingkup Dinas Sosial mengatakan bahwa pihak operator 112 telah terhubung dengan semua SKPD-SKPD untuk merespon dengan segera sesuai dengan bentuk keluhan yang datang. La Heru kemudian berujar "*Misal ada masyarakat terlantar, hisap lem, dan lain-lain maka akan diteruskan ke Dinas Sosial, …responnya harus cepat, bahkan hitungan menit, apalagi kita bekerjasama dengan Satpol PP jadi tidak boleh terlambat,"* yang menggambarkan mekanisme respon berbasis laporan melalui nomer kontak 112. Beberapa pelayanan publik lain yang terhubung dengan operator 112 adalah Shelter Warga sebagai tempat penampungan sementara korban tindak kekerasan maupun kejahatan dan *Otto Dottoro'ta* bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun, La Heru mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah pengguna manfaat dari Call Center ini masih terbatas pada kasus pelaporan infrastruktur saja sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.

Merintis e-Kemiskinan: Sistem Informasi Kemiskinan Pemerintah Kota Makassar

> *"...Rakor yang pertama untuk tahun ini terutama dalam konteks pemutakhiran data mandiri terkait penanganan program keluarga miskin yang ini sebagai salah satu indikator keberhasilan kita untuk penanganan kemiskinan di kota Makassar ini. Program ini adalah salah satu yang sebenarnya paling dominan menyelesaikan tugas kita di RPJMD." (Syamsu Rizal, April 2017)*

Seperti itulah pentingnya data kemiskinan yang terpadi bagi Syamsu Rizal. Kalimat itu dilontarkan Syamsu Rizal saat membuka acara "Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan Terpadu (MPMDKT) dan Sosialisasi E-Kemiskinan Kota Makassar," pada hari Selasa 4 April 2017. Acara ini dihadiri oleh pejabat pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta beberapa SKPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) seperti Dinas Sosial, Dinas PPPA, BAPPEDA, Dinas Pekerja Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan 13 Kecamatan. Syamsu Rizal menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program utama yang diusung olehnya dan Walikota Danny Pomanto dan menjadi salah satu misi mereka yaitu *"Rekonstruksi Nasib Rakyat."* Sistem informasi data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi nantinya menjadi basis data utama bagi SKPD-SKPD untuk menentukan penerima program sehingga lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, program pengembangan sistem informasi itu tidak menjadi tanggungjawab suatu instansi tertentu sehingga peroses pengembangannya belum terkonsentrasi. Oleh karenanya, Syamsu Rizal mengatakan bahwa pentingnya saling koordinasi dan sinergi dari SKPD-SKPD yang tergabung dalam TNP2K untuk mempercepat proses pengembangan sistem informasi dan pemutakhiran data terkait kemiskinan.

Aplikasi e-Kemiskinan Pemkot Makassar adalam sistem informasi kemiskinan yang inisiasinya dipimpin oleh BAPPEDA dan bekerjasama dengan beberapa SKPD yang tergabung dalam TKPKD. Pengembangan sistem informasi berbasis *online* ini dipimpin oleh KuPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil) sejak tahun 2015. Data yang telah dihimpun dalam sistem informasi e-Kemiskinan berasal dari beberapa dinas yang memiliki program untuk masyarakat kurang mampu seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Data yang dihimpun itu berisikan informasi dasar seperti nama, alamat, kepemilikan fasilitas rumah tangga, dan lain-lain sehingga perlu dilengkapi lagi. Pada saat penelitian ini berlangsung, TKPKD Kota Makassar sedang melakukan proses verifikasi data secara langsung di lapangan oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Mereka melengkapi data dasar yang dimasukkn oleh pendaftar dengan data visual seperti foto individu pendaftar, foto tempat tinggal dan fasilitas di dalamnya, hingga data spasial berupa titik koordinat berbasis GPS. Pak Amri, Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintah Umum, mengatakan bahwa pengembangan e-Kemiskinan Kota Makassar dilakukan untuk memecahkan beberapa masalah seperti mengurangi dampak dari *"elite capture"* atau penentuan data kemiskinan berdasarkan subjektifitas maupun kepentingan kelompok elit lokal. Selain itu, data yang terverifikasi secara berkala itu juga menjadi solusi untuk memaksimalkan program bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Gambar 20 Rapat Koordinasi TNP2K dan TKPKD terkait Mekanisme Pemutakhiran Data Mandiri dan Sosialisasi Aplikasi E-Kemiskinan

Sumber: dokumentasi peneliti

Pada saat penyuluhan itu, Manajer Program MPMDKT Pusat, Siska, memaparkan alur mekanisme pemutakhiran mandiri di tingkat pusat yang terhubung dengan penelusuran data yang berlangsung di masing-masing daerah. MPMDKT memiliki dasar kebijakan dari Undang-undang No.13 tahun 2011 yang menerangkan bahwa seorang fakir miskin yang belum memperoleh program harus memperoleh akses untuk dapat mendaftarkan dirinya secara aktif.

> *"Saya ingatkan bahwa data itu nanti akan jadi data yang sangat kaya ya, pemkot Makassar juga sudah pegang selain nama, alamat, nik, itu rinci sekali sampai kondisi sakitnya individu itu ada jadi kalau mau dipakai untuk program apa saja bisa tergantung mau kriteria apa yang dimasukkan." (Siska, Manajer MPMDKT, April 2017)*

Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi perhatian siska terkait data kemiskinan. Yang pertama adalah data kemiskinan harus akuntabel dan terbuka

sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi yang berintegritas. Yang kedua, karena perannya untuk menentukan sasaran penerima program, data kemiskinan harus dimutakhirkan secara berkala mengikuti perubahan masyarakat seperti kelahiran dan kematian, perpindahan kerja/usaha, dan lain-lain yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan suatu individu maupun keluarga. Beberapa tahapan harus dilalui dalam MPMDKT seperti pendaftaran aktif oleh individu miskin yang dilanjutkan dengan identifikasi awal apakah pendaftar telah masuk dalam data kemiskinan sebelumnya. Jika pendaftar belum termasuk ke dalam data kemiskinan sebelumnya, perlu dilakukan verifikasi secara langsung di lapangan untuk menilai peringkat kesejahteraannya. Setelah dilakukan pemeringkatan kesejahteraan, maka ditentukanlah siapa yang akan menerima bantuan dari program di level mana (pusat atau daerah).

Gambar 21 Tampilan Informasi Pendaftar dan Penyebaran Titik Keluarga Miskin dalam Website e-Kemiskinan Kota Makassar

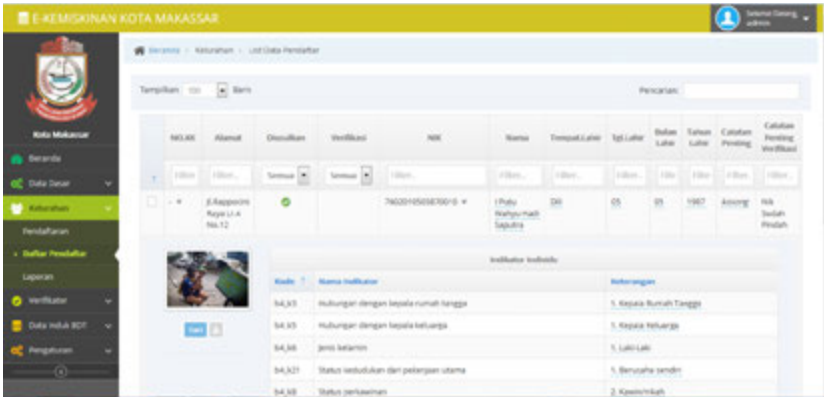

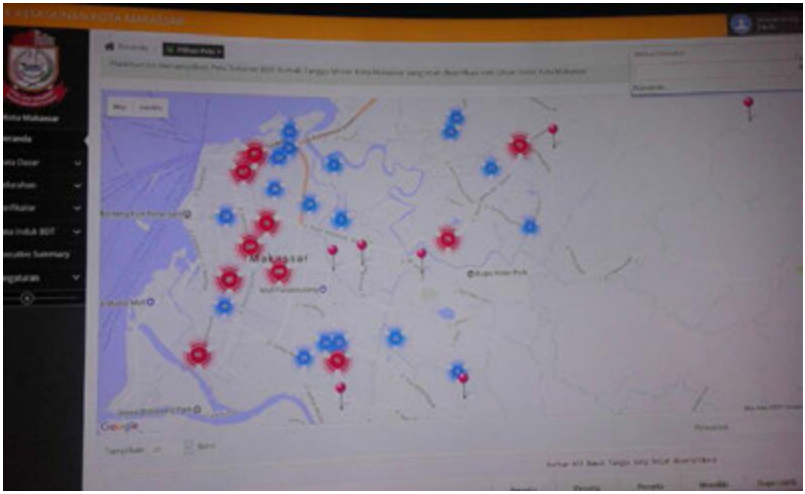

Sumber: Putu, KuPAS

Pembangunan e-Kemiskinan oleh Pemkot Makassar itu diapresiasi oleh Siska sebagai Manajer Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan Terpadu, TNP2K karena termasuk langkah berani. Namun, pengembangan aplikasi e-Kemiskinan masih harus dapat keluar dari hambatan yang ada dalam internal Pemkot Makassar sebagaimana yang tergambar dalam ujaran Syamsu Rizal pada saat acara penyuluhan tersebut sebagai berikut:

> *"...masalah yang paling utama itu adalah pertama sinkronisasi data yang tidak padu, masing-masing SKPD merasa data inilah yang harusnya menjadi pedoman untuk mengambil keputusan, Dinas Sosial, BKKBN, Diknas, Kesehatan, dll. Sekarang datanya sudah harus satu, tidak ada mi lagi yang datanya lain terutama dari Kemensos, Dinsos, melalui TKPKD, yang kedua adanya 'etno-sentris' SKPD, masing-masing merasa bahwa adanya 'kalau ada kegiatanku di Dinas Sosial tidak ada yang boleh campur-campuri, tidak ada yang boleh ada yang bantu, biar mi saya sendiri yang saya selesaikan ki, biar mi itu mau berhasil atau tidak itu urusanku saya yang mau bertanggungjawab" (Syamsu Rizal, Wakil Walikota Makassar, 4 April 2017)*

Pak Syamsu Rizal berharap agar tiap-tiap SKPD yang tergabung dalam TKPKD dapat saling bersinergi untuk mempercepat proses pemutakhiran data mandiri dalam E-Kamase sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan oleh SKPD-SKPD yang terkait. Sampai pengambilan data di lapangan selesai, proses verifikasi data kemiskinan masih berlangsung sehingga belum dapat dilihat dampak dan manfaat dari penggunaan aplikasi e-Kemiskinan. Namun, beberapa tampilan dalam sistem informasi e-Kemiskinan dapat secara terperinci memuat informasi tentang data-data kemiskinan secara visual bahkan spasial.

Bagian Ketiga

PETIKAN DARI BOJONEGORO

Peta Relasi Open Government Desa Penghasil Migas (Campurejo)

Abstrak

Di tengah maraknya isu korupsi saat ini, desakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dari berbagai pihak juga semakin kencang. Rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah juga semakin tinggi. Dan ini terjadi di semua level termasuk untuk pemerintah tingkat desa. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir melalui UU Desa, strategi pembangunan di Indonesia dimulai dari bawah (desa). Dan pemerintah desa diberi mandat untuk dapat mengelola dana desa agar dampak pembangunan yang dimulai dari bawah tersebut benar-benar dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Prolog

Salah satu hal yang menjadi daya dorong bagi Kabupaten Bojonegoro untuk menerapkan prinsip-prinsip *open government* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan diberkahinya kabupaten ini dengan sumber daya alam berupa minyak dan gas. Namun, hal tersebut menimbulkan banyak persoalan seperti dampak lingkungan, konflik kepentingan, korupsi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berbagai pihak termasuk masyarakat sipil mendesak adanya mekanisme transparansi migas untuk menghindari “kutukan sumber daya alam”. Mekanisme transparansi

migas ini diwujudkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mana prosesnya sangat partisipatif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan perusahaan. Hasilnya, pada tahun 2012 terbitlah Perda Transparansi Migas Kabupaten Bojonegoro yang secara garis besar berisi besaran nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemanfaatannya. Perda ini juga mengamanatkan transparansi tanggung jawab sosial perusahan (CSR) agar tidak tumpang tindih dengan program pemerintah kabupaten.

Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro merupakan desa yang mendapat perolehan DBH yang sudah diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan karena desa ini merupakan salah satu desa penghasil migas. DBH ini kemudian masuk ke dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengelolaannya pun tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sumber keuangan desa ini maka pemerintah desa pun dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan dan program-program desa secara terbuka. Kepala Desa Campurejo, Bapak Edi Sampurno, menyatakan bahwa pelaksanaan *open government* sudah mereka lakukan sebelum adanya program OGP dari kabupaten. Misalnya, pemerintah desa mendapatkan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dari perusahaan maupun pelatihan untuk aparat desa di propinsi. Pelatihan ini lebih banyak mengenai penertipan secara prosedur dan administrasi namun belum memanfaatkan teknologi digital dan yang berbasis *online*.

Gambar 22 Wawancara dengan Kepala Desa Campurejo

Memang kekuatan dalam OGP di Desa Campurejo adalah karena visi kepala desa yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang transparan. Lahirnya visi ini disebabkan karena berkaca dari pemerintah sebelumnya yang cukup disoroti oleh masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa semenjak adanya sumber keuangan yang tidak hanya berasal dari APBN atau APBD tetapi juga dari DBH Migas dan dana CSR dari perusahaan. Kemudian kepala Desa Campurejo ini juga menyatakan bahwa warganya adalah warga dengan tingkat pendidikan cukup tinggi yang berbanding lurus pada tingkat kekritisan mereka dalam menanyakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa agar program-program pembangunan desa yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang bermanfaat buat semua.

Gambar 23 Baliho Program dan Anggaran Desa Campurejo Terpampang di Kantor Desa

Keberhasilan Desa Campurejo meraih penghargaan sebagai desa terbuka baik dari kabupaten maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan seriusnya pemerintah desa menjalankan prinsip-prinsip transparansi. Tentunya hal tersebut didapatkan bukan semata-mata hanya upaya yang dilakukan kepala desa saja tetapi juga peran serta dan dukungan dari aparat pemerintahan, masyarakat dan semua pihak terkait yang ada di Desa Campurejo, salah satunya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Di

desa ini, BPD merupakan mitra kepala desa yang mempunyai fungsi kontrol, pengawasan, dan terlibat dalam pembuatan regulasi atau aturan yang dibuat dan dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Senada dengan yang dinyatakan oleh kepala desa, ketua BPD Campurejo Pak Nur Hasyim menyatakan bahwa mereka harus ekstra hati-hati dalam menyelenggarakan program-program desa terutama bila itu menyangkut pengelolaan keuangan. Baik pemerintah desa maupun BPD sangat menyadari bahwa tingkat kecakapan warga mereka jauh lebih tinggi dari pemerintah desa sendiri seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

> *"SDM masyarakat kami ini jauh lebih mapan dari pada kami, karena disini sudah ada yang pejabat, disini juga desa, tetapi di pinggir kota sehingga kami sangat mawas diri... Masyarakat sangat aktif, masyarakat Campurejo ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah masyarakat yang maju sehingga SDMnya lebih tinggi dan juga vokal dan majemuk sehingga desa harus dan wajib mengimbangi pelayanannya prima, harus bagus." (Nur Hasyim, Kepala BPD Campurejo)*

Jika pemerintah desa menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan relnya maka konsekuensinya mereka dapat saja berhadapan dengan aparat hukum seperti yang pernah dialami pemerintah Desa Campurejo seperti pernyataan dari hasil wawancara berikut:

> *"adakalanya kita diuji lewat pengadilan lewat hukum, kita gak nantang ya, tapi paling gak sampai ke ranah BPK, ke ranah inspektorat propinsi Jakarta, ke ranah kejaksaan, kita sempat. Hanya hal sederhana misalnya biaya operasional pemerintah desa, ada kalimat biaya operasional pemerintahan desa. Kalimat pemerintah dan pemerintahan ini diuji, dan semua yang saya lakukan itu selalu pakai peraturan desa yang sudah kita sepakati sehingga setelah kita gelar perkara yang kita sampaikan itu adanya." (Edi Sampurno, Kepala Desa Campurejo)*

Pemerintahan yang terbuka ini memberikan manfaat yang besar bagi pemerintahan desa, seperti yang diungkapkan berikut:

> *"Sebenarnya dengan pemerintahan yang lebih terbuka kami merasa ringan, artinya tidak was-was lagi sepanjang pemerintah desa ini lebih terbuka, beban kita akan semakin berkurang, wong terbuka aja masih dicurigai apalagi tidak terbuka." (Nur Hasyim, Kepala BPD Campurejo)*

Meskipun Desa Campurejo telah lebih dahulu melaksanakan pemerintahan yang terbuka, tentunya mereka menyambut dengan sangat antusias ketika adanya program OGP dari pemerintahan kabupaten. Mereka tinggal menyesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh kabupaten. Dan yang kemudian ditingkatkan adalah penerapan teknologi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang OGP, karena selama ini praktik keterbukaan yang dilakukan masih banyak yang bersifat manual. Seperti melakukan pertemuan-pertemuan hingga ke tingkat RT/RW dengan tujuan untuk merinci kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Lalu kepala desa melihat hal ini kurang efektif karena ada RT/ RW yang proaktif namun juga ada yang pasif. Bagi ketua RT/RW yang pasif ini dapat menimbulkan sumbatan komunikasi dengan masyarakat dan akhirnya Pak Edi menyatakan bahwa pemerintah harus hadir di masyarakat dengan cara masuk dalam pengajian-pengajian komunitas, kelompok tahlil ibu-ibu, atau pengajian selapanan malam. Tidak hanya itu, sebagai kepala desa Pak Edi juga berusaha terbuka terhadap pengaduan warga yang mungkin tidak dapat menyampaikan laporannya melalui ruang publik. Untuk itu, Pak Edi menyebarkan nomor kontak pribadinya khusus untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Campurejo ini, terasa sekali bahwa visi pemerintahan yang terbuka adalah visi yang sangat dijiwainya, karena ketika ditanya apakah dia tidak merasa kerepotan dengan banyaknya laporan yang bahkan masuk ke ponsel pribadinya, ia menyatakan bahwa justru imbal balik

dari masyarakat yang dia harapkan, karena hal itu menandakan bahwa ia berhasil dalam memberikan informasi kepada masyarakat meskipun respon yang datang dari masyarakat adalah berupa kritikan.

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah bagi pemerintah desa Campurejo merupakan tantangan tersendiri karena minimnya sumber daya dari aparat desa yang mempunyai kemampuan untuk dapat menggunakan teknologi terkini. Untuk itu kepala desa memberdayakan anak-anak muda untuk dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut. Berbagai media sosial telah digunakan sebagai media informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, seperti Facebook, Instagram, WhatApp, SMS dan yang sedang dikembangkan saat ini adalah web desa yang bernama kimwiraswara. blogspot.co.id. Melalui berbagai media sosial ini pun masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada pemerintah desa. Menurut keterangan Pak Edi setiap pengaduan yang masuk selalu diresponnya secara cepat
Dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, perlu dilakukan klarifikasi mana yang merupakan kebutuhan/ kepentingan pribadi dan mana yang merupakan kebutuhan/ kepentingan publik. Cara mengujinya adalah dengan membuka forum publik melihat efek publiknya karena forum tersebut sendiri yang menentukan serta menilai mana pengaduan yang benar-benar atas kebutuhan/ kepentingan publik atau kebutuhan/ kepentingan pribadi. “Dan itu selalu efektif dilakukan” tambah Pak Edi.

Lalu untuk pengembangan media informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi di atas, berbagai fasilitas untuk menunjang peran para pemuda ini juga disediakan oleh kepala desa mulai dari sarana sampai pelatihan-pelatihan. Misalnya *laptop*, *smartphone*, jaringan internet dan pelatihan IT. Dana untuk mengadakan kegiatan tersebut dicarikan melalui kerjasama dengan perusahaan dengan mengakses dana CSR. Bahkan

dengan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan, kepala desa juga berhasil membangun tempat sebagai warung apresiasi yang dapat digunakan baik oleh pemuda maupun masyarakat umum untuk berkegiatan.

Gambar 24 Mbah Damin, Wali Amanah Desa Campurejo

Pihak lain yang juga punya peran penting dalam pemerintahan yang terbuka di Campurejo adalah wali amanah. Wali amanah adalah perwakilan dari masyarakat yang mendapat mandat dari bupati agar menjadi wakil dari unsur-unsur yang ada di masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Bagi Desa Campurejo tidak sulit untuk menemukan orang yang dapat menjadi wali amanah meskipun wali amanah ini bersifat kerelawanan, karena seperti yang telah dituliskan di atas bahwa secara umum masyarakat Campurejo cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan desa yang dilakukan. Figur yang cukup kuat dan menjadi wali amanah adalah Mbah Damin. Mbah Damin adalah tokoh masyarakat yang tidak hanya dikenal di tingkat desa, tetapi kiprahnya sebagai tokoh yang cukup keras dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah juga dikenal hingga tingkat kabupaten. Meskipun sudah berusia lanjut, namun sosok Mbah Damin yang sederhana ini tampak memiliki semangat dan energi yang kuat jika bicara pembangunan desa dan kabupaten. Mbah Damin menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Campurejo telah mengalami perubahan semenjak adanyanya industry migas dan hal itu didukung oleh pemerintahan desa yang terbuka, seperti yang dinyatakan Mbah Damin sebagai berikut:

"kalau di desa ada apa-apa saya langsung masuk, misalnya ada indikasi saya langsung ke kepala desa tapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan sopan santun, nuwun sewu karena kita sebagai orang tua. Hanya kita mencari celah yang terbaik dan alhamdulillah kepala desanya bisa menerima dengan baik." (Mbah Damin, Wali Amanah Desa Campurejo)

Mbah Damin menilai bahwa saat ini pemerintah desa sudah cukup terbuka, informasi kegiatan desa bahkan informasi mengenai anggaran desa juga sudah dibuka baik secara *online* (melalui media sosial: web desa, Instagram, Facebook dll) maupun *offline* melalui baliho yang ada di kantor desa. Namun bagi Mbah Damin hal itu masih belum cukup karena belum dapat menjangkau semua masyarakat yang ada di tingkat RT dan Mbah Damin mengharapkan bahwa seharusnya transparansi tersebut bisa tersampaikan ke tingkat yang paling bawah seperti yang diutarakannya sebagai berikut:

"sementara harusnya ada selebaran Mas, karena ini kan masyarakat belum tahu IT dan sebagian besar buta IT, seharusnya ada lembaran-lembaran yang masuk ke RT yang masih manual, itu belum ada. Harapan saya di setiap RT harus ada, kalau di balai desa sudah ada tapi kan jarang masyarakat ke desa, transparansinya mestinya di setiap RT, nanti kan RT ada kegiatan jamaah tahlil." (Mbah Damin, Wali Amanah Desa Campurejo)

Peran Mbah Damin sebagai wali amanah bisa dikatakan sebagai penyambung lidah rakyat, karena Mbah Damin menyadari bahwa tidak semua masyarakat berani bersuara untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, khususnya bagi kelompok-kelompok marjinal yang ada di desa seperti lansia, perempuan maupun penyandang disabilitas. Untuk itulah Mbah Damin selalu bersedia untuk menyampaikan suara-suara mereka yang mungkin luput dari perhatian pemerintah, seperti contoh berikut:

"Kemaren ada orang tua disini, saya sudah sampaikan ke desa dan dia jauh dari keluarga, tidak ada punya anak tidak punya saudara. Dari desa akhirnya bantu." (Mbah Damin, Wali Amanah Desa Campurejo)

Pihak eksternal di luar lingkup pemerintah dan masyarakat Desa Campurejo yang secara tidak langsung mempunyai kontribusi dalam mendorong sistem pemerintah yang terbuka adalah CSO. Jika ditarik ke program OGP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, peran CSO telah dimulai semenjak dari awal lahirnya program ini. Seperti yang telah diceritakan di atas, salah satu inisiatif untuk menginisiasi pemerintah agar terbuka terkait pelaksanaan program-programnya adalah dengan adanya campur tangan CSO yang mendesak untuk adanya transparansi DBH migas di wilayah Bojonegoro. Dan kemudian dalam perkembangannya CSO yang ada tetap terlibat dalam pelaksanaan *Open Government* dengan dibentuknya *Steering Committee* (SC) OGP. SC OGP ini terdiri dari pemerintah dan CSO yang mewakili masyarakat sipil seperti Bojonegoro Institute (BI), Sinergantara, Mediatrac, Institut Development for society (IDFoS) dan Poverty Resource Center (PRC).

Gambar 25 Pertemuan Steering Committee OGP di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro

Keterlibatan CSO di dalam SC ini bukan hanya sekedar sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Open Government tetapi CSO dilibatkan lebih jauh sebagai mitra pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Open Government di Bojonegoro. SC OGP ini mempunyai Rencana Aksi (Ren Aksi) keterbukaan pemerintah yang diturunkan dalam 5 tema yang bertujuan dalam rangka pencapaian tata pemerintahan yang terbuka, yaitu:

1. Revolusi data
2. Penguatan akuntabilitas pemerintah desa
3. Peningkatan transparansi sistem anggaran daerah
4. Penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa
5. Penguatan kualitas pelayanan publik

Gambar 26 Fasilitas sms center

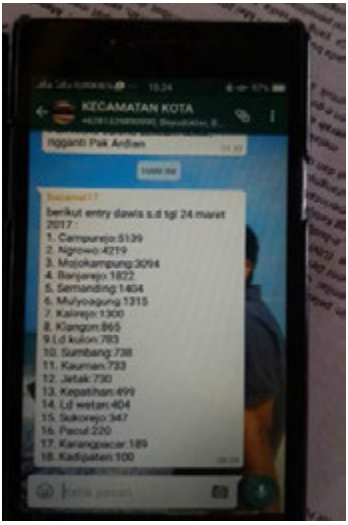

Satu-satunya program Ren Aksi yang dijalankan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa adalah program revolusi data di mana program ini merangkul Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di tingkat desa. Program ini ada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan dalam pelaksanaannya program ini merupakan kolaborasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bersama Bojonegoro Institute (BI) dan TP-PKK. Program

Revolusi Data adalah program yang bertujuan untuk penguatan data dari tingkat pemerintah desa menuju one data Bojonegoro yang reliable dan realtime. Kesamaan data dasar ini mengacu pada data di aplikasi data dasa wisma (Dawis), karena selama ini masih terdapatnya kesimpangsiuran data dasar antar pengelola data dan belum tersaji secara *real time*. Sehingga dengan adanya program ini terwujudnya kualitas kebijakan untuk masyarakat yang tepat sasaran serta bermanfaat.

Untuk mengimplementasikan program ini, dilakukan pelatihan di tingkat kecamatan kepada dua orang perwakilan dari setiap desa. Mereka yang dikirim untuk pelatihan adalah ibu-ibu anggota PKK. Dalam pelatihan yang diberikan selama satu hari itu, peserta diberikan penjelasan mengenai revolusi data melalui upadate data Dawis, cara pengisian data Dawis dan pelatihan untuk penginputan data Dawis yang telah dilakukan secara manual (melalui buku Dawis) ke portal data nasional data.go.id. Pelatihan ini dilakukan oleh Diskominfo bersama BPMPD serta BI sebagai CSO yang nantinya akan berperan untuk mendampingi secara langsung untuk pengisian data Dawis di tingkatan desa jika terdapat kesulitan bagi peserta pelatihan ketika menjalankan tugasnya sebagai petugas Dawis.

Setelah adanya bekal pelatihan yang diberikan dalam satu hari, peserta pelatihan kemudian diberi tugas untuk menyebarkan buku Dawis kepada masyarakat dan meminta untuk mengisinya secara manual. Karena data yang harus diisi cukup detail dan banyak, yaitu terdiri dari 360 kolom. Maka seperti yang telah diceritakan di atas pengisian data Dawis ini didampingi oleh relawan-relawan BI yang biasanya direkrut dari mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro yang kemudian turun ke desa untuk melakukan pendampingan langsung.

Di Desa Campurejo sendiri, kepala desa juga menunjuk satu orang penanggung jawab di setiap RT untuk proses pengisian buku Dawis. Petugas Dawis Campurejo, Bu Vita mengatakan pengisian data ini cukup sulit

"karena data yang njelimet dan detail harus diisi secara lengkap dan benar agar data yang didapat benar-benar konkret. Oleh sebab itulah proses pengisian data Dawis ini membutuhkan waktu yang yang lama. Jika dilakukan pengisian satu-satu untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) maka kurang efektif, cara terbaiknya adalah dengan mengumpulkan beberapa orang warga, kumpul di satu rumah kemudian dilakukan pengisian secara bersama-sama." (Vita, Petugas Dawis Desa Campurejo)

Setelah pengisian data ke buku Dawis selesai kemudian dilakukan verifikasi sebelum dilakukan penginputan data kembali ke aplikasi berbasis *online* yang telah digunakan sejak Oktober 2016. Penginputan dilakukan oleh dua orang anggota PKK yang telah dilatih di tingkat kecamatan tadi. Penginputan menggunakan aplikasi khusus bernama data Dasa Wisma yang terhubung langsung dengan portal data nasional data.go.id. Setiap hari kerja, dua orang ini melakukan penginputan di kantor kepala desa dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB. Progres penginputan data Dawis langsung dipantau oleh Camat dan Desa Campurejo adalah desa dengan progres tertinggi dibandingkan desa lainnya yaitu sebanyak 5.139 data yang telah terinput, artinya sudah 95%.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas penginputan ini adalah kebosanan, seperti yang dinyatakannya sebagai berikut:

"Cukup sih, Cuma kadang kendalanya melakukan hal yang sama terus boring, terus kalau melakukan di rumah gak ada akses internet jadi harus kesini, kadang di rumah dilakukan cuma dapat satu dawis jadi berat di ongkos. Di sini wifi-nya gratis, tetapi memang gak sampai sore cuma sampe siang. Saya melakukan ini kalau di rumah ada anak kecil jadi susah." (Vita, Petugas Dawis Desa Campurejo)

Gambar 27 Penginputan Data Dasa Wisma oleh Kader PKK di Kantor Kepala Desa Campurejo

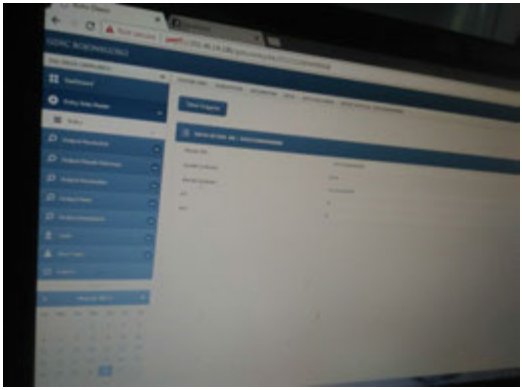

Sumber: Dokumentasi peneliti

Proses penginputan data ini masih sedang berjalan, sehingga tujuan akhir dari program bahwa berdasarkan update data Dawis tersebut akan lahirnya sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat belum dapat dilihat. Karena memang belum ada kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data Dawis ini

Dialog Jumat: Ajang Curhat Masyarakat ke Pejabat, ala Bojonegoro

Abstrak

Menuju era pemerintahan yang transparan dan terbuka, tidak ada artinya jika tidak disertai partisipasi penuh dari masyarakat. Karena harapan masyarakat terhadap pemerintah hanya bisa dilihat dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Tentunya tidak mudah membangkitkan antusias masyarakat agar sama-sama melakukan pembangunan yang bermanfaat luas bagi semua warga, di tengah banyaknya masyarakat yang apatis dan skeptis terhadap pemerintah. Dialog Jumat ini adalah salah satu contoh dimana pemerintah berhasil mengajak masyarakat untuk dapat mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik ke depannya.

Prolog

Penyelenggaraan *Open Government* di Bojonegoro membawa beberapa perubahan yang positif baik di tingkatkan pemerintah maupun di masyarakat. Di pemerintahan secara tidak langsung Open Government dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan program secara cepat dan tepat, karena masyarakat luas dapat mengawasi kinerja pemerintah

ini dan juga dapat melakukan pengaduan melalui berbagai media baik online maupun offline yang juga dapat direview langsung oleh Bupati sebagai penanggung jawab tertinggi terhadap pelaksanaan program dan penanganan pengaduan tersebut. Dari proses penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Bojonegoro cukup *aware* dengan semangat *open government* yang digalakkan karena hal tersebut tercermin dari pelayanan yang mereka berikan terhadap peneliti dalam melakukan penelitian lapangan ini. Pemerintah Bojonegoro selalu merespon dengan baik terhadap permintaan-permintaan wawancara, memberikan jadwal wawancara dengan jelas dan tepat waktu, memberikan informasi yang jelas serta terbuka terhadap informasi ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam penelitian ini meskipun hal tersebut ada yang bersifat sensitif seperti data-data terkait anggaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudahan mendapatkan data dan informasi dari pemerintah juga berlaku sama jika yang membutuhkan itu adalah masyarakat Bojonegoro sendiri.

Perubahan dari sisi masyarakat adalah dengan adanya ruang dan media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mengakibatkan masyarakat menjadi kritis dan dapat merespon setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian hal ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Dialog Jumat dimana seluruh lapisan masyarakat dengan sadar datang ke Pendopo Kabupaten untuk datang menyampaikan pertanyaan, pendapat, gagasan, kritik, saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara langsung. Seperti yang telah dikatakan di atas melalui Dialog Jumat juga menjadi sarana bagi Bupati beserta SKPDnya untuk memahami dan mengerti perasaan, pikiran dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Dialog Jumat menjadi bahan dan pijakan bagi Pemerintah Bojonegoro untuk mengambil keputusan secara tepat.

Gambar 28 Suasana Dialog Jumat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro

Dialog Jumat ini diadakan setiap selesai ibadah Jumat mulai pukul 13.30 hingga pukul 15.00. Setiap warga dapat datang ke Pendopo ini untuk terlibat di Dialog Jumat. Mereka yang datang ke Dialog Jumat diwajibkan mengisi daftar hadir baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dalam Dialog Jumat setiap perwakilan SKPD yang ada di Bojonegoro diwajibkan untuk hadir agar dapat langsung merespon setiap aspirasi yang diberikan masyarakat di waktu dan tempat itu juga.

Sebelum proses dialog dilakukan, biasanya kegiatan ini didahului dengan adanya pemaparan dari instansi tertentu yang memberikan informasi atau perkembangan program yang sedang dilaksanakan. Ketika observasi penelitian ini dilakukan, pemaparan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bojonegoro yang memberikan informasi mengenai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, barulah diberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan segala sesuatu yang dapat mereka dialogkan dengan pemerintah.

Pada proses ini dapat terasa tidak ada jarak antara masyarakat dan pemerintah, semuanya berjalan dengan sangat cair. Di mana masyarakat dapat hadir dengan apa adanya mereka. Tidak perlu hadir dengan memakai pakaian terbaik mereka, tidak harus menyampaikan uneg-unegnya dengan menggunakan kata-kata pilihan, dan masyarakat datang dengan kepercayaan diri mereka masing-masing sebagai warga Bojonegoro. Begitu juga halnya dengan pemerintah, meskipun tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat menjadi kerangka pikir mereka untuk hadir pada dialog ini, tetapi keberadaan mereka yang santai menciptakan suasana kedekatan dan kehangatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Meskipun dialog ini terasa sangat santai dan akrab, namun pemerintah selaku penyelenggara tetap serius dalam menanggapi setiap dialog yang muncul. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi baik yang menggunakan foto maupun dokumentasi secara tertulis.

Gambar 29 Seorang nenek tua meminta bantuan modal kepada Kang Yoto, selaku bupati agar ia bisa berdaya secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidupnya

Saat observasi ini dilakukan, Dialog Jumat awalnya dipimpin oleh Kepala Bappeda karena pada saat itu Kang Yoto sebagai Bupati Bojonegoro sedang menerima tamu dari Kementerian Pariwisata. Namun tidak lama kemudian Kang Yoto ikut bergabung dan mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Penyampaian aspirasi ini dilakukan di depan semua hadirin yang datang, dimana masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya maju ke depan dan berbicara dengan menggunakan pengeras suara. Karena

ini adalah ajang curhatnya warga Bojonegoro tentunya bahasa yang dominan digunakan adalah bahasa jawa. Saat itu, aspirasi yang disampaikan terdiri dari beberapa isu. Ada warga yang menyampaikan aspirasinya yang mewakili komunitasnya dan ada juga yang menyampaikan pemasalahan pribadi. Contohnya, ada ketua Perkumpulan Disabilitas yang menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Bojonegoro agar kaum disabilitas di Bojonegoro mendapatkan perhatian untuk dapat diberdayakan dalam program-program kabupaten. Kemudian ada juga warga yang menyampaikan masalah pribadinya yaitu bahwa ia telah mengalami penipuan ketika melakukan penjualan tanahnya di mana terdapat perbedaan luasan tanah dari sertifikat yang ia miliki sebelumnya dengan luasan tanah yang kemudian dihitung kembali ketika ia akan menjual tanahnya tersebut. Untuk kasus seperti ini Kang Yoto memanggil SPKD terkait untuk menangani dan menindaklanjuti masalah yang dihadapi warga tersebut, langsung di tempat.

Gambar 30 Salah satu warga yang melaporkan mengenai kejelasan sertifikat tanahnya dan langsung direspon oleh SKPD terkait

Aspirasi lain yang muncul saat itu lebih banyak yang bersifat pribadi. Yang menarik, ada seorang wanita tua yang mengangkat tangan dan ingin berbicara ke depan untuk menyampaikan maksudnya kepada Bupati secara langsung. Nenek tua ini tampak kesulitan untuk berdiri dan berjalan menuju pengeras suara yang ada di depan. Dua orang warga langsung membantu dan menuntun nenek tersebut ke depan. Setelah sampai di depan, dalam bahasa Jawa nenek tua ini menyampaikan bahwa ia meminta bantuan modal untuk usahanya kepada Kang Yoto. Meskipun sudah tua, ia tidak mau meminta-minta dan ingin mandiri secara ekonomi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan modal dari Kang Yoto. Hal itu disampaikan dengan cukup emosional sampai mengeluarkan air mata. Melihat hal itu Kang Yoto langsung menghampiri nenek itu dan langsung menyampaikan bahwa nanti akan ada solusi terhadap permintaan tersebut. Mendengar hal itu nenek ini mengucapkan syukur dan juga menyampaikan kesedihannya karena sebentar lagi Bupati yang disayangi warganya ini akan selesai masa jabatannya. Nenek ini merasa sedih karena apakah nanti pengganti Kang Yoto juga akan dekat dengan masyarakat seperti sekarang. Apakah orang-orang seperti dia akan didengar suaranya oleh Bupati selanjutnya. Untuk merespon hal tersebut tampak Kang Yoto hanya bisa menenangkan saja dan meyakinkan nenek itu dan semua warga bahwa pemerintah akan berjalan seperti apa yang diinginkan masyarakat asalkan masyarakat tetap aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Di akhir acara, ketika tidak ada lagi masyarakat yang akan menyampaikan uneg-unegnya, Kang Yoto memberikan wejangan kepada warga yang hadir bahwa jangan mudah putus asa, teruslah berkreasi dan berusaha dan pemerintah akan selalu hadir untuk mendukung masyarakat. Motivasi-motivasi ini disampaikan oleh Kang Yoto dengan bahasa ala Bojonegoro dan Kang Yoto pun memberikan contoh kreativitas yang ia hasilkan yaitu

berupa lagu. Dan kembalilah suasana menjadi cair dan gembira karena Kang Yoto menyanyi bersama dengan warga yang kebetulan sudah hapal lagu yang diciptakannya tersebut.

Dari proses Dialog Jumat kali ini, saya melihat bahwa dalam kerangka *Open Government* proses seperti ini juga mengedukasi masyarakat dalam banyak hal, mulai dari keberanian menyampaikan pendapat di ruang publik (public speaking), edukasi politik, pemahaman mengenai tata pemerintahan dll. Kemudian pemerintah juga harus lebih jeli membaca karakter masyarakatnya agar dapat terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga langkah atau strategi *Open Government* yang dipilih sesuai dengan kultur masyarakat yang disasar.

Open Government: Sebuah Keniscayaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Masyarakat Bojonegoro

Abstrak

Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Inovasi merupakan indikator-indikator terwujudnya Open Government. Tentunya hal tersebut memiliki tujuan akhir yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa tata pemerintahan yang terbuka mempunyai dampak pada kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Prolog

Implementasi *Open Government* terkait *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bojonegoro baru diimplementasikan dari Januari 2017. Dan aplikasi *e-planning* yaitu *e-musrenbang* juga masih dalam tahap perbaikan dari waktu ke waktu. Karena sosialisasi *e-musrenbang* belum merata dilakukan hingga ke desa-desa, pelaksanaan Musrenbang juga belum sepenuhnya menggunakan aplikasi ini. Aspirasi masyarakat masih ditampung dengan cara konvensional, kemudian barulah dilakukan penginputan hasil Musrenbang tersebut ke dalam aplikasi e-musrenbang.

Dalam penelitian ini, untuk melihat usulan warga yang kemudian terealisasi, peneliti melakukan penelusuran mulai dari bawah (*bottom up*). Caranya adalah dengan melakukan wawancara kepada RT untuk me-*recall* usulan dari warganya yang benar-benar direalisasikan oleh pemerintah. Penelusuran itu berawal dari usulan yang masuk melalui pertemuan di tingkatan RT yang ada di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo. Dalam mekanisme selanjutnya, di Musrenbang Desa usulan ini disampaikan dan dicatat sebagai salah satu hasil Musrenbang yang kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan. Pada akhirnya, usulan ini dapat direalisasikan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.

Bantuan Untuk Pengembangan UKM Sarana Mandiri Sejahtera

Pada Musrenbang di Desa Pejambon, sebagaimana Musrenbang di desa-desa lainnya, setiap warga diharapkan partisipasinya untuk menyampaikan usulan. Untuk dapat menjangkau semua yang menjadi kebutuhan masyarakat, setiap RT di Desa Pejambon menjaring aspirasi masyarakat melalui pertemuan yang biasanya diadakan setelah malam tahlilan. Tahlilan yang diadakan setiap malam Jumat ini dilakukan secara berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya lingkungan RT tersebut. Dengan memanfaatkan pertemuan tersebut, Ketua RT selaku pemimpin pertemuan tidak hanya menjaring apa yang menjadi kebutuhan warga tetapi memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai ajang diskusi dan berbagi informasi mengenai lingkungan mereka. Menjelang Musrenbang, pertemuan difokuskan untuk menampung kebutuhan warga untuk disampaikan dalam forum Musrenbang Desa.

Gambar 31 Produk-produk UKM Sarana Mandiri Sejahtera

Di Musrenbang Desa, setiap RT memaparkan usulan yang telah dirumuskan tadi. Selain itu usulan juga berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, misalnya dari kelompok tani, kelompok UKM, karang taruna dll. Tidak semua usulan yang disampaikan warga dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah desa. Namun terdapat mekanisme lain dalam perealisasian usulan warga ini. Contohnya adalah adanya bantuan modal untuk UKM Sarana Mandiri Sejahtera yang ada di Desa Pejambon. Bantuan modal ini didapatkan tidak melalui mekanisme anggaran yang direalisasikan melalui Musrenbang, tetapi didapatkan melalui bantuan modal dari Dinas Koperasi.

UKM Sarana Mandiri Sejahtera (SMS) adalah UKM yang bergerak dalam bidang konveksi dengan bahan dasar produk dari batik. Bentuk produk yang dihasilkan sangat beragam mulai dari baju, tas, dompet dan produk aksesoris lainnya yang sudah dipasarkan bukan hanya di wilayah Kabupaten Bojonegoro saja tetapi juga telah dipasarkan sampai ke kota-kota yang ada di Jawa Timur.

Gambar 32 **Banner UKM Sarana Mandiri Sejahtera**

Gambar 33 **Ibu Sumiatun menjelaskan produk-produk yang dihasilkan UKM Sarana Mandiri Sejahtera**

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok UKM ini, Ibu Sumiatun pemasaran mereka lakukan secara online oleh sebab itulah permintaan terhadap produk mereka cukup tinggi. Terkait dengan Open Government, Ibu Sumiatun menjelaskan bahwa ada banyak manfaat yang dapat dirasakan terutama terhadap perkembangan ekonomi desa. Melalui Musrenbang, kelompok ini dapat mengusulkan program untuk peningkatan usaha mereka dan dengan adanya keterbukaan anggaran mereka juga bisa mengawasi penggunaan anggaran keuangan desa. Meskipun bantuan program ini tidak didapatkan melalui pintu Musrenbang, seperti yang telah dikatakan di atas, tetapi kelompok UKM ini diharuskan untuk aktif dan menyampaikan usulannya melalui Musrenbang Desa dan kemudian usulan tersebut tercatat sebagai hasil Musrenbang Desa Pejambon. Kemudian bantuan modal yang mereka dapatkan sekarang ini diperoleh melalui bantuan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bojonegoro. Dinas Koperasi mensyaratkan bahwa bantuan dari instansi mereka dapat disalurkan kepada UKM Sarana Mandiri Sejahtera jika usulan dari UKM tersebut yang terdokumentasikan di dalam Musrenbang Desa. Mekanisme ini tentunya

merupakan cara yang cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi warga serta dokumentasi Musrenbang Desa juga dapat menjadi pedoman untuk membaca kebutuhan-kebutuhan masyarakat bagi instansi-instansi lain.

Pembangunan Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Bersih Warga Desa Campurejo

Bentuk kebutuhan masyarakat yang mendapatkan manfaat melalui penerapan *Open Government* bisa dilihat dari praktek yang dilakukan oleh pemerintah Desa Campurejo. Sebagian wilayah desa ini berada di bibir sungai Bengawan Solo, namun ironisnya daerah ini malah kesulitan air bersih ketika musim kemarau datang. Pada tahun-tahun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah desa mendatangkan truk-truk tangka air yang besar. Ternyata truk besar menyebabkan rusaknya jalan desa dan saluran air. Selain itu, ketika truk tangki datang, warga harus keroyokan berebut air dengan menggunakan aneka macam wadah seperti ember, dandang, rantang, dan panci. Biasanya, setelah musim kemarau berlalu, pemerintah desa harus membenahi kembali jalan dan saluran air yang rusak. Menurut Kepala Desa Campurejo, hal tersebut sudah berjalan beberapa tahun. Pola pemenuhan kebutuhan air bersih semacam ini membuat keuangan desa merugi karena selalu dilakukan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, seperti yang diutarakan Pak Kades sebagai berikut:

> *"Dengan mendatangi tangki itu rugi saya membenahi saluran, membenahi jalan dan itu mahal. Kalau seperti itu saya bisa bangkrut dan saya mau sumber air" (Kepala Desa Campurejo)*

Oleh sebab itu, masyarakat mengusulkan kepada pemerintah desa untuk membangun sumur bor dan tempat penampungan air. Salah satu yang cukup aktif memberikan desakan pembangunan sumur bor ini adalah Mbah Damin, tokoh masyarakat Desa Campurejo. Hasilnya, melalui

program kolaborasi CSR perusahaan Exon dan desa, pada tahun 2010 dibangun 2 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air di 2 Rukun Tetangga (RT). Dan saat ini telah ada 5 titik sumur bor yang terdapat di desa ini. Setelah sumur bor ini dibangun, kepala desa meminta warga untuk menggunakan air tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bukan untuk kepentingan komersil. Warga juga diminta berembug mengenai cara agar pemerintah desa tidak lagi mengeluarkan biaya perawatan terhadap sumur bor tersebut dan jika ada masalah warga dapat mencari jalan keluar

Gambar 34 Saluran air yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga

Gambar 35 Sumur Bor Desa Campurejo

secara bersama-sama. Untuk itu, dibentuklah kelompok yang mengelola air bersih ini dan diberi nama Wiraguna (yang artinya berguna untuk masyarakat). Di kelompok ini disepakati ada tarif yang dikenakan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) untuk setiap meter air yang digunakan. Saat penelitian ini dilakukan, yaitu Maret 2017 jumlah kas kelompok ada yang telah mencapai 70 juta rupiah yang akan digunakan untuk biaya perawatan atau untuk pembelian genset jika ada pemadaman listrik. Dengan adanya sumur bor ini, warga tidak perlu lagi berkerumun untuk mendapatkan air bersih karena juga telah dibangun fasilitas saluran air yang langsung dapat dialiri ke rumah-rumah warga.

Peningkatan Transparansi dalam Proses dan Teknis Kerja di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Melalui Festival OGP

Abstrak

Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung open government hingga ke tingkat desa ditunjukkan dalam berbagai inovasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni melalui festival OGP. Semangat OGP dirasakan hampir di seluruh desa, mereka berlomba-lomba membuka informasi dan anggaran pada baliho-baliho besar yang terpasang di jalan-jalan besar atau kantor-kantor desa. Hal tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk mengakses web desa dan teknologi online.

Prolog

Hal yang mendasari Pemerintah Kabopaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan Open Government adalah karena amanat Undang-undang No. 14/ 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Di samping itu, Open Government merupakan bentuk pencegahan potensi konflik dan potensi korupsi. Serta, peningkatan kualitas kebijakan dan memastikan keterlibatan publik. Terdapat berbagai upaya dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan diadakannya festival OGP. Festival OGP diadakan

setiap bulan Oktober dan merupakan rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Festival ini merupakan ajang bagi setiap instansi untuk membuka seluas-luasnya dan mempublikasikan akuntabilitas pengelolaan anggarannya kepada publik. Instansi yang terlibat mulai dari setiap SKPD yang ada di tingkatan kabupaten hingga ke instansi pemerintahan yang ada di desa. Dalam festival penilaian dilakukan kepada empat variabel penting:

1. Variabel transparansi, dengan bobot penilaian 40 persen.

   Instrumen penilaiannya meliputi jenis informasi yang dipublikasi pemerintah desa, media informasi yang digunakan pemerintah desa, lokasi penempatan media luar ruang, dan pemerintah desa memiliki sarana publikasi media luar ruang yang permanen.

2. Variabel akuntabilitas. dengan bobot penilaian 20 persen

   Menekankan pada tiga instrument penilaian. Yakni, pemerintah desa memiliki perencanaan keuangan desa yang sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah desa melakukan pengukuran kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, dan adanya sosialisasi anti korupsi oleh pemdes.

3. Variabel partisipasi, dengan skor 25 persen.

   Instrumen penilaiannya meliputi pemerintah desa memiliki sarana publikasi hasil musrenbang desa, dan pemerintah desa memiliki peraturan yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kemudian, pemerintah desa melibatkan multipihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, pemerintah desa memiliki forum partisipasi masyarakat yang representatif dan inklusif untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah desa memiliki fokus pembangunan dan mengundang partisipasi masyarakat, dan warga desa dan stakeholders berkontribusi dalam pembangunan.

4. Variabel inovasi, dengan bobot penilaian 15 persen.

   Instrumen penilaiannya meliputi pemerintah desa memiliki forum bersama, pemerintah desa memiliki media informasi berbasis tehnologi informasi, pemerintah desa memiliki pusat informasi dan pengelolaan data berbasis tehnologi informasi, dan pemerintah desa memiliki sarana umpan balik berbasis teknologi informasi.

Reward yang diberikan berupa piala dan piagam dari Bupati. Khusus untuk level pemerintahan desa, semua desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro diberikan penghargaan piagam tanpa terkecuali, artinya tidak ada pemeringkat berdasarkan penilaian yang telah ditentukan seperti yang diutarakan oleh Mas Syaiful sebagai salah satu juri dalam festival OGP tahun 2016 kemaren:

> *"Asal desa buka anggarannya dan dipajang di tempat-tempat umum yang bisa dilihat warga, maka pemerintah desanya diberikan piagam dari bupati langsung. Ini dimaksudkan agar pembukaan anggaran tersebut tidak hanya dibuka pas festival aja tetapi juga sepanjang tahun, karena ini kan informasi yang mesti diketahui warga jika memang mau ada partisipasi dari warga dalam program kerja pemerintah." (Syaiful, Aktivis Bojonegoro Institute).*

Berdasarkan pernyataan di atas harapan keterbukaan anggaan ini tidak hanya dilakukan pada ajang Festival OGP saja tetapi dapat berlanjut meskipun di luar ajang festival. Dan tujuan ini cukup berhasil karena dari beberapa desa yang dikunjungi dalam penelitian ini, tampak adanya baliho-baliho yang berisi mengenai informasi penganggaran pemerintah desa yang diletakkan di tempat-tempat strategis sehingga dapat dilihat oleh masyarakat desa tersebut. Berdasarkan keterangan Mas Syaiful, semua desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan hal yang sama yaitu memajang anggaran desanya minimal di area sekitar kantor kepala desa, karena jika ada desa yang

tidak melakukan hal tersebut maka secara tidak langsung akan mendapatkan sanksi sosial dari desa lainnya, sehingga mau tidak mau pembukaan anggaran tersebut telah menjadi sebuah keharusan bagi setiap desa.

Jenis data yang dibuka di baliho-baliho ini cukup beragam untuk setiap desa, karena ada desa yang hanya membuka rekapan secara garis besarnya saja dari setiap item penganggaran, tetapi ada juga desa yang membuka secara detil anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, sehingga baliho yang dipajang tidak hanya terdiri dari satu baliho saja tetapi bisa mencapai dua sampai tiga baliho. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon, Kecamatan Sumberejo, di mana di halaman balai desa terdapat 3 baliho besar. Informasi ini dibuka untuk memancing respon dari masyarakat luas sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan mengetahui dan mengawasi secara langsung terkait pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah desa.

Gambar 36 Baliho Anggaran Dana Desa Pejambon

Sumber: dokumentasi peneliti

Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Pejambon juga mencetak informasi anggaran ini dalam bentuk poster dan brosur yang kemudian akan ditempelkan di setiap papan informasi yang ada di rumah-rumah ketua RT yang ada di desa ini. Informasi serupa juga terdapat di web desa yang beralamat di www.pejambon-bjn.desa.id, sehingga bagi warga Desa Pejambon yang sedang tidak berada di wilayah desa juga bisa ikut terlibat memantau pengelolaan dana desa.

Untuk mendalami informasi di tingkatan RT kami mendatangi rumah ketua RT 12 yang tempatnya tidak jauh dari kantor kepala desa. Dalam wawancara, Pak RT ditemani oleh istrinya yang kemudian dalam proses wawancara tersebut justru banyak dari pertanyaan kami yang dijawab oleh Ibu RT ini dengan lebih lugas. Ibu RT menjelaskan bahwa dengan adanya papan informasi ini, hanya beberapa warga saja yang cukup aktif untuk membaca papan informasi tersebut sehingga tidak cukup banyak juga respon atau pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada ketua RT. Ada tiga kemungkinan yang menyebabkan itu yaitu pertama karena memang masyarakat sudah paham mengenai informasi tersebut sehingga tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kedua karena masyarakat

tidak peduli dengan dengan program dan kegiatan desa dan ketiga karena adanya nomor kontak kepala desa sehingga masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan kepala desa tanpa melalui ketua RT. Meskipun demikian, di setiap pertemuan RT, informasi yang terpampang di papan tersebut selalu disampaikan kembali melalui verbal oleh ketua RT kepada warganya untuk memastikan bahwa setiap warga benar-benar mengetahui program dan kegiatan desa mereka.

Gambar 37 Poster Anggaran Desa Pejambon (kiri), poster anggaran dipajang di rumah salah satu ketua RT Desa Pejambon (kanan)

Sumber: dokumentasi peneliti

Menurut Sekretaris Desa Pejambon, Pak Sufyan. meskipun informasi anggaran sudah tersedia di *website* desa, namun pembukaan anggaran desa dengan memajang baliho besar ini juga penting karena ada dari warga mereka yang tidak punya kemampuan untuk mengakses web desa, dan

umumnya mereka adalah orang-orang tua yang tidak memiliki ataupun paham dalam menggunakan teknologi *online*.

Selanjutnya Pak Sufyan memberikan informasi bahwa respon yang paling banyak datang dari warga terhadap anggaran desa ini adalah pertanyaan mengenai gaji kepala desa yang menurut masyarakat cukup besar. Namun hal itu dapat dijawab bahwa besaran gaji tersebut telah mengikuti aturan yang ada. Dan untuk menyakinkan masyarakat, maka kepala desa beserta aparat desa lainnya berusaha membuktikan dengan kinerja pemerintahan yang bagus dan dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8E RT 010 RW 06 Kel/Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520 - Indonesia

Ph. +62 (21)7811-798 Fax. +62 (21)7811-897
E-mail to: perkumpulan@theprakarsa.org

ISBN 978-623-91350-6-5

9 786239 135065